



SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN DAERAH SULAWESI TENGAH



ektorat
nyaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

959.844

NUR

S

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN DAERAH SULAWESI TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1982

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah 1978/1980.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

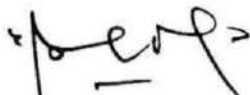
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Dra Ny. Nurhayati Nainggolan, Daeng Patiro Laintagoa BA, Drs. R.E. Nainggolan dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Drs. Frans Hitipeuw, Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.—

Jakarta, Desember 1982.

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapakan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Desember 1982.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
KATA SAMBUTAN	V
DAFTAR ISI	VII
PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penelitian	3
B. Masalah	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Pertanggung jawaban Ilmiah prosedur peneli- tan	6
E. Hasil akhir	8
BAB I. KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEME- RINTAHAN PENDUDUK JEPANG (1942 – 1945)	9
A. Bidang Pemerintahan	9
B. Bidang Sosial Budaya	34
C. Bidang Sosial Ekonomi	41
D. Pengaruh Politik	43
E. Kegiatan Masyarakat	45
F. Interaksi Di Daerah Dengan Kegiatan Organi- sasi Politik Sosial Antara lain	54
BAB II. KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLA- MASI KEMERDEKAAN	59
A. Kegiatan Masyarakat yang Relevan Dengan ataupun yang Merupakan Awal dan Proses Re- volusi Kemerdekaan di Daerah	59
B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indone- sia di Daerah	68
C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran Perjuang- an Bersenjata di Daerah	71
D. Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara NICA di Daerah	79
BAB III. PERJUANGAN DI DAERAH	92
A. Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I sampai Masa Aksi Militer Belanda II	92
B. Interaksi di Daerah Dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional	110
C. Perjuangan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kegiatan/Kehidupan	115

BAB IV. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FI- SIK)	126
A. Masa Menjelang Persetujuan KMB	126
B. Pelaksanaan Hasil KMB di Daerah	126
C. Sikap Masyarakat Terhadap Cita-Cita Negara Kesatuan Republik Indonesia	130
D. Kegiatan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kehidupan Sosial Ekonomi	138
PENUTUP	144
DAFTAR SUMBER/KEPUSTAKAAN	149
LAMPIRAN/DAFTAR INFORMAN	151

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan penyusunan data-data tentang Sejarah Daerah Sulawesi Tengah meliputi kurun waktu dari \pm 1942 – 1950. Sesuai dengan judul yang ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Proyek IDKD) Pusat untuk Aspek Sejarah Daerah maka penulisan tematis ini berjudul: "Sejarah Revolusi Kemerdekaan Nasional (Revolusi Fisik) 1945 – 1949 Daerah Sulawesi Tengah".

Walaupun dalam penulisan ini kami berpedoman pada TOR yang ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat karena tiadanya data-data tentang beberapa hal maka terpaksa ada beberapa bagian yang dilangkahi dan tak dapat diisi karena penulisan hanya disesuaikan dengan sumber data-data yang ada di Daerah Sulawesi Tengah ini.

Apa yang dimaksud dengan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sekarang ini adalah wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten masing-masing :

1. Kabupaten Donggala
2. Kabupaten Poso
3. Kabupaten Buol-Toli-Toli
4. Kabupaten Luwuk-Banggai

dan batas wilayahnya terletak pada :

- 2° Lintang Utara
- 3°46' Lintang Selatan
- 119°22' Bujur Timur
- 124°20' Bujur Timur

Batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan Laut Sulawesi dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Sebelah Timur berbatas dengan Laut Maluku (Pulau Sonit).

Sebelah Barat berbatas dengan Selat Makassar.

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Propinsi Sulawesi Tengah, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu (sebelum pemerintahan penjajahan Jepang), merupakan bagian dari Keresidenan Manado dan terdiri dari 2 (dua) Afdeling masing-masing :

1. Afdeling Donggala yang terbagi pula dalam Onder-Afdeling Donggala, Onder Afdeling Palu dan Onder Afdeling Toli-Toli. Sedangkan Onder Afdeling Buol pada waktu itu masuk dalam wilayah Afdeling Gorontalo.

2. Afdeling Poso yang terbagi pula dalam Onder Afdeling Poso, Onder Afdeling Parigi, Onder Afdeling Kolonadale dan Onder Afdeling Banggai.

Pada waktu itu tiap-tiap Onder Afdeling dijumpai lagi kerajaan-kerajaan yang berstatus *Zelfbestuurende Landschappen* sehingga dapat dikatakan daerah Sulawesi Tengah pada masa-masa menjelang datangnya penjajahan Jepang tahun 1942 berlaku pemerintahan *Zelfbestuur* pada kerajaan-kerajaan disamping itu berlaku pula *Rechtstreeks bestuur*. 1)

Menurut informasi dari Bapak W.S. Ruata; dahulu setiap 5 (lima) tahun diadakan peninjauan kembali tiap-tiap perundang-undangan atau peraturan-peraturan di seluruh Sulawesi Tengah pada waktu itu diatur dengan *Zelfbestuuring* tahun 1838, karena waktu itu di Sulawesi Tengah terdapat 16 (enam belas) kerajaan yang masing-masing dikepalai oleh seorang raja. Dalam pemerintahannya, raja-raja tadi dibantu oleh Dewan Hadatnya masing-masing.

Selanjutnya sejak tanggal 2 September 1948 dibentuklah Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang meliputi Afdeling Donggala dan Afdeling Poso dengan ibu kotanya Poso terdiri dari 7 (tujuh) Onder Afdeling yaitu :

1. Onder Afdeling Donggala.
2. Onder Afdeling Palu.
3. Onder Afdeling Poso.
4. Onder Afdeling Parigi.
5. Onder Afdeling Toli-Toli.
6. Onder Afdeling Kolonadale.
7. Onder Afdeling Banggai.

Kemudian sejak tahun 1952 berdasarkan PP. No. 33 tahun 1952 Daerah Otonom Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 (dua):

1. Daerah Otonom Poso meliputi Onder Afdeling (kewedanaan) Poso, Luwuk-Banggai dan Kolonadale ibu kotanya Poso.
2. Daerah Otonom Donggala meliputi Onder Afdeling (kewedanaan) Donggala, Palu, Parigi dan Toli-toli ibu kotanya Palu.

1) Hasil wawancara dengan Bp. W.S. Ruata di Palu, tanggal 14-9-1979.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU. No. 29 tahun 1959 kedua daerah otonom tersebut di atas masing-masing dipecah menjadi 2 (dua) kabupaten.

Daerah Otonom Poso dijadikan 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Poso ibu kota Poso dan Kabupaten Banggai ibu kota Luwuk.

Daerah Otonom Donggala dijadikan 2 (dua) kabupaten masing-masing Kabupaten Donggala ibu kota Palu dan Kabupaten Buol-Toli-Toli ibu kotanya Toli-Toli.²⁾

A. TUJUAN PENELITIAN

Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa dan tanah airnya dari cengkeraman kekuasaan penjajah telah melalui liku-liku perjuangan yang cukup panjang di mana seluruh bagian wilayah tanah air Indonesia pernah terlibat di dalamnya.

Oleh kenyataan inilah maka penelitian sejarah daerah ini dilaksanakan agar dapat diadakan pencatatan serta penggolongan data-data aktivitas dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perjuangan pada masa itu, sehingga dapatlah diinventarisir dan didokumentasikan sebagai dokumen sejarah bangsa Indonesia yang kelak dapat dimanfaatkan bagi pembentukan watak dan jiwa kebangsaan generasi mendatang di samping sebagai suatu kebanggaan nasional.

Penelitian sejarah daerah ini tujuannya dapat dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mendokumentir data-data sejarah masa revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan bagi keperluan pelaksanaan kebijaksanaan penelitian dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat,

²⁾ M.H. Koeswandi. BA., *Mengenal Kabupaten Poso*, Pemerintah Kabupaten Dati II Poso, 1977, hal. 3.

meneliti dan mengolah data-data sejarah di Daerah Sulawesi Tengah meliputi masa-masa sekitar tahun 1942 – 1950, kemudian menyusunnya dalam suatu penulisan tematis Sejarah Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di Sulawesi Tengah.

b. Dengan adanya penelitian ini maka sumber-sumber Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di Sulawesi Tengah dapat diselamatkan dari kemusnahan tanpa dicatat.

c. Penelitian ini bertujuan menginventarisir data-data Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka menambah informasi bagi penyusunan Sejarah Nasional yang lebih lengkap, yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan kebudayaan nasional.

d. Penelitian ini bertujuan menggali bahan, sumber dan materi sejarah daerah Sulawesi Tengah dalam skope regiocentris. Oleh karena itu dalam penulisan walaupun berpedoman pada TOR namun ada beberapa hal yang tak dapat diisi berhubung tidak adanya materi atau data tentang hal tersebut di daerah Sulawesi Tengah.

B. MASALAH

Adalah suatu kenyataan bahwa sampai saat ini data-data tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam zaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di seluruh wilayah tanah air belum terungkap seluruhnya. Sedangkan Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sebagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memiliki nilai kesejarahan yang sangat penting, karena terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu. Karena itu masalah dalam penelitian sejarah daerah ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Masalah Umum

Pusat penelitian Sejarah dan Budaya belum sepenuhnya dapat melayani data dan informasi kebudayaan yang terjalin di dalam bahan sejarah baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat.

2. Masalah Khusus

a. Proses perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia

itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah Sulawesi Tengah ini dengan berbagai corak dan ragamnya. Karenanya diperlukan penelitian secara lebih luas, mendalam dan terperinci agar supaya dapat didokumentasikan dalam bentuk naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Sulawesi Tengah, dengan demikian dapatlah diperoleh pengertian yang mendalam mengenai zaman itu.

b. Sebagai salah satu bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka proses perjuangan kemerdekaan nasional di Sulawesi Tengah ini memiliki perkembangan yang berbeda dengan yang terjadi di daerah-daerah lain. Namun demikian arah dan tujuannya tetap sama yaitu tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa dari cengkeraman kekuasaan penjajah.

c. Masih kurangnya bahan-bahan tertulis mengenai masa-masa perjuangan Revolusi Fisik di Sulawesi Tengah, sedangkan tokoh-tokoh pimpinan/pejuang yang terlibat langsung sudah banyak yang wafat menyebabkan perlunya cepat-cepat diadakan pencatatan dan inventarisasi data-data yang menyangkut perjuangan zaman Revolusi Fisik di Sulawesi Tengah di mana tokoh-tokoh yang masih hidup perlu dihubungi guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

d. Faktor sulitnya komunikasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya di daerah Sulawesi Tengah di mana tokoh-tokoh informan terpencar-pencar tempat tinggalnya pun merupakan salah satu masalah dikaitkan dengan sempitnya waktu penelitian yang ada, karena pencairan anggaran nanti terlaksana pada awal bulan Agustus 1979.

C. RUANG LINGKUP

1. *Ruang lingkup Inventarisasi dan Dokumentasi Tematis Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) daerah Sulawesi Tengah ini meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama/kepercayaan, organisasi masyarakat, kepemudaan, kewanita-an, pers dan bentuk organisasi profesional lainnya.*

2. *Walaupun dalam penyusunan tulisan ini kami berpedoman pada TOR yang ditentukan oleh IDKD Pusat, namun pada kenyataannya ada beberapa bagian yang tak dapat diisi karena tiadanya data tentang hal tersebut di daerah ini, sehingga yang menjadi materi pembahasan benar-benar berfokus regiocentris.*

3. *Bahan-bahan Sejarah Daerah* yang diungkapkan dalam penulisan ini diperoleh dari 4 (empat) kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah; jadi meliputi seluruh wilayah administratif Propinsi Sulawesi Tengah.

D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur kegiatan penelitian yang ditempuh dari awal sampai tersusunnya naskah ini adalah sebagai berikut :

1. *Ketua Aspek Sejarah Daerah Sulawesi Tengah mengikuti Pekan Pengarahan (Penataran Tenaga Peneliti) Penulis se Indonesia* yang berlangsung di Cisarua dari tanggal 10 Juni 1979 s/d 18 Juni 1979.

Selama berada di Jakarta Ketua Aspek Sejarah Daerah Sulawesi Tengah mencari/mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan sejarah daerah Sulawesi baik di Museum maupun di toko-toko buku.

2. *Pertemuan antara Ketua Proyek Daerah Sulawesi Tengah dengan Ketua-Ketua Aspek termasuk Aspek Sejarah Daerah* untuk membuat perencanaan penelitian dengan berpedoman pada jadwal kegiatan dari Proyek IDKD Pusat. Di samping itu juga membicarakan/membuat pembiayaan kegiatan penelitian tiap-tiap aspek sampai pada penyusunan naskah.

3. *Membuat perencanaan kegiatan penelitian Aspek Sejarah Daerah Sulawesi Tengah :*

- a. Tenaga Peneliti terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing :
 - 1) Dra. Nyonya Nurhayati Nainggolan sebagai Ketua Tim Aspek Sejarah Daerah Sulawesi Tengah merangkap anggota.
 - 2) Daeng Patiro Laintagoa B.A. sebagai Sekretaris Tim merangkap anggota.
 - 3) Drs. R.E. Nainggolan sebagai anggota.
- b. Menyusun jadwal kegiatan penelitian berpedoman kepada jadwal kegiatan dari Proyek IDKD Pusat di Jakarta sebagai berikut :
 - 1) Bulan Juni – Juli 1979.
 - a) menginventarisasi informan-informan yang akan diwawancarai.
 - b) mencari/mengumpulkan literatur-literatur yang ada di daerah yang berhubungan dengan penelitian yang akan

diadakan.

- c) menyiapkan daftar pertanyaan dan interview guide serta alat-alat yang diperlukan dalam penelitian lapangan.
- 2) Bulan Agustus – September 1979.
Terjun ke lapangan mencari data di 4 (empat) kabupaten wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a) Kabupaten Donggala dilakukan bersama serentak oleh ketiga orang anggota Tim.
 - b) Kabupaten Buol Toli-toli: Dra. Ny. Nurhayati Nainggolan.
 - c) Kabupaten Poso: Daeng Patiro Laintagoa BA.
 - d) Kabupaten Luwuk – Banggai: Drs. R.E. Nainggolan.
- 3) Bulan Oktober – Nopember 1979.
Pertemuan anggota Tim untuk mengolah data dan menyusun naskah sampai selesai.
- 4) Bulan Desember 1979.
Naskah selesai disusun dan diperiksa kembali oleh Tim lalu diserahkan kepada Ketua Proyek untuk selanjutnya oleh Ketua Proyek diserahkan kepada IDKD Pusat di Jakarta.
- c. Metode dan tehnik penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
 - 1) angket dengan menyebarkan questioner kepada informan-informan di 4 (empat) kabupaten se Propinsi Sulawesi Tengah sebelum anggota Tim mengunjungi kabupaten-kabupaten yang bersangkutan.
 - 2) wawancara/interview.
 - 3) kepustakaan.
- d. Cara kerja Tim dalam penelitian dan pengolahan data adalah sebagai berikut :
 - 1) Tokoh-tokoh pejuang daerah baik yang berstatus veteran maupun yang tidak.
 - 2) Tokoh-tokoh daerah yang terdiri dari bekas pegawai Pamongpraja baik yang pernah berstatus sebelum dan sesudah zaman Jepang, yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, para pensiunan guru, para penilik kebudayaan tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yang masih bertugas (belum pensiun).
 - 3) Tokoh-tokoh perintis kemerdekaan yang masih hidup dan

telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang turut aktif berjuang pada zaman Revolusi Fisik.

- 4) Tokoh-tokoh wartawan di daerah.
- 5) Tokoh-tokoh wanita yang pernah aktif dalam pergerakan wanita masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).
- 6) Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pergerakan politik yang banyak mengikuti dan mengetahui perkembangan kejadian pada zaman Jepang sampai zaman Revolusi Kemerdekaan.

Data-data yang telah terkumpul diolah bersama oleh ketiga anggota Tim di mana data-data diseleksi, mana yang didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipercaya diuraikan secara umum kalau ternyata sifatnya sama untuk 4 (empat) daerah kabupaten, dan yang bersifat khusus diuraikan secara mendetail perdaerah kabupaten mengingat sejak masa pemerintahan militer Jepang sampai pada zaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik), hubungan komunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi Tengah sangat sulit, sehingga gerakan-gerakan yang ada bersifat setempat-setempat tidak terkoordinir dalam satu komando.

E. HASIL AKHIR

Buku ini aslinya digarap oleh satu Tim, penyusun di Sulawesi Tengah yang meliputi kerangka seperti yang ditentukan oleh Proyek IDKD di Pusat, selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penilaian oleh para tenaga ahli, dan tim dari Pusat maupun Daerah. Hasil penilaian tersebut dijadikan landasan untuk pekerjaan penyempurnaan dan editing.

Pada pekerjaan editing diarahkan pada segi-segi kebahasaan dan pendekatan. Kebahasaan diperhatikan hal-hal seperti ejaan, istilah dan keterbacaan. Pada pendekatan diperhatikan azas regiocentris.

Buku ini merupakan laporan dari usaha inventarisasi dan dokumentasi kesejarahan periode Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) tahun 1945 – 1949 di Propinsi Sulawesi Tengah. Buku ini dipandang sebagai usaha perintisan untuk inventarisasi dan dokumentasi kesejarahan selanjutnya yang lebih sempurna bagi penyempurnaan penulisan Sejarah Daerah maupun Sejarah Nasional, sesuai dimensi sejarah ataupun menurut perkembangan zaman.

B A B I

KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Masa menjelang tibanya pendudukan Jepang

Pada tahun 1942 menjelang kalahnya pemerintah Hindia Belanda pada balatentara Jepang maka di Sulawesi Tengah terdapat 16 kerajaan dengan bentuk *Zelfbestuurende Landschappen* yang diatur dengan *Zelfbestuurregeling* tahun 1938. Ketika itu Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Keresidenan Manado dengan ibu kotanya Manado dan dibagi atas 2 (dua) Afdeling masing-masing Afdeling Donggala dan Afdeling Poso dan masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen.

Sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Hindia Belanda maka di Sulawesi Tengah pun berlaku *Rechtstreeks Bestuur*. Namun yang diserahi melaksanakan pemerintahan adalah raja-raja dengan status *Zelfbestuurende Landschappen*.

Di Sulawesi Tengah pada awal tahun 1942, menjelang datangnya Jepang, ada beberapa tempat yaitu Toli-Toli, Luwuk dan Ampana sempat mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan pemerintah Belanda. Pengambil alihan kekuasaan itu dipelopori tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan nama gerakannya Gerakan Merah Putih.

Seperti tercatat dalam sejarah, Gerakan Merah Putih ini berpusat di Gorontalo dipimpin oleh *Nani Wartabone* dan *Kusno-dhanupoyo*.

Pada tanggal 23 Januari 1942 Gerakan Merah Putih ini telah merebut kekuasaan dari pejabat pemerintah Belanda dengan menangkapi pejabat-pejabat Belanda tersebut lalu membentuk pemerintahan Nasional Gerakan Merah Putih. Pada hari itu juga bendera Merah Putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya dalam satu upacara di lapangan Olah Raga Gorontalo.

Perebutan kekuasaan oleh Gerakan Merah Putih Gorontalo ini kemudian diikuti pula di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Di Toli-Toli pada tanggal 1 Pebruari 1942 bendera Merah Putih telah dinaikkan di angkasa di depan kantor PSII Toli-Toli dipimpin oleh I.D. Awuy.

- b. Di Luwuk bendera Merah Putih dinaikkan di angkasa pada tanggal 12 Pebruari 1942 di depan kantor pemerintah Luwuk setelah pasukan Gerakan Merah Putih Luwuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Belanda di bawah pimpinan T.S. Bullah.
- c. Pada tanggal 20 Pebruari 1942 peristiwa yang sama terjadi pula di Ampana (Poso) di mana para pemuda Gerakan Merah Putih dipimpin oleh wakil raja Tojo Tanjumbulu bernama R.G. Datupamusu.

Adapun ketiga peristiwa di atas terjadinya adalah sebagai berikut :

Pada penghujung masa pemerintahan Belanda di Toli-Toli terjadi pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya kepala polisi Inspektur Boertje yang mati ditembak oleh anak buahnya bernama I.D. Awuy. I.D. Awuy ini adalah seorang anggota polisi yang diutus oleh Nani Wartabone dari Gorontalo ke Buol dan Toli-Toli untuk menggalakkan Gerakan Merah Putih. Rapat rahasia untuk merencanakan aksi Gerakan Merah Putih itu diadakan di rumah Klerk E. Kansil di Toli-Toli pada tanggal 23 Januari 1942 dihadiri oleh :

- 1) I.D. Awuy anggota polisi sebagai pimpinan.
- 2) H.L. Waani, juga anggota polisi.
- 3) E. Kansil, *Klerk Controleur*.
- 4) A. Manuel, *Boekhouder Controleur*.
- 5) Makale, *Werk Baas*.
- 6) S. Malingga, Kepala Douane Toli-Toli.
- 7) M. Salim Haji Mallu, tokoh partai PSII.

Tujuan Gerakan Merah Putih adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah Belanda di Buol Toli-Toli dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini cepat mendapat sambutan dari pemuda, kaum pergerakan, anggota polisi dan pegawai pemerintahan.

Pada tanggal 25 Januari 1942 malam, terjadilah pemberontakan dan pembunuhan terhadap kepala polisi Belanda Inspektur Boertje. Setelah terjadi pembunuhan itu maka pemberontakan yang dipimpin oleh I.D. Awuy segera mengepung rumah kontrol Toli-Toli *De Hoof*, menangkapnya dan memasukkannya dalam tahanan kemudian menangkap tuan Yansen. Sesudah itu mereka mengepung rumah *Bestuur Assistent* Mattata Daeng Masese; ternyata malam itu ia tidak berada di rumahnya dan pencarian dilanjutkan pada besoknya tanggal 26 Januari 1942. Akhirnya

ketahuan ia bersembunyi di kebunnya. Yang bertugas mencarinya adalah Laguju (anggota polisi), E. Kansil, M. Salim Haji Mallu dan sopir oto Lamuin, akhirnya Matta Daeng Masese dapat ditangkap dan ditahan.

Pada hari itu pula I.D. Awuy berangkat bersama Waani (anggota polisi) ke Buol untuk menangkap Kontrolleur Buol *De Vries*, kemudian *De Vries* diseret ke Toli-Toli. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh penjajah tersebut maka praktis kekuasaan berada di tangan Gerakan Merah Putih. Gerakan inilah yang mengatur pemerintahan dan keamanan. Pimpinan Gerakan Merah Putih I.D. Awuy kemudian mengatur keamanan. Pimpinan keamanan dipegang oleh kepolisian dibantu oleh tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan ;

- 1) Haji Mahmuda, Kadi Kerajaan Toli-Toli.
- 2) S.A. Alatas, Kepala Arab.
- 3) Haji Hamid, Ketua PSII.
- 4) Haji Ibrahim, Pimpinan Pemuda Muslim.
- 5) M. Tahir, Ketua Pandu SIAP.
- 6) Haji Said, Kepala Sekolah Islamiyah.
- 7) M. Yamin, Penulis PSII.
- 8) A. Rasyid, anggota PSII.

Pada tanggal 1 Pebruari 1942 dengan diiringi lagu Indonesia Raya berkibarlah Sang Merah Putih di angkasa Toli-Toli di halaman kantor PSSI Desa Lonti, tiga setengah tahun mendahului Sang Saka Merah Putih di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pengibaran bendera ini dipimpin oleh M. Salim Haji Mallu. Yang menjadi penggerek bendera adalah M. Nawir Haji Hamid dan Abu Baoda; dan upacara ini dihadiri oleh Jaksa Yakobus dan rakyat Toli-Toli.

Sesudah selesai rapat umum untuk menaikkan bendera Merah Putih barulah diketahui dua orang anggota polisi telah melarikan diri yaitu Usman dan Ma'ruf, berangkat ke Donggala melaporkan kudeta Gerakan Merah Putih Toli-Toli. Seminggu kemudian datanglah pasukan tentara Blanda yang dipimpin oleh Letnan Herberts dan mendarat tengah malam di Toli-Toli langsung mengepung tangsi polisi Toli-Toli dengan persenjataan yang kuat menyebabkan para polisi yang sudah memberontak tidak sempat mengadakan pertahanan, kemudian mengundurkan diri masuk hutan di atas kampung Tuwelei.

Pagi harinya pasukan Belanda memasuki tangsi polisi dan

menawan isteri-isteri polisi yang telah melarikan diri itu. Di situ tentara Belanda mempergunakan tipu muslihatnya dengan jalan membujuk isteri-isteri polisi tersebut supaya memanggil suaminya dan menjanjikan akan memberikan surat pengampunan bagi suaminya. Dengan hasil bujukan itu akhirnya anggota polisi yang melarikan diri itu terpancing untuk kembali dan menyerah antara lain Makaleo, Piring, Languju, Siswoyo, Suparman. Yang tidak menyerah terus melarikan diri antara lain I.D. Awuy, H.L. Waani, Jafar Habibi, S. Malingga dan M. Salim Haji Mallu. Sedang yang tertangkap dari golongan pegawai adalah E. Kansil, Makalo, A. Manuel ketiganya dipenjarakan di Donggala. I.D. Awuy melarikan diri ke Gorontalo, tertangkap di Buol dan diserahkan kepada raja Buol. Kemudian datang sersan Welingsha (lebih dikenal dengan nama sersan Merah) menembak I.D. Awuy di belakang penjara Leok pada tanggal 18 Pebruari 1942 sehingga gugur. H.L. Waani yang melarikan diri ke Tuwelei akhirnya tertangkap dan ditembak mati di Panasakan Dalam. Sebelumnya Makaleo, Piring, Languju, Siswoyo dan Suparman telah ditembak mati di Panasakan Dalam. S. Malingga, M. Salim Haji Mallu dan Jafar Habibi dapat meloloskan diri ke Gorontalo. Nanti setelah Belanda menyerah kepada Jepang barulah mereka kembali ke Toli-Toli.

Atas permintaan pejuang-pejuang kemerdekaan kepada pemerintah Jepang Buknon Kanrikan Awatzu maka didirikanlah tugu peringatan di depan kantor yang kini menjadi kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli. Tugu peringatan bertuliskan nama para pejuang yang telah gugur masing-masing :

1. I.D. Awuy.
2. H.L. Waani.
3. Makaleo.
4. Piring.
5. Siswoyo.
6. Suparman.
7. Languju.

Nama pahlawan-pahlawan tersebut sekarang dijadikan nama jalan di kota Toli-Toli. Para pahlawan yang gugur di Panasakan Dalam dikuburkan dalam satu lubang; nanti pada tahun 1961 kerangkanya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Toli-Toli. Tugu pejuang yang dibangun di depan kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli pada zaman Jepang, pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1950

dirombak dan diganti dengan nama Tugu Proklamasi yang kemudian pada tahun 1974 diganti pula namanya menjadi Tugu Pancasila.

Dengan disponsori oleh tokoh-tokoh pergerakan di Bunta – Pagimana, maka di Kabupaten Luwuk – Banggai terjadi pula perebutan kekuasaan dari tangan penjajah Belanda.

Pada tanggal 6 Pebruari 1942 diadakanlah pertemuan/musyawarah bertempat di rumah Theng Fu Yung, (seorang pedagang Tionghoa) di Pagimana.

Setelah membahas keadaan/situasi internasional berdasarkan pandangan-pandangan dari beberapa peserta rapat maka diambil-lah keputusan-keputusan sebagai berikut :

- a. Dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut berusaha dengan jalan mengadakan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan penjajahan Belanda yang berkedudukan di Luwuk.
- b. Mengikrarkan sumpah setia dalam perjuangan.
- c. Menunjuk :
 - 1) T.S. Abdullah sebagai pemimpin.
 - 2) M.A. Makarao sebagai pembantu.
 - 3) S.P. Makarao s.d.a.
 - 4) A. Lagonah s.d.a.
 - 5) Ys. Monoarfa s.d.a.
 - 6) A.R. Lanasir s.d.a.
 - 7) N. Buato s.d.a.
 - 8) Theng Fu Yung s.d.a.
 - 9) Dadi Misilu s.d.a.

Untuk melaksanakan maksud punt I di atas maka dibentuk :

- a. Pasukan Pemberontak Pemuda Merah Putih di Pagimana terdiri dari :
 1. Ince Umar Dahlan sebagai Komandan I.
 2. A.R. Lanasir sebagai Komandan II.
 3. Ys. Monoarfa sebagai anggota.
 4. Dadi Misilu s.d.a.
 5. Go Weng Sui s.d.a.
 6. Ahmadi Tapo s.d.a.
 7. Mambo Masulili s.d.a.
 8. Sune Noka s.d.a.
 9. Dahlan Lagonah s.d.a.
 10. The Tiong Lam s.d.a.
 11. Sho Lip Pia s.d.a.

12. Shio Kie Lien sebagai anggota.
- b. Selain dari membentuk pasukan pemberontak juga mengirim perutusan ke Gorontalo untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Nasional di bawah pimpinan Nani Wartabone karena di Gorontalo rakyat telah mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Hindia Belanda sekitar bulan Januari 1942.
- Perutusan ke Gorontalo terdiri dari dua gelombang:
Yang pertama terdiri dari dua orang masing-masing :
- 1) A. Lagonah.
 - 2) S.P. Makaro.
- Yang kedua juga terdiri dari dua orang yaitu :
- 1) Sue.
 - 2) Ali Bजारत.
- c. Mengirim utusan/kurir untuk menghubungi sponsor-sponsor/pemimpin-pemimpin di antaranya :
1. Ahmad Fulilehan di Lobu.
 2. S. Kirdiat dan kawan-kawan di Bunta.
 3. Dr. Soetaryo, A.G. Mambu dan kawan-kawan di Luwuk.
- d. Perhubungan Pagimana – Luwuk ditutup sambil mengadakan penjagaan yang ketat. Keadaan darurat diumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat di kampung-kampung sekitar Pagimana sambil diberikan penjelasan serta disiapkan untuk berjuang bersama-sama.

Di kampung Poh yang letaknya antara Pagimana – Luwuk diperketat penjagaan lalu lintas.

Pada tanggal 8 Pebruari 1942 seorang jaksa anggota *Vernielings Corps* (VC) Belanda membawa bahan peledak/dinamit untuk merusakkan jembatan besar di Lobu. Ia ditangkap oleh beberapa anggota Gerakan Merah Putih di Lobu pimpinan Ahmad Fulilehan.

Pada tanggal 9 Pebruari 1942 Kepala Resort Tomini Bocht K.J. Rorimpandey telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada T.S. Bullah sebagai pucuk pimpinan Pemerintahan Nasional pada masa itu.

Pada tanggal 11 Pebruari 1942 pukul 13.30 waktu setempat setelah selesai shalat Jum'at bertempat di rumah Haji Abdau Masulili kampung Pala Pagimana diadakan upacara doa selamat untuk merestui keberangkatan Pasukan Gerakan Merah Putih berjumlah 12 orang bersenjatakan Mauser, pistol, senapan dua

laras dibawah pimpinan Ince Umar Dahlan dan A.R. Lanasir masing-masing sebagai Komandan I dan II dengan bersepeda. Pasukan singgah di Poh memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat sekitar maksud dan tujuan perjuangan tersebut. Selesai makan malam di Poh Pasukan Gerakan Merah Putih melanjutkan perjalanan ke Luwuk melalui kampung Salodik dan Biak menambah tenaga di antaranya :

1. Daeng Maka dan Jonggulemba di Salodik.
2. D. Gela di Biak.

Jarak Pagimana – Luwuk \pm 64 km dan pasukan Pemberontak (Gerakan Merah Putih) tiba di Biak sekitar pukul 02.00 malam. Setelah diadakan perundingan di atas jembatan Biak untuk membagi-bagi tugas masing-masing untuk dilaksanakan nanti setelah memasuki kota Luwuk, maka berangkatlah pasukan Gerakan Merah Putih sekitar pukul 03.00 pagi. Tiba di km 1 (satu) dari Luwuk di situlah pasukan dibagi atas dua kelompok :

Kelompok pertama terdiri dari :

1. A.R. Lanasir.
2. Ys. Monoarfa.
3. Daeng Maka sebagai *voorspit* untuk meninjau situasi kota Luwuk langsung menghubungi kawan-kawan di Luwuk.

Kelompok kedua anggota-anggota lainnya di bawah pimpinan Ince Umar Dahlan di bidang operasional untuk melaksanakan penangkapan-penangkapan terhadap seluruh pegawai pemerintah Belanda terdiri dari bangsa Belanda dan bangsa Indonesia yang setia pada Belanda sesuai yang telah direncanakan. Pertama-tama stasion radio dan kapal S.S. Urania dikuasai. Sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 12 Pebruari 1942 seluruh aparat pemerintah Belanda di kota Luwuk selesai ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan di penjara Luwuk. Selanjutnya dilaksanakan serah terima kekuasaan/pemerintahan dari tangan *Gezaghebber* F. Walrabbe sebagai HPB ke tangan Dr. Soetaryo sebagai wakil pimpinan Gerakan Pemberontak Rakyat Banggai merangkap Kepala Bahagian Keamanan.

Selesai serah terima jabatan/kekuasaan, bendera Merah Putih Biru diturunkan dari tiangnya kemudian warna birunya disobek lalu bendera Merah Putih dinaikkan dengan upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah seluruh keadaan/situasi dikuasai maka diaturlah pertahanan/keamanan dan penjelasan-penjelasan diberikan.

Pada tanggal 14 Pebruari 1942 sebagian pemimpin-pemimpin dari Pagimana dan Bunta berdatangan ke Luwuk dan kemudian mengadakan perundingan bersama dan memutuskan untuk mengirim delegasi ke Banggai untuk menemui serta menghubungi raja Banggai S.A. Amir menyampaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengambil alihan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 12 Pebruari 1942 yang lalu di mana beliau menyetujui pa yang telah dilaksanakan.

Pada tanggal 16 Pebruari 1942 sekembali perutusan dari Banggai bersama-sama dengan raja Banggai S.A. Amir diadakan perundingan/permusyawaratan di suatu tempat di antara pemimpin-pemimpin dari Pagimana – Bunta dan Luwuk di mana hasilnya telah mendapat persetujuan bersama serta kata sepakat membentuk suatu badan Pemerintahan Nasional dengan istilah Komite 12 terdiri dari 12 orang anggota dipimpin/diketuai oleh S.A. Amir ex Raja Banggai dibantu/dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang mengepalai bahagian-bahagian sebagaimana tercantum di bawah ini :

- 1) S.A. Amir, Kepala Pemerintahan/Ketua Komite 12.
- 2) T.S. Bullah, Wakil Kepala Pemerintahan.
- 3) Ys. Monoarfa, Sekretaris dan Penghubung.
- 4) S. Amir, Bahagian Keuangan dan Perbekalan.
- 5) Dr. Soetaryo, Keamanan dan Kesejahteraan.
- 6) A. Lagonah, Urusan Umum.
- 7) A.G. Mambu, Urusan Umum.
- 8) S. Kirdiat, Penerangan.
- 9) N. Peju, Bahagian Pengajaran dan Pendidikan.
- 10) R.G. Makadada, Bahagian Pengajaran dan Pendidikan.
- 11) Ipung Mang, Bahagian Perekonomian.
- 12) S.H. Bunai, Bahagian Perekonomian.

Dengan terbentuknya Pemerintahan Nasional/Komite 12 Daerah Banggai mulailah roda pemerintahan diatur terutama di bidang keamanan mengingat masih adanya kekuatan Belanda yang mengapit daerah Banggai antara Kolonadale – Poso di mana kegiatan-kegiatan mereka masih ada dengan adanya info-info/pemberitaan yang didapat bahwa Belanda akan mengadakan serangan dari dua jurusan sehingga demi menjaga kemungkinan benarnya hasrat keinginan mereka maka pada tanggal 18 Pebruari 1942 tahanan bangsa Belanda segera diantar ke Gorontalo dengan kapal S.S. Urania, dibawa oleh satu regu Pemuda

Gerakan Merah Putih dipimpin oleh Ahmad Fulilehan terdiri dari pegawai-pegawai bangsa Indonesia di antaranya :

- 1) K.J. Rorimpandey.
- 2) W.J. Lantang.
- 3) A. Lolong.
- 4) Sapufette dan lain-lain.

Setelah diadakan penyempahan untuk setia kepada Nusa dan Bangsa Indonesia merekapun dibebaskan serta dipekerjakan kembali dalam jabatan mereka semula. Pemerinthan Nasional/ Komite 12 daerah Banggai diakui oleh pemerintah militer Jepang yang telah menduduki kota Manado. Shunanto Seirei sebagai komandan Angkatan Laut/Kaigun mengakuinya sama halnya dengan pengakuan mereka terhadap Pemerintahan Nasinal di Gorontalo di bawah pimpinan Nani Wartabone, Kusnodhanupoy dan kawan-kawan. Nanti pada tanggal 15 Mei 1942 tentara Jepang mendarat di Luwuk dipimpin oleh Komandan Miyamoto dan pada tanggal 17 Mei 1942 mereka mengambil alih Pemerintahan Nasional dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum dapat mempertahankan dirinya jika ada serangan dari luar nanti, dengan perjanjian bahwa apabila bangsa Indonesia telah sanggup berdiri sendiri barulah mereka diserahkan kembali kekuasaan itu.

Di Kabupaten Poso yaitu di kerajaan Tojo dengan ibu kotanya Ampana terjadi pula perebutan kekuasaan oleh Pemuda Merah Putih dari tangan penjajah Belanda.

Berbeda dengan di dua tempat yang di uraikan di atas maka di Ampana ini justeru raja setempat yaitu raja Tojo bernama Tanjumbulu menjadi pimpinan dari Gerakan Merah Putih ini. Menurut sejarahnya raja Tojo ini memang sejak awal datangnya pemerintahan kolonial Belanda, raja Tojo yang bernama Kolomboi sudah melawan sehingga beliau dibuang ke Sulawesi Selatan dan meninggal di sana.

Pada tahun 1928 putera Kolomboi yang bernama Tanjumbulu diangkat Belanda menjadi raja Tojo karena ternyata pengaruh kharisma raja pada rakyatnya tak dapat dimunkiri Belanda maka kharisma ini dimaksudkan untuk menjadi alat bagi keberhasilan penjajahannya. Namun sifat perlawanan yang diwarisi ayahnya tetap dimilikinya dan nanti mendapat peluang pelaksanaan pada akhir masa pemerintahan Belanda tahun 1942.

Pada bulan Desember 1941 Raja Tanjumbulu ini ke Malei

melalui Poso untuk mengadakan perundingan dengan pengikut-pengikut setianya untuk menyusun dan merencanakan suatu aksi menentang kekuasaan Belanda.

Di Malei ini raja Tanjumbulu berunding di rumah Masewa Daeng Paliwang dengan tiga orang tokoh masing-masing :

- 1) Masewa Daeng Paliwang jabatannya di samping sebagai penasihat pribadi raja juga menjadi guru silat yang terkenal.
- 2) Lasongkeng Daeng Pawelang, sebagai seorang guru kontau asal Palopo.
- 3) Abdul Latief Mangitung, seorang pemuda Parindra yang melarikan diri dari Sulawesi Selatan pada tahun 1939 karena menjadi buronan polisi Belanda.

Hasil perundingan adalah supaya rakyat setempat disiapkan sambil menunggu komando untuk bergerak.

Mendengar informasi bahwa setelah Manado jatuh ke tangan Jepang, tentara Belanda yang mundur dari Sulawesi Utara akan bertahan di Poso di bawah pimpinan Letnan I De Yong *Gezaghebber* terakhir di Kolonodale, dengan basis pertahanannya direncanakan Ulubongka maka rakyat setempat lalu beraksi dengan membunuh seorang pejabat pemerintah Belanda di Ulubongka.

Peristiwa ini menyebabkan raja Tojo Tanjumbulu melakukan tornei pemeriksaan ke Ulubongka, namun pada hakekatnya kesempatan ini digunakannya untuk melanjutkan perundingan pertama di Malei dengan memanggil tiga orang tokoh Malei untuk melakukan perundingan ke dua di Bongka.

Karena raja meninggalkan ibu kota kerajaannya maka yang ditunjuk menjadi pejabat raja adalah menantunya yang bernama Raja Gunu Datupamusu/Putera raja Dolo Datupamusu, yang pernah diasingkan ke Ternate oleh Belanda karena raja Dolo itu menjadi pelopor pengembangan SI di kerajaannya.

Pada saat raja Ranjumbulu berada di Ulubongka itulah berturut-turut datang ke Ampana utusan-utusan dari Gerakan Merah Putih Bunta terdiri dari pemuda-pemuda Muhammadiyah dan utusan Gerakan Merah Putih Gorontalo yang diterima oleh Raja Gunu Datupamusu.

Utusan dari Bunta dikirim oleh pimpinan gerakan di sana bernama Haji Sanusi, maksudnya mengajak rakyat Ampana umumnya, khususnya warga Muhammadiyah Ampana berontak pada Belanda dan meminta senjata-senjata yang ada di pusat kerajaan Ampana untuk memperkuat gerakan pemuda Bunta. Utusan

tersebut datang ke Ampana pada tanggal 18 Pebruari 1942. 1)

Namun permintaan senjata tersebut ditolak oleh Raja Gunu Datupamusu karena senjata itu diperlukan juga untuk mempertahankan diri apabila tentara Belanda datang menyerang Ampana dari Poso.

Utusan Pucuk Pimpinan Gerakan Merah Putih Gorontalo Nani Wartabone terdiri dari dua orang Dai Wartabone dan Ismail Kamba tiba di Ampana pada tanggal 19 Pebruari 1942, 2) dan pada jam 22.00 malam menemui wakil raja untuk menyampaikan pesan dan mandat dari Pimpinan Gerakan Merah Putih Gorontalo, supaya raja dan rakyat Ampana melakukan aksi merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda di Ampana.

Dengan datangnya utusan Gerakan Merah Putih Gorontalo ini maka wakil raja yang dijabat oleh Raja Gunu Datupamusu menyambut dengan baik dan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat pada tanggal 21 Pebruari 1942 3) bertempat di sekolah Muhammadiyah Uentanaga Ampana.

Pada tanggal 21 Pebruari 1942 itu pulalah dikeluarkan pernyataan bahwa seluruh rakyat Ampana menyatakan diri telah bebas dari kekuasaan penjajah Belanda. Dengan khidmat bendera Merah Putih dinaikkan, diiringi lagu Indonesia Raya dan sekaligus diperintahkan agar semua kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah dan perahu-perahu mengibarkan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga dibentuklah satu komite Pemberontak Ampana terdiri dari :

R.G. Datupamusu	sebagai Ketua I.
L. Laeso	sebagai Ketua II.
S. Pangemanan	sebagai Penulis I.
A.K. Lanuru	sebagai Penulis II.
L. Tanda	sebagai Bendahara I.
L. Magulili	sebagai Bendahara II.

Komite tersebut bertugas mengatur pemerintahan, memeriksa uang kas pemerintah dan mengatur barisan pertahanan. Dengan bertempat di kantor Swapraja Tojo Ampana, komite

-
- 1) Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.
 - 2) Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.
 - 3) Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.

mengadakan rapat untuk menentukan pimpinan pasukan guna menghadapi kemungkinann reaksi yang akan datang dari aparat pemerintah Belanda di Poso. Rapat tersebut menghasilkan keputusan :

Abdul Karim Lanuru sebagai Kepala Pasukan I.

Mohammad Muslaeni sebagai Kepala Pasukan II.

Sapala sebagai Kepala Pasukan Penyerbu ke Poso.

Togoa, Hasim A. Rivai, Hasan A. Rivai, Moh. Badudu dan Ong Sung Kiong sebagai Pembantu.

Setelah itu dikirimlah utusan ke Ulubongka untuk menjemput raja dan melaporkan segala kejadian dan perkembangan keadaan pada Raja Tanjumbulu. Utusan itu dipimpin oleh R.G. Datupamusu.

Bersamaan dengan berangkatnya utusan untuk menemui Raja di Ulubongka maka dikirim pula penyidik ke Poso untuk meneliti keadaan pertahanan dan situasi pemerintahan Belanda di sana sehubungan dengan rencana komite Pemberontak Ampana hendak menangkap orang-orang Belanda di Poso terdiri dari :

- 1) *Controleur* Poso.
- 2) *Aspirant Controleur*.
- 3) *Beheerder Copra Fonds* dan lain-lainnya.

Namun karena ternyata kekuatan persenjataan yang tak seimbang maka Kepala Pasukan A.K. Lanuru menyarankan pembatalan serangan ke Poso, hanya gerakan Ampana dan Bongka disatukan di bawah pimpinan R.G. Datupamusu untuk menjadi basis pertahanan di Bongka.

Dengan penyatuan pasukan di Bongka ini maka berhasil ditangkap kurir Belanda yang menuju ke Luwuk lewat Bongka dengan menaiki truk. Kurir tersebut diutus oleh Kapten Infantri Abink di Poso, membawa dokumen bagi pasukan Belanda di Luwuk berisi perintah untuk bersama-sama pasukan Belanda dari Poso menyerang para pemberontak rakyat Ampana dan sekitarnya. Kurir tersebut terdiri dari 4 (empat) orang, 3 orang Tionghoa dan seorang mandor jalan bernama Sampelan.

Karena keadaan semakin genting maka Abdul Latief Mangitung segera mengadakan kontak dengan Induk Pasukan di Malei melalui Masewa Daeng Paliweng untuk membentuk satu batalion pasukan garis depan kerajaan Tanjumbulu dengan susunan pimpinannya :

Masewa Daeng Paliweng : Penasihat.

Abdul Latief Mangitung : Komandan Pasukan
 Lasongkeng Daeng Pawelang : Kepala Bagian Penyerbu.
 Tosayang : Wk. Kepala Bagian Penyerbu.
 Abu Maloco : Keuangan/Perlengkapan.
 Lapasonrang : Wakil Perlengkapan.
 Laparimung : Kepala Persenjataan.
 Lanokeng : Penyelidik.
 Lapalepang : Penghubung.

Tanggal 22 Pebruari 1942 tiba di Tojo dari Poso satu motor laut bernama Togeang membawa 9 orang militer Belanda dikepalai oleh seorang sersan dari Manado, lengkap dengan persenjataannya dan yang menjadi penunjuk jalannya salah seorang anggota Gerakan Merah Putih yang berbalik mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya bernama Alkaf Muslaeni. Mendengar tibanya motor tersebut maka A. Badudu dikirim dari Bongka ke Tojo mencek kebenaran berita tersebut. Dalam penyelidikannya ini A. Badudu bertemu Alkaf Muslaeni yang masih menyangka kawan seperjuangan dan tanpa curiga karena ditanyai rahasia pertahanan Bongka oleh A. Muslaeni dijawab secara jujur oleh A. Badudu bahwa betul tenaga pasukan banyak tetapi persenjataannya hanyalah keris, tombak dan beberapa senapan berlaras ganda. Sementara itu untuk jangan dipergunakan tentara Belanda melewatinya, maka R.G. Datupamusu memerintahkan kepala distrik Uekuli agar rakyat setempat dikerahkan membongkar jembatan-jembatan besar dan kecil.

Tanggal 23 Pebruari 1942 rombongan Raja tiba di Bongka dari Ulubongka dan di depan pasukan yang sementara bersiap-siap raja Tanjumbulu berbicara agar rasa kesatuan yang dibina selama ini dipupuk terus dan bertahanlah jangan sampai tentara Belanda dapat melewati pertahanan ini untuk memasuki ibu kota kerajaan Ampana. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa semua pembentukan yang sudah direalisasikan oleh semua unsur kekuatan rakyat Tojo/Una-Una di Ampana dan di tempat-tempat lain untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda telah direstui oleh Beliau.

Di bawah pimpinan kontrolur Maslen dan kapten Abink pasukan Belanda bergerak dari Poso ke Ampana untuk mematahkan perlawanan pasukan Merah Putih Tojo di Ampana.

Sebagai hasil adu domba Belanda maka secara diam-diam sebagian pasukan kerajaan Tojo yang dipimpin oleh A.C. Kussoy

mulai memihak kepada Belanda termasuk pula beberapa orang tokoh putera daerah Tojo antara lain Raja Tua Muslaeni, A.K. Lasupu, Badaruddin, Alkaf Muslaeni dan lain-lain.

Sungai Bongka menjadi garis demarkasi antara pasukan Belanda dan pasukan Merah Putih Tojo.

Karena rahasia pertahanan Tojo telah diketahui Belanda melalui mata-matanya Alkaf Muslaeni maka Belanda dengan persenjataan yang kuat menyerang dan setelah bertempur di sungai Bongka mereka dapat menyeberang memasuki daerah pasukan Merah Putih Tojo.

Dalam pertempuran ini 30 orang anggota Pasukan Merah Putih ditawan Belanda termasuk di antaranya kepala polisi kerajaan Tojo A.K. Lanuru. Selanjutnya kapten Abink memasuki kampung Maburoto dan bergerak ke arah ibu kota kerajaan Tojo, Ampana.

Tanggal 29 Pebruari 1942 jam 23.00 malam pasukan Belanda tiba di Ampana dan langsung menyerang Markas Induk Pasukan Merah Putih di kompleks kantor kerajaan Tojo dan berusaha menurunkan bendera merah putih yang masih berkibar di tiangnya. Dua orang pasukan Merah Putih yang mempertahankan bendera itu akhirnya gugur di bawah tiang bendera kena berondongan senapan pasukan Belanda masing-masing bernama Nggai alias Papa Judaedah dan Salibu alias Papa Dero. Tapi sebelum gugur keduanya sempat melawan dan melukai 2 (dua) orang pasukan Belanda. Pasukan Merah Putih lainnya di dalam kegelapan malam melakukan gerakan mundur karena tidak berimbangny kekuatan persenjataan sehingga ketika pasukan Belanda memasuki kota, Markas Gerakan Merah Putih telah kosong.

Dengan dikawal oleh Mohammad Amin Dahlan, Abdul Latief Mangitung, Dilla, Lacing dan pasukan-pasukan lainnya, Raja Tojo Tanjumbulu melakukan pengenduran ke desa Petingko di daerah perkebunan rakyat Ampana di kaki gunung.

Kemudian kontroleur Musien dan kapten Abink mengirim A.C. Kussoy sebagai utusan kepada raja Tanjumbulu membujuknya supaya kembali ke Ampana untuk berunding, tapi utusan itu ditolak malah diusir oleh pimpinan pengawal Moh. Amin Dahlan.

Berhubung situasi makin genting maka raja dengan rombongannya melanjutkan perjalanannya ke tempat lain; mula-mula ke pegunungan Tanjung Api di utara kota Ampana, lalu ke P.P. Togeana dan seterusnya ke Gorontalo.

Tanggal 1 Maret 1942 jam 19.00 malam datang Sekretaris kerajaan S. Pangemanan menghadap raja Tanjumbulu di tempat penyingkiran melaporkan bahwa sebagian besar pasukan Merah Putih telah ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Poso, 5 (lima) di antaranya ditembak di atas motor dan mayatnya dibuang ke tengah laut. Ke lima korban itu bernama : Togoa, Hasyim Rivai, Madi Muhammad, Abdul Samad dan Angki Maloto.

Pada tanggal 2 Maret 1942 Raja Tanjumbulu sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Perang kerajaan Tojo mengeluarkan instruksi dan penetapan sementara sebagai berikut :

1. R.G. Datupamusu diangkat sebagai pejabat raja sementara kerajaan Tojo yang ketika itu masih sementara dalam perjalanan dinas ke daerah distrik Tojo/Bongka.
2. Mohammad Amin Dahlan diangkat menjadi komandan pasukan Angkatan Laut merangkap pengawal bagian tempur dan menampingi raja Tanjumbulu.
3. Haji Saini wakil komandan Pasukan Angkatan Laut merangkap pengawal permaisuri raja dan warga istana.
4. Abdul Latief Mangitung diangkat sebagai wakil pimpinan Angkatan Bersenjata kerajaan Tojo/Una-Una.

Selesai mengeluarkan penetapan tersebut di atas maka raja Tanjumbulu dengan dikawal oleh Mohammad Amin Dahlan dalam satu perahu serta perahu lainnya ditumpangi permaisuri dan keluarga istana dikawal Haji Saini, berlayar dari Tanjung Api ke P.P. Togeana (ke kampung Klingkinari).

Pada waktu yang bersamaan dengan keberangkatan raja dan rombongan ke P.P. Togeana tiba pulalah menantunya R.G. Datupamusu di ibu kota kerajaan Ampana dari menjalankan tugas menghubungi pejuang-pejuang lainnya di wilayah kerajaan Tojo.

Mendengar mertuanya menyingkir ke P.P. Togeana, R.G. Datupamusu menyusul ke sana dan seterusnya bersama-sama raja berlayar ke Gorontalo untuk bertemu pimpinan Gerakan Merah Putih Nani Wartabone dan Kusnodhanupoyo untuk melaporkan keadaan Gerakan Merah Putih Tojo — Ampana yang mendapat tekanan pasukan Belanda yang masih cukup kuat dari Poso.

Raja Tanjumbulu berada di Gorontalo sampai pasukan Jepang mendarat di Poso pada bulan Juni 1942 barulah beliau kembali ke Ampana memegang tampuk pemerintahan.

Sementara itu Abdul Latief Mangitung secara diam-diam bersama 4 (empat) orang anggota pasukannya kembali ke markas-

nya di Pegunungan Tanjung Api langsung ke Uekuli untuk mengadakan sabotase berupa pembakaran-pembakaran. Setelah itu ia menuju ke Kolonodale melalui kampung Buyungtaripa dan Tambayoli. Di tempat itu Abdul Latief Mangitung mengadakan kontak dengan Hamide Pasise untuk menyusun kekuatan melawan Belanda di daerah Kolonodale sampai kampung Salabangka. Disusunlah personalia penggerak pemberontakan di daerah Salabangka sebagai berikut :

- 1) Abdullah, sebagai Ketua I.
- 2) Hamide Pasise, sebagai wakil ketua merangkap kepala pasukan
- 3) Aburaera, Sekretaris.
- 4) Haji Abdul Rahim, Pemegang Keuangan.
- 5) *Thio Ciang Pho*, wakil Pemegang Keuangan.
- 6) *Hing*, Penghubung.
- 7) Rahim, Kepala pasukan wilayah Bungku.
- 8) S.M. Ali Bafaddai, Penyelidik.
- 9) Haji Lakanene, Kepala Perlengkapan.
- 10) Kanjar, Raju, Wely, sebagai Pembantu.

Setelah selesai membentuk pengurus pemberontakan di Wilayah Bungku — Salabangka, Abdul Latief Mangitung kembali ke Markasnya di Malei distrik Tojo.

Selama raja Tanjumbulu berada di Gorontalo maka R.G. Datu-pamusu tetap mewakili raja menjalankan pemerintahan sambil mengkoordinir pergerakan-pergerakan di daerah kerajaan Tojo-Ampana dan kepulauan Togeana, bekerja sama dengan Mohammad Amin Dahlan dan Haji Sunusi dengan barisan Armada Lautnya yang terdiri dari armada perahu warga suku Bajo dalam wilayah kerajaan Tojo.

2. Masa pemerintahan pendudukan Jepang

Setelah pembomban atas Pearl Harbour oleh Jepang, maka pada tanggal 9 Desember 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda *Jonkheer Tjarda van Starckenborch Stachouwer* menyatakan Hindia Belanda dalam keadaan *SOB* dan turut berperang dalam barisan Sekutu sehingga rakyat dan wilayah Indonesia dilibatkan dalam Perang Dunia ke II dan sewaktu-waktu dapat mengalami serangan penyerbuan dari bala tentara Jepang.

Menurut informasi dari V.F. Ernst (Pensiunan sersan KNIL) pada waktu itu diadakan mobilisasi umum terhadap para pensiunan KNIL dan kepada para kepala pejabat sipil Belanda diberi

kesempatan untuk menyingkir ke Australia. 4)

Berbarengan dengan pemakluman perang itu, maka tokoh-tokoh nasional yang dianggap berbahaya di daerah Sulawesi Utara (Manado) ditangkap oleh pemerintah Belanda, maksudnya untuk melarikan mereka ke Gorontalo dan seterusnya ke Poso, yaitu tempat bertahan dan basis gerilya tentara Belanda melawan kekuasaan Jepang nanti.

G.E. Dauhan, O.H. Pantouw, M.B. Tumbol, J.U. Mangowal dan lain-lain diangkut menuju selatan, sedang para pegawai dan pemuda disiapkan Belanda untuk turut memanggul senjata menghadapi dan menangkis serangan penyerbuan Jepang di tanah air ini. 5)

Tanggal 11 Januari 1942, Bala Tentara Jepang melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia, dan Manado jatuh ke tangan Jepang. Dengan jatuhnya Manado ke tangan Jepang maka untuk Sulawesi Tengah ada dua tempat yang menjadi pusat penarikan mundur tentara KNIL yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah bagian Barat, pusat pertahanan tentara Belanda adalah kota Palu di bawah pimpinan Letnan I Harbert (bekas kontroleur dan HPB Toli-Toli) dan Letnan I Thuis (seorang dokter tentara) dengan pasukan berkekuatan satu kompi. Untuk Sulawesi Tengah bagian Timur dipusatkan di Poso dan kemudian setelah Jepang datang, pasukan Belanda lalu bertahan di Kolonodale (Poso) dipimpin oleh Letnan I De Jong, *Gezaghebber Kolonodale* dan Letnan II Van Dalen.

Pada bulan April 1942, sepasukan Angkatan Laut Jepang tiba di Donggala dengan kapal penjelajah dan beberapa kapal pemburu torpedo. Sebelum pendaratan itu pelabuhan Donggala dihujani bom sehingga bangunan sepanjang pantainya runtuh rata dengan tanah. Pendaratan pertama Jepang di Donggala ini terus mencari pejabat-pejabat pemerintah Belanda tetapi nyatanya Asisten Residen Donggala De La Vuento dan *Gezaghebber* Palu Feliks, bersama keluarganya telah menghilang tak diketahui ke mana sehingga hanya raja-raja setempat saja yang dijumpai oleh pasukan-pasukan Jepang tersebut.

4) Wawancara dengan V.F. Ernst di Palu, tanggal 11 Januari 1979.

5) B. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak, Peristiwa Patriotik 14 Februari 1946*, Badan Penerbit Lada, Jakarta, Cetakan I, 17 Agustus 1977, hal 17.

Menjelang tibanya tentara Jepang di Sulawesi Tengah, maka Panglima tentara Belanda untuk Indonesia bagian Timur yaitu Kolonel Schotborgh mengeluarkan instruksi supaya semua kepala pemerintahan sipil dalam wilayah residensi Manado berkumpul di Manado atas inisiatif sendiri bersama keluarganya masing-masing datang menghadap Pemerintah Militer Jepang. ⁶⁾ Selanjutnya menurut W.S. Ruata; pada waktu itu yang menjadi Asisten Residen Donggala adalah *de La Vuento*, *kontroleur* Donggala adalah Dr. Bruckle, *kontroleur* Parigi adalah L. Barrau dan *Gezaghebber* Palu adalah Feliks dan Asisten Residen Poso adalah Rijdsijk.

Hanya di Palu Jepang menemukan orang Belanda karena memang tentara KNIL dari Sulawesi Tengah bagian Barat dipusatkan di situ. Pasukan *Kaigun* (Angkatan Laut) Jepang yang mendarat di Palu terdiri dari ± 30 orang dipimpin oleh Letnan Arigoce. Timbang terima penyerahan secara damai karena menurut pensiunan sersan KNIL V.F. Ernst pada waktu itu ada instruksi dari atasan tentara Belanda di Manado supaya tidak usah melakukan perlawanan apabila tentara Jepang datang. ⁷⁾

Setelah serah terima kekuasaan itu maka para bekas KNIL yang ada, sebagian dijadikan *Jumpo* (polisi Jepang), sebagian diizinkan hidup secara sipil sebagai tahanan kota dan ada pula yang bertani. Hanya orang-orang Belanda/Indo Belanda yang diangkut oleh Jepang ke Manado.

Selanjutnya W.S. Ruata, tidak lama sesudah pendaratan pasukan *Kaigun* Jepang maka datanglah *Kaisatsuco* (kepala polisi) Jepang bernama Itoya ke Donggala dari Makassar (Ujung Pandang), yang bertindak mewakili pemerintah Jepang menyerahkan urusan pemerintahan pada raja-raja setempat. Situasi pemerintahan demikian berlangsung sampai bulan Juni 1942. Setelah itu barulah petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang datang dari Manado. Mulailah pengisian jabatan kepala pemerintahan yang ditinggalkan Belanda di mana jabatan Asisten Residen diganti oleh *Ken Kanrikan*, jabatan *kontroleur* dan *gezaghebber* diganti dengan *Bunken Kanrikan*, kesemua jabatan tadi dipegang oleh orang Jepang dan raja-raja setempat tetap diakui tak diadakan perubahan

6) Wawancara dengan Bapak W.S. Ruata di Palu tanggal 14 September 1979

7) Wawancara dengan V.F. Ernst di Palu, tanggal 11 Januari 1979.

hanya gelarnya yang di Jepangkan menjadi *Suco*. Pada waktu itu terhadap petugas aparat pemerintahan yang orang Indonesia tak diapa-apakan, tetap menduduki jabatannya, dan melaksanakan tugasnya seperti biasa.

Di Toli-Toli Jepang masuk dipimpin oleh Miyamoto, mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari aparat pemerintahan Belanda pada tanggal 30 Mei 1942. Yang memegang kekuasaan Pemerintahan di Toli-Toli pada waktu itu adalah R.M. Poesadan dan *Bestuur Assistent* merangkap wakil raja adalah Mattata Daeng Masese karena kontroleur merangkap jabatan HPB terakhir Letnan I Harbert telah ke Palu memimpin pasukan Belanda di Palu.⁸⁾

Pada waktu Jepang mulai datang maka yang menjadi raja di Donggala adalah Rohana Lamarauna, di Palu adalah Djanggola, Raja (Mangau) Sigi-Dolo di Biromaru adalah Lamasaera, Raja Kulawi adalah Djiloi, Magau Parigi adalah Tagunu, Magau Tawaeli adalah Lamakampali, raja Moutong adalah Kuti Tombolotutu, pejabat raja Toli-Toli adalah Matta Daeng Masese, raja Poso adalah Kabo, raja Mori adalah Owolu Marundu, raja Bungku Abdul Rabbi, raja Una-Una Lapalege Laborahima, raja Bangga Sukuran Amiruddin Amir dan raja Buol Haji Ahmad Turungku.

Di Sulawesi Tengah hanya di Poso lah yang merupakan tempat pertahanan Belanda yang terkuat karena pasukan tentara Belanda yang mundur dari Menado dan Gorontalo berkumpul di situ. Pasukan tentara Belanda di Poso dipimpin oleh Letnan I De Jong dan Letnan II Van Dalen. Semula mereka merencanakan akan mundur sampai ke Kendari tetapi karena Kendari pun telah diduduki Jepang (24 Januari 1942) akibatnya mereka bertahan di Kolonodale (Poso). Tentaranya kebanyakan orang-orang Mina-hasa dan dibantu oleh sebagian rakyat Mori yang mengikuti ajakan milisi dari De Jong dan Van Dalen. Karena terkumpulnya pasukan tentara Belanda di Poso ini maka oleh komandannya Letnan I De Jog memutuskan untuk melawan dan bertahan apabila tentara Jepang datang dan mendarat di tempat itu.

Setelah kota Manado jatuh ke tangan angkatan laut Jepang pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Belanda yang ada di Poso belum mengetahui hal itu. Nanti setelah datangnya Ratumbanua ke daerah ini diutus oleh pemerintah Jepang di Menado untuk menyelidiki keadaan kekuatan pertahanan tentara Belanda di Poso, barulah orang-orang di tempat ini mengetahuinya. Ratumbanua tiba di Poso pada tanggal 2 April 1942 dengan menumpang

kapal S.S. *Urania*. Bersama-sama dengan Ratumbanua dengan kapal S.S. *Urania* ini menumpang pula W.L. Talasa, Sidik Utina, Ahmad Papeo dan Abdul Rahman Lanasir dari Luwuk melalui Bunta. Ratumbanua turun dari kapal langsung bertemu dengan *Van Dalen* (pimpinan tentara KNIL di kota Poso) dan W.S. Warow yang menjadi wakil pemerintah Poso waktu itu.

Ratumbanua atas pesanan pemerintah Jepang dari Menado memerintahkan *Van Dalen* dan anak buahnya supaya menyerah saja dan semua perlengkapan/senjata yang ada diserahkan dan disimpan di gudang pemerintah negeri Poso (dekat kantor kontrolur).

Pada tanggal 3 April 1942 sementara Ratumbanua dan *Van Dalen* berunding mengenai penyerahan dan perlucutan senjata dari anak buahnya, sersan De Bruin mengambil kesempatan menembak S.S. *Urania* dari darat, atas perintah *Van Dalen*.

S.S. *Urania* yang ditembak tetapi tidak mengalami kerusakan itu memutar haluan kembali lagi ke Luwuk.

Sebagai hasil perundingan terakhir antara Ratumbanua dan *Van Dalen* waktu itu maka *Van Dalen* bersama anak buahnya menyerah dan semua senjata yang dilucuti diperpak dan disimpan di dalam gudang bekas kantor kontrolur dijaga oleh seorang opas bernama Bite.

Mendengar *Van Dalen* dan anak buahnya telah menyerah atas perintah Ratumbanua ini, malam tanggal 3 April 1942 itu Letnan I De Jong masuk kota Poso dari Tentena dengan membawa tentaranya ± 200 orang langsung menemui *Van Dalen* dan Ratumbanua. *Van Dalen* dan Ratumbanua dinarahi oleh De Jong dibentak-bentak. Sesudah itu De Jong menuju gudang tempat penyimpanan senjata. Opas Bite yang melihat De Jong datang dengan wajah marah menyebabkan Bite lari karena takut. De Jong menyuruhnya berhenti, jangan lari, tetapi opas Bite tetap lari lalu iapun ditembak dari arah belakang tepat kena kepalanya dan meninggal seketika.

Semua senjata yang telah disimpan di gudang tadi oleh De Jong dan *Van Dalen* diambil kembali di bawa masuk hutan. Sekitar bulan April 1942 itu tentara Belanda masih banyak berkeliaran di sekitar Poso yaitu satu peleton dari Ampana dipimpin oleh kapten Abink, dua peleton di kota Poso dipimpin oleh Letnan I De Jong dan Letnan II *Van Dalen*. Dengan kekuatan tentara tiga peleton ditambah oleh sebagian anak daerah yang berhasil dibujuk ikut milisi di Kolonodale, De Yong dan *Van*

Dalen telah bertekad untuk melawan mati-matian dengan cara bergerilya di hutan-hutan bila tentara Jepang masuk daerah Poso. Isteri para tentara yang masuk hutan itu kebanyakan berasal dari Manado, mereka di bawa pulang ke Manado dengan kapal KPM diantar oleh seorang Jepang bernama Kapai. Kapai ini adalah seorang Jepang penangkap ikan di Poso yang memang telah lama tinggal di tempat itu sebelum Jepang datang. Orang Jepang lainnya yang tinggal di Poso sebelum masa pendudukan Jepang adalah S. Narumi yang bekerja sebagai pengolah kayu dengan membuat motor-motor kayu digunakan sebagai alat pengangkut antara Poso – Parigi. S. Narumi ini kawin dengan seroang gadis Cina di Poso. Ketika pecah perang Pasifik ia diinternir oleh Belanda. Tetapi kemudian pada zaman Jepang ia muncul di Makassar dan menduduki satu jabatan tinggi pada angkatan laut Jepang. Ia meninggal di Makassar pada bulan Mei 1945, mayatnya dibakar, dan sisa-sisa tulangnya dikuburkan di Tentena di tempat kuburan umum. 9)

Selain mereka yang disebutkan di atas ini masih banyak lagi orang-orang Jepang yang ada di Sulawesi Tengah sebelum perang Pasifik meletus yaitu :

1. Kaneko dan Kogusi bekerja pada tambang mika di pulau Peling.
2. Hirano di Batui, Urano di Balantak dan Karasawa di Bunta menyamar sebagai pedagang kopra.
3. Huisaki sebagai pedagang kopra di pulau Peling. 10)
4. Subaki menyamar sebagai pedagang di Taripa. 11)

Setelah gagalnya misi Ratumbanua maka pada bulan Mei 1942 datanglah ke Poso sepasukan tentara Jepang dari *Kaigun* dipimpin oleh komandannya bernama Nakagawa yang juru bahasanya bernama Amo.

Maksud kedatangan mereka untuk mengadakan timbang terima penyerahan kekuasaan Belanda di Poso atas perintah dari pimpinan tertinggi pemerintah Jepang di Manado. Nakagawa hanya me-

9) Jan Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1977, hal. 433.

10) Hasil wawancara dengan Bp. Haji Sulaeman Amir di Luwuk tanggal 22 September 1978.

11) Hasil wawancara dengan Bp. W.L. Talasa di Poso tanggal 5 Oktober 1978.

nemui S. Warow selaku pejabat pemerintah setempat karena Asisten Residen Poso Rijdsdijk telah menghilang meninggalkan Poso. Sedangkan pimpinan tentara Belanda di Poso Letnan II Van Dalen telah mundur ke daerah pedalaman bergabung dengan pasukan Letnan I De Yong.

Pada bulan Juni 1942 datang lagi pasukan tentara Jepang dari Manado dipimpin oleh kapten Inobe dengan juru bahasa bernama Yanai. Pasukannya terdiri dari \pm 100 orang. Mereka datang dengan memakai kapal motor Bitung II dengan persenjataan lengkap disertai seorang dokter tentaranya. Karena perlawanan secara gerilya dari pasukan Van Dalen dan De Yong maka datanglah lagi 8 kompi tentara dari Manado dan Makassar.

Setelah datangnya pasukan bantuan ini maka Jepang mengadakan serangan pertama ke kubu pertahanan Belanda di Kolonodale. Sebagian pasukan itu terdiri dari Marsose yang pernah bertugas di Aceh. Pasukan tentara Jepang menggunakan 16 truk berangkat dari Poso menuju Kolonodale dengan penunjuk jalan Yan Tumimomor dan juru bahasa Yanai.

Tanggal 21 Juni 1942 mereka tiba di daerah Mori Atas (Tomata). Pada km 93 dari Poso iring-iringan tersebut terhenti karena jalan dirusakkan oleh anak buah Van Dalen. Seorang mandor jalan bernama Rabe Entoh diperintahkan Van Dalen untuk merusak jalan bersama anak buah Van Dalen dengan menggunakan dinamit dan pacul hingga kendaraan bermotor sukar melaluinya. Dengan berjalan kaki pasukan Jepang menuju pusat pertahanan Van Dalen di desa Topaku.

Besoknya tanggal 22 Juni 1942 Rabe Entoh diperintahkan oleh Van Dalen untuk mengantarkan surat ke Gontara dengan naik kuda guna meminta bantuan tenaga. Di tengah jalan Rabe Entoh ini ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke km 93 untuk ditanyai tentang tempat dan berapa kekuatan dari pasukan Van Dalen. Sebabnya Rabe Entoh ditangkap Jepang karena Yan Tumimomor mengenalnya sebagai mandor jalan dan hal ini diberitahukannya kepada Jepang. Rabe Entoh lalu membuka rahasia pertahanan Van Dalen bahwa mereka bertahan di Topaku dengan kekuatan pasukan 6 orang tentara resmi termasuk Van Dalen sendiri. Selibuhnya adalah milisi dan pembawa perlengkapan senjata dan makanan. Jumlahnya tak diketahui secara pasti. Mendengar informasi itu Jepang lalu mengatur formasi penyerangan ke Topaku. Tapi sebelum mereka tiba di Topaku telah diketahui

oleh Van Dalen dari mata-matanya yang bernama Sindara Lembonunu dan Penggade Dodoki sehingga mereka telah ditunggu dengan persiapan. Ketika mendekati Topaku hari sudah petang dan Maeda selaku pimpinan penyerbu Jepang naik ke tempat ketinggian untuk meneropong kedudukan Van Dalen. Pada saat itulah seorang penembak jitu Van Dalen menembaknya tepat di kepala sehingga Maeda mati seketika. Melihat pimpinannya jatuh maka pasukan Jepang terus menyerbu desa Topaku sambil menembak membabi buta sehingga terjadilah tembak menembak pada sore itu yang mengakibatkan dua orang tentara Belanda tewas bersama kedua orang mata-matanya tadi. Di pihak Jepang di samping tewasnya Maeda juga seroang anggota pasukannya luka berat. Desa Topaku diduduki pasukan Jepang dan Van Dalen bersama sisa-sisa pasukannya bergerak mundur ke bagian utara desa Topaku menyeberangi sungai Laa dan memotong gunung Morompa dan gunung Kayaka dengan penunjuk jalannya bernama L. Reo.

Mayat Maeda dibakar di Topaku pada malam harinya, kemudian Jepang maju ke arah Tomata. Dalam usaha Jepang mencari Van Dalen bersama anak buahnya, di Tomata seorang anak kecil meninggal terkena peluru kesasar. Pada tanggal 23 Juni 1942 pasukan Jepang melanjutkan pencaharian terhadap pasukan-pasukan Belanda dan menuju kota Kolonodale tempat kedudukan De Yong bersama anak buahnya yang berkekuatan ± 80 orang. Dalam perjalanan ini tentara Jepang yang luka dalam pertempuran di Topaku meninggal dunia sehingga mereka mengadakan lagi pembakaran mayat di Ensa.

Pada tanggal 26 Juni 1942 barulah pasukan Jepang pada pertama kalinya tiba di kota Kolondale, tetapi De Yong bersama anak buahnya telah mundur masuk hutan. Sebelum meninggalkan kota Kolonodale mereka masih sempat menembak seorang *Sutaico* Jepang yang meneropong kota dari laut di atas motor boat di Tanjung Hol Korololaki. Karena tewasnya *Sutaico* ini pasukan Jepang mengadakan lagi pembakaran mayat di kota Kolonodale.

Tanggal 27 Juni 1942 seluruh pasukan tentara Jepang yang dari Poso dengan 16 buah truk memasuki kota Kolonodale. Mereka langsung menduduki bekas tangsi militer Belanda di samping menempati beberapa buah rumah rakyat.

Pasukan Jepang lalu membagi diri, sebagian tetap di kota menjaga

keamanan sebagiannya lagi ke luar mencari pasukan Belanda yang melakukan gerilya di hutan-hutan.

Akhirnya pasukan Jepang bertempur dengan pasukan De Yong di Uabana. Karena gencarnya serangan Jepang maka De Yong terdesak ke daerah Mantandau kemudian naik ke daerah Mori Atas di Koromoare. Karena terdesak terus maka De Yong melakukan pengunduran dari hutan ke hutan akhirnya bertemu dengan pasukan Van Dalen di Korondoda (Lembosalenda). Karena bergabungnya pasukan Van Dalen dan De Yong di Lembosalenda ini maka terjadilah pertempuran sengit dengan pasukan Jepang. Pada pertempuran ini 7 (tujuh) orang perwira Jepang tewas bersama ratusan prajuritnya. Tempat itu merupakan daerah yang paling banyak memakan korban pasukan tentara Jepang sehingga mereka melakukan pembakaran mayat secara besar-besaran.

Untuk memperingati peristiwa ini maka di Korondoda ini dibuat 7 buah tugu peringatan untuk 7 perwira Jepang yang tewas. Selama pemerintahan Jepang (1942 – 1945) setiap orang yang melalui tempat itu diharuskan selalu memberi hormat kepada 7 tugu tersebut. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama *Sekerei*. Apabila ada yang tidak memberi hormat maka dia akan dipanggil dan disiksa dipukuli sampai setengah mati oleh Jepang. Setiap hari tempat itu dijaga Seinendan yang bertugas mengawasi apakah orang yang lewat memberi hormat atau tidak pada ke tujuh tugu tersebut.

Setelah pertempuran Korondoda (Lembosalenda) tersebut pasukan De Yong dan Van Dalen menjadi kocar kacir dan bercerai berai. Pasukannyapun banyak gugur dan bahan makanan serta amunisinya pun makin habis. Bantuan makanan dan senjata yang diberikan oleh tentara Sekutu melalui udara akhirnya jatuh ke tangan Jepang yang membentangkan bendera merah putih biru di tanah sebagai muslihat. Bala bantuan Sekutu itu dijatuhkan di dekat desa Koromatantu. Sebelum bantuan yang dijatuhkan dari udara datang, maka Sekutu pernah pula mengirim bantuan melalui laut dari Australia dengan kapal *SANOVA*. Tapi kapal itu hanya berlabuh di luar pelabuhan Kolonodale. Dan karena kaptennya lari maka akhirnya kapal itupun diambil dan dikemudikan oleh Jepang.

Akhirnya pada bulan Agustus 1942 Van Dalen tertangkap di Korondoda dan De Yong tertangkap di Era. Van Dalen ditangkap bersama kepala kampung Tomata bernama Lonsi serta beberapa

orang dari Bungku dan Salabangka. Di antara mereka yang ditangkap Jepang termasuk pula tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih di Bungku dan Salabangka, Haji Hasan dan kawan-kawannya. Pada bulan September 1942 di depan umum yang sengaja dipanggil Jepang untuk menyaksikan, diadakanlah pemancung 21 orang tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih dicampur dengan bekas orang-orangnya Van Dalen dan De Yong. Van Dalen dan De Yong dibawa ke Poso oleh Jepang kemudian ke Manado, di mana mereka berdua dicungkil matanya sebelum dipancung pada tanggal 28 Agustus 1942 (Informasi G. Beba dari Poso). Hanya seorang tetara Belanda yang bernama *Klink Hammer* yang lepas dari tangkapan Jepang karena disembunyikan oleh rakyat setempat di sebuah bukit kecil Majalede di daerah padang luas bernama Pesuaka sampai saatnya Jepang menyerah kepada Sekutu. 12)

Dengan didudukinya daerah yang pernah dijadikan sebagai basis gerilya oleh Belanda maka seluruh Sulawesi Tengah dikuasai oleh Jepang.

Dengan datangnya pemerintahan Jepang maka praktis di Daerah Sulawesi Tengah berlaku administrasi pemerintahan bala tentara Jepang. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942 yang berisi ketentuan kenegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan militer dinyatakan tetap berlaku. Maka susunan pemerintahan di Sulawesi Tengah tetap saja seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda hanya atasannya berganti dengan orang Jepang dan istilah-istilah kepangkatan pun di Jepangkan seperti raja menjadi *Suco*, kepala distrik dan kepala kampung menjadi *Gunco* dan *Sonco*.

Karena Sulawesi Tengah pada masa pemerintahan Belanda merupakan wilayah dari Residensi Manado maka raja-raja di Sulawesi Tengah pun dibeslitkan oleh kepala pemerintahan Jepang di Manado, dengan beslit yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jepang. Di atas raja (*Suco*) terdapat pangkat *Bunken Kanrikan* dan di atas *Bunken Kanrikan* adalah *Ken Kanrikan*.

Donggala merupakan kedudukan *Ken Kanrikan* yang bernama Yoshida *membawahi tiga tempat kedudukan Bunken Kanrikan* yaitu Donggala, Palu dan Parigi. *Bunken Kanrikan* Donggala ber-

12) Hasil wawancara dengan Bp. Rabe Entoh di kampung Kolaka, Kecamatan Mori Atas tanggal, 15 Oktober 1979.

nama Ikari, membawahi dua daerah kerajaan yaitu Banawa dan Tawaeli. *Bunken Kanrikan* Palu yang I Sugimura, kemudian Obana San membawahi tiga daerah kerajaan yaitu kerajaan Palu, Sigi-Dolo dan Kulawi. *Bunken Kanrikan* yang pernah bertugas di Parigi berturut-turut adalah Takayama, Takaici dan Teknodo, membawahi dua daerah kerajaan masing-masing Parigi dan Moutong.

Di samping itu Poso juga merupakan tempat kedudukan *Ken Kanrikan* dan Ken Kanrikannya sampai kapitulasi Jepang adalah Nakamura.¹³⁾ *Bunken Kanrikan* di Kolonodale adalah Takaici kemudian digantikan oleh Asahi sampai masa kapitulasi.¹⁴⁾ Peranan raja pada zaman Jepang pun sama dengan pada masa pemerintahan Belanda. Para raja dijadikan alat untuk mengarahkan rakyatnya bekerja bagi kepentingan penyediaan keperluan perbekalan perang Jepang. Dan yang menjadi kepala urusan pemerintahan dan justisi di Manado bernama Mizisawa.

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Pada tahun 1942 itu pendidikan di daerah Sulawesi Tengah berjalan seperti biasa. Walaupun pemerintah Belanda mengumumkan keadaan SOB tapi masyarakat pada umumnya tenang-tenang saja menjalankan tugas sehari-harinya. Yang gelisah hanyalah orang-orang Belanda/tokoh pemerintahan dan militer.

Dalam bidang pendidikan kelihatan berjalan sebagai biasa. Sampai datangnya pendudukan Jepang pun kegiatan di bidang pendidikan tetap berlangsung seperti biasa. Hanya sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda dan pimpinannya orang Belanda yang ditutup seperti HIS dan Sekolah Pendidikan Guru di Tentena milik Zending.

Selama masa pendudukan Jepang, nama sekolah pun diroboh menjadi nama Jepang seperti umpamanya: Sekolah berkelas 3 disebut *Futsu Kogakko*, Sekolah berkelas 5 yang dijadikan Se-

13) Wawancara dengan Bp. Abdul Latief Mangitung di kampung Maengko, Kecamatan Poso Kota, tanggal 17 Oktober 1979.

14) Wawancara dengan Bp. Rabe Entoh di kampung Kolaka, Kecamatan Mori Atas, tanggal 15 Oktober 1979.

kolah yang berkelas 6 disebut *Jokyo Kogakko* dan Sekolah Guru 2 tahun disebut *Kyoin Roseinso*.

Sekolah-sekolah tersebut hanya berjalan lancar sampai akhir tahun 1943. Setelah itu dengan datangnya serangan-serangan udara Sekutu yang bertubi-tubi maka sekolah-sekolah pun sudah tidak teratur/lancar pelaksanaannya sampai Jepang menyerah kepada Sekutu.¹⁵⁾

Mata pelajaran di sekolah-sekolah umumnya yang dipentingkan hanyalah *taiso* (senam Jepang), menyanyi, pelajaran bahasa dan tulisan huruf Jepang. Murid-murid bersama guru-gurunya pun dikerahkan untuk berkebun. Pelajaran untuk membina intelektual tidak dipentingkan. Hanya diusahakan men Jepangkan murid-murid, menanamkan sikap mengagung-agungkan Jepang dengan kaisarnya. Setiap hari diadakan penghormatan pada bendera dan kasira Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan lagu-lagu mars baik berbahasa Jepang maupun berbahasa Indonesia yang khusus dikarang untuk memuja dan membanggakan kekuatan militer Jepang. Dalam bidang pendidikan berlaku proses Jepangnisasi.

Menurut W.S. Ruata, selama masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah hanya diarahkan pada pembinaan fisik dan menanamkan semangat Jepang bukan pembinaan intelektual. Masa itu pun membuat kesadaran rasa hormat anak-anak pada orang tua menjadi berkurang. Karena kegiatan-kegiatan berkebun, bernyanyi dan *taiso* serta baris berbaris maka kelihatannya sekolah selalu hidup, penuh semangat. Hal ini berlangsung sampai mulai datangnya serangan pemboman Sekutu pada akhir pendudukan Jepang.¹⁶⁾

Semua sekolah agama ditutup. Yang dibenarkan tetap berjalan hanyalah sekolah-sekolah yang bersifat umum. Jepang sangat menguatirkan kalau melalui pendidikan agama dilancarkan propaganda anti Jepang. Di Palu, di mana terdapat pusat dari pendidikan sekolah agama *AL-CHAIRAT*, gedung sekolahnya ditutup sejak awal pendudukan Jepang dan pimpinan sekolah bersama guru-guru dan murid-muridnya menyingkir ke luar kota Palu ke Desa Pewunu – Kaleke.

15) Wawancara dengan Bp. B. Lumentut di kampung Lawangga, Kecamatan Poso Kota, tanggal 7 Oktober 1979.

16) Wawancara dengan Bp. W.S. Ruata di Palu, tanggal 14 September 1979.

Di Pewunu ini mesjid dan rumah Yoto Daeng Pawindu D.S. seorang tokoh pergerakan nasional dari PNI menjadi sekolah darurat bagi murid-murid Al-Chairat yang menyingkir dari Palu. Ada kira-kira 70 orang murid dan keluarga Ustaz Tua (Haji Said Idrus Bin Salim Al Djufri, pimpinan sekolah) yang menyingkir selama pendudukan Jepang dan ditampung oleh keluarga Haji Yoto Daeng Pawindu D.S. Keluarga Daeng Pawindu bertempat tinggal di Pewunu sejak pulang dari pengasingan Belanda di penjara Sukamiskin Bandung tahun 1931.

Pada zaman pendudukan Jepang ini pula di Kalawara ± 34 km dari Palu oleh Jepang didirikan sekolah kursus pertanian namanya *Nomindojo* yang *uniformnya* pakaian putih. Lama kursus tersebut berlangsung 6 bulan setiap angkatan. Yang diajarkan pada kursus itu selain pengetahuan tentang pertanian juga baris berbaris, taïso, dan bahasa Jepang. Guru-gurunya terdiri dari orang Jepang dan Indonesia. *Oki* mengajarkan mengenai pertanian, *Kono* mengajarkan tentang kemiliteran, *Lengkong* mengajar kesehatan, *K. Ponulele* dan *S. Patah* mengajarkan tentang bertani. Dari 30 peserta angkatan terakhir terpilih 6 orang yang akan dikirim ke Makassar (Ujung Pandang) untuk menjadi Heiho. Tapi belum cukup satu bulan mereka selesai mengikuti kursus di *Nomindojo* ini Jepang sudah menyerah.¹⁷⁾ Di Poso sekolah-sekolah yang diurus oleh Zending ditutup. Oleh pemerintah Jepang dengan pelaksananya *S. Warow* diharuskan semua sekolah menjadi netral. Gereja dan pengajaran harus dihapuskan.

Bulan September 1942 oleh tokoh-tokoh zending orang Indonesia di Poso dimintakan izin supaya sekolah guru yang diurus zending di Pamona dibuka kembali. Tapi pemerintah Jepang tak mengizinkan dan tetap menghendaki sekolah guru di Pamona dibubarkan karena sekolah itu tadinya binaan Belanda. Akhirnya dibuka juga sekolah guru di Poso oleh Jepang, tapi sekolah ini umum tak diurus atau dicampur dengan agama. Kemudian dibuka pula sekolah pertanian di Pamona, dipimpin oleh seorang Jepang. Sekolah ini seperti yang ada di Kalawara memberi kursus-kursus $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun lamanya tiap angkatan dan berlangsung sampai akhir perang dunia ke II.¹⁸⁾

17) Wawancara dengan Bp. Pasturu Sobe di Pewunu, Kecamatan Dolo pada tanggal 16 September 1979.

18) Jan Kruyt: *Op. Cit.*, hal. 428 – 429.

Pendidikan *Heiho dan Jumbo* (Polisi Jepang) tak ada di Sulawesi Tengah, hanya ada di Ujung Pandang dan Manado.

2. Seni Budaya

Selama masa pendudukan Jepang seni budaya rakyat yang biasanya dilaksanakan pada upacara-upacara adat mengalami pembekuan dalam perkembangannya, karena kehidupan begitu susah serba kekurangan, terutama bahan pakaian sangat susah sehingga sebagian rakyat kembali memakai pakaian dari kulit kayu yang disebut *vuya*, ada pula yang hanya memakai kain goni. Di samping itu rakyat dilarang berkumpul dan diawasi oleh mata-mata Jepang. Hingga kalau ada kematian dan perkawinan hanyalah kalangan keluarga dekat saja yang hadir dan penguburan atau perkawinan dilakukan cepat-cepat waktu siang. Malam hari harus cepat memadamkan lampu terutama pada saat-saat akhir pendudukan Jepang karena sering datangnya kapal-kapal pembom Sekutu. Bahan bakar dari minyak tanah sangat susah sehingga rakyat hanya memakai pelita dari kapas dan jarak atau pakai minyak kelapa.

Yang berkembang pada masa itu hanyalah nyanyian-nyanyian Jepang dan lagu-lagu perjuangan yang berisi syair-syair menggambarkan keunggulan militer Jepang terhadap Sekutu.

Tarian yang berkembang waktu itu adalah *tarian Dero* sebuah tarian asal dari Poso yang dilaksanakan secara masal antara pria-wanita berpegang-pegangan tangan dalam bentuk lingkaran. Sebenarnya tarian ini sudah ada sebelum pendudukan Jepang hanya pelaksanaannya tidak berpegangan tangan antara pria dan wanita. Tapi pada masa Jepang tarian ini jadi populer karena disukai oleh tentara Jepang sebagai hiburan. Hampir tiap malam Jepang menugaskan kepala-kepala kampung secara bergilir menyediakan wanita-wanita untuk diajak menari *Dero*.¹⁹⁾

Seni drama berkembang hanya dengan lakon-lakon yang harus melalui sensor Jepang malah diadakan oleh badan propaganda Jepang. Anak-anak sekolah sewaktu-waktu dikumpulkan untuk menghibur tentara Jepang dengan lagu-lagu/nyanyian-nyanyian.

19) Wawancara dengan Bp. I. Latanco Talamca di kampung Lombogia Kecamatan Poso Kota, tanggal 18 Oktober 1979 dan Bp. Pahuta di kampung Tatanga Kecamatan Palu, tanggal 7 September 1979.

3. Alam pikiran/Kepercayaan/Agama

Pada masa pendudukan Jepang pendidikan agama hanya dibenarkan diberikan pada anak-anak umur 16 tahun ke atas. ²⁰⁾

Upacara agama/ibadah tidak dihalangi, tetapi kalau ada pekerjaan untuk kepentingan Jepang seperti kerja bakti membuat jalan, membuat lobang perlindungan, lapangan terbang dan sebagainya maka rakyat boleh dikatakan tidak sempat lagi beribadat ke mesjid atau gereja.

Kerja paksa tersebut dilakukan sehari penuh dengan bekal dibawa sendiri oleh rakyat, dilakukan secara bergilir yang diatur melalui kepala kampung masing-masing.

Perkembangan agama Islam terhalang karena tokoh-tokohnya banyak dicurigai dan diawasi terus secara ketat malah ada yang ditangkapi dan dipancang oleh Jepang seperti yang terjadi di Poso dan Kolonodale di kerajaan Bungku dan Mori.

Haji Abdul Rahim dan kawan-kawan dari Kolonodale, Abdulah Macan dari Salabangka, dan pendiri Muhammadiyah Salabangka yang bernama Haji Abdul Rahim dan kawan-kawannya. Haji Hasan dari Bungku bersama teman-temannya semua gugur disembelih Jepang di depan rakyat yang sengaja dikumpulkan oleh Jepang untuk menyaksikannya. Demikian pula raja Tojo Tanjungbulu (pemimpin pemberontakan Gerakan Merah Putih di Ampana pada bulan Pebruari 1942) dipancang Jepang bersama beberapa orang tokoh guru/muballig antara lain Djamaluddin Datuk Tumenggung, tokoh PSSI asal Parigi bernama Karim (bekas murid HOS Tjokroaminoto), Kamaluddin Zaenong tokoh PSSI dan pejuang dari Una-Una, Marzuk bin Surrur, seorang turunan Arab dari Ampana ditambah 6 orang kawan-kawannya semuanya gugur dipancang Jepang di muka umum di Poso pada akhir bulan Ramadhan tahun 1942 (10 Oktober 1942).

Mereka itu gugur karena difitnah sebagai mata-mata musuh (Sekutu) oleh bekas Bestuur Asisten S. Warow. pada hal justeru tokoh-tokoh yang dibunuh itu menjadi pelopor-pelopor pada waktu pengambil-alihan kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda pada tahun 1942 di Ampana Poso.

Justeru S. Warow yang merupakan dulunya aparat pemerintah Belanda tapi kemudian kembali dipercayai Jepang memegang

²⁰⁾ Jan Kruyt, Op. Cit., hal. 430.

pemerintahan lalu menggunakan kekuasaannya menangkapi tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih dengan melaporkan pada Jepang seolah-olah tokoh-tokoh yang dipancang itu mata-mata Sekutu. Begitu pula halnya di Luwuk, tokoh-tokoh pergerakan banyak yang ditangkapi dan dipenjarakan di Luwuk dan Manado di antaranya Yusuf Monoarfa, Salim Hambali, A. Lagonah, anggota PSII dari Balantak dan Nambo di antaranya M. Driwasito, Gai Ali, Linggi Hasyim dan lain-lainnya. Ada ± 100 orang yang ditangkapi, 90% dari mereka adalah anggota PSII. 21)

Salim Hambali malah sampai meninggal dunia karena penderitaan di dalam penjara Manado.

Di Luwuk untuk mengambil hati masyarakat Islam, Jepang mendirikan Jamiyah Islamiyah yang berada di bawah pengawasan Jepang. Agama Kristen pun mendapat tekanan pemerintah Jepang, mendapat tekanan dari pemerintah Jepang, karen dicurigai penganut agama Kristen kebanyakan pro Belanda.

Dalam bulan Agustus 1942 S. Warow selaku aparat pemerintah Jepang di Poso mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi kebebasan berkhotbah. Dalam kebaktian-kebaktian hanya boleh orang bernyanyi dan berdoa. Apabila orang toh mau berkhotbah maka haruslah khotbah itu dihadapkan dahulu untuk diperiksa oleh orang-orang yang ditunjuk untuk itu. 22)

Pada bulan-bulan pertama tahun 1943 pimpinan urusan gereja dijalankan langsung oleh pemerintahan sipil yang berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang), yakni bahagian pengajaran dan ibadat. Tetapi dalam suatu surat tertanggal 1 Juni 1943, yang ditujukan kepada semua pengurus Zending dan guru-guru Injil pendeta S. Miyahira di Makassar memberitahukan, bahwa atas perintah Nippon akan diikuti selanjutnya peraturan yang berikut :

- 1) Di mana-mana haruslah semua gereja dan golongan Kristen bergabung menjadi satu.
- 2) Untuk seluruh pulau Sulawesi sudah didirikan *Selebes Kristokyodan Rengoki*, yakni Persatuan Kristen Selebes, yang yang dikepalai pendeta *Miyahtra* dan pusatnya adalah Makassar (Ujung Pandang). Peraturan ini berlaku selama pendu-

21) Wawancara dengan Bp. Yusuf Monoarfa di Luwuk, pada tanggal 23 September 1978.

22) Jan Kruyt: *Op. Cit.* hal. 48

an Jepang. 23)

Sebelum keluar peraturan di atas pada tanggal 1 Pebruari 1943 keluar edaran dengan kepalanya "*Perintah Keras*", berisi larangan untuk semua orang untuk mengadakan hubungan secara pribadi atau tertulis dengan orang-orang Belanda atau dengan apa yang masih tinggal sebagai pengaruh Belanda. Bunyi aslinya edaran itu: "Kamu sekalian wajib melepaskan diri sama sekali dari segala pikiran dan perbuatan yang berkenaan dengan orang-orang Belanda, musuh kita."

Selama tahun-tahun pendudukan Jepang telah dikeluarkan serentetan peraturan sebagai berikut :

- 1) Dengan surat tertanggal Manado 13 Desember 1942 tindakan-tindakan yang telah diambil sebelumnya terhadap kebebasan beribadah, dicabut. Selanjutnya ditetapkan bahwa : kebaktian-kebaktian boleh berlangsung semata-mata pada hari Minggu. Dalam khotbah tidak boleh terdapat politik atau serangan terhadap agama lain, karena kesatuan agama harus ada dan tidak boleh orang dipaksa untuk memberi pemberian-pemberian dalam kebaktian. Selanjutnya dalam surat tertanggal Manado, 15 Mei 1943, dicantumkan bahwa dalam kebaktian-kebaktian boleh memanjatkan doa, menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, nats-nats Alkitab dibacakan dan ditafsirkan, tetapi dilarang berbicara tentang politik atau perang dan pada penafsiran Alkitab tidak boleh diambil contoh-contoh lain dari pada yang dikutip dalam Alkitab. Pada semua gereja harus ada bendera Nippon dipasang di mana setiap orang harus menghormat pada bendera itu di dalam gereja.
- 2) Tentang pengajaran agama keluar surat tertanggal Manado, 24 Maret dan 10 Mei 1943 berisi: Pengajaran agama boleh diberikan semata-mata kepada orang-orang yang berumur 16 tahun ke atas, semata-mata dalam gedung gereja, semata-mata oleh guru agama, hanya agama yang boleh dibicarakan tidak boleh mengenai politik."

Malah dalam surat tertanggal Manado Juni 1945, dicantumkan di sekolah-sekolah masih belum boleh diberikan pelajaran agama, hanya diizinkan memberikan pelajaran agama dengan diselangselingi mata-mata pelajaran lain, jika hal itu dapat menunjang

23) Jan Kruyt, *Op. Cit.*, hal. 431.

kepada semangat dan kesediaan bertindak, berjuang bersama untuk Jepang.

Perkembangan agama Kristen nanti mulai terjamin setelah *S. Narumi dan pendeta Koro Hujisaki (Fujisaki)* datang ke Poso. *S. Narumi* datang pada bulan Juni 1944 kemudian datang kedua kalinya pada tanggal 11 Maret 1945 bersama *Prof. S. Seya* dari Makassar, dan pendeta Koro Hujisaki (Fujisaki) datang pada tanggal 12 September 1944 dikirim dari Makassar untuk memberi pimpinan kepada gereja yang dipersatukan dari Palu sampai Luwuk-Banggai.

Oleh karena rakyat diwajibkan harus bekerja keras untuk membantu Jepang mengsucceskan perang melawan Sekutu, maka praktis waktu beribadah sudah sangat sedikit, sebab walaupun hari Jumat dan Minggu rakyat diwajibkan bekerja terus. Sehingga baik yang menganut agama Islam maupun agama Kristen tidak bebas lagi melaksanakan ibadahnya selama pendudukan Jepang.

C. BIDANG SOSIAL EKONOMI

Pada masa pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat susah. Rakyat hidup serba kekurangan baik pangan, sandang, apalagi obat-obatan. Di Sulawesi Tengah pada umumnya rakyat hidup dari bertani. Namun begitu tetap juga mereka kekurangan makanan karena hasil-hasil pertanian sebagian besar diambil oleh Jepang disimpan di dalam gudang-gudang yang telah disediakan untuk dijadikan persediaan bahan makanan tentara Jepang. Pada umumnya rakyat disuruh menanam sebanyak mungkin bahan-bahan makanan seperti padi, jagung, ubi dan sebagainya. Begitu pula hasil ternak rakyat diambil oleh Jepang sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu rakyat diperintahkan menanam kapas, jarak serta membuat perkebunan yute untuk dibuat goni.

Dapat dikatakan selama pendudukan Jepang, rakyat tidak bebas melakukan perdagangan karena semua dimonopoli, dipegang dan diatur oleh Jepang. Di samping itu daya beli rakyat sangat rendah, karena kopra sebagai sumber keuangan sebagian rakyat di Sulawesi Tengah tidak ada harganya pada waktu itu.

Sebagian besar waktu rakyat dipakai oleh Jepang untuk mengolah tanah-tanah perkebunan yang dibuka oleh Jepang dan ditanami dengan tanaman-tanaman tertentu yang dibutuhkan bagi keperluan perang.

Di Sibowi tanah seluas puluhan ha dibuka menjadi kebun. Tenaga kerjanya berasal dari pengerahan rakyat tiap-tiap kampung yang dipekerjakan secara paksa dan secara bergiliran tanpa digaji. Untuk memperoleh tenaga kerja itu, oleh Jepang ditugaskan pada kepala-kepala kampung menyediakan tenaga warga kampungnya. Bagi pekerja-pekerja itu dibuatkan barak-barak dan setiap regu terdiri dari 30 orang dipimpin oleh seorang mandor. Jam kerja mereka mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Hanya istirahat jam 12.00 siang selama $\frac{1}{2}$ jam untuk makan. Makanan inipun dibawa sendiri oleh pekerja, kadang-kadang mereka mencuri ubi dari kebun yang dikerjakan, dimakan mentah-mentah dengan kulitnya supaya tidak ketahuan. Apabila keahuan maka akan dihukum berat dengan siksaan-siksaan sampai setengah mati. Setiap 10 hari regu-regu pekerja diaplos dengan regu lainnya. Apabila ada pekerja yang tidak bekerja dengan baik ia akan disiksa/dipukul sampai-sampai ada yang korban/meninggal dunia.

Pada masa Jepang, gula pasir hilang dari pasaran sehingga rakyat hanya memakai gula enau atau gula dari air (nira) kelapa. Garam dibuat sendiri oleh rakyat secara sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan oleh Jepang melalui mata-matanya akibatnya akan mendapat siksaan.

Apabila rakyat membutuhkan sesuatu barang kebutuhan, maka sering dilakukan tukar-menukar umpamanya ayam atau telur ditukar dengan garam dan sebagainya. Sabunpun susah pada waktu itu hingga sebagai penggantinya oleh Jepang diajarkan membuat sabun dari abu.

Sebagai alat komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya di daratan dipergunakan kuda, gerobak yang ditarik sapi, sepeda dan umumnya berjalan. Hubungan antar petani dan antar pulau dipakai perahu-perahu pinisi, perahu-perahu kecil dan motor-motor laut untuk jarak jauh. Motor-motor dan perahu-perahu inipun harus lengkap surat-suratnya dan harus memperoleh izin dari penguasa Jepang baru dapat berlayar.

Badan-badan yang mengatur dan mengurus soal ekonomi rakyat selama pendudukan Jepang, ada bermacam-macam namanya. Kumiai mengurus distribusi barang-barang, Nantaibo mengurus bidang perdagangan, Toyoboseki mengurus tentang penanaman kapas, Nantaku mengurus bidang pertanian rakyat. Karena pada umumnya daya beli rakyat sangat rendah dan kurang maka

perdagangan tidak begitu lancar. Ubi jalar hasil kebun rakyat hanya dibeli 10 sen per kg oleh Jepang.

Selama pendudukan Jepang makanan didistribusikan oleh *Kumiai* kepada rakyat, tetapi kenyataannya barang-barang yang didistribusikan oleh *Nantaibo* memerlukan dibeli dengan uang, sehingga hanya golongan pegawai yang punya gaji saja yang bisa membelinya.

Untuk bahan pakaian (tekstil) boleh dikatakan tak ada di pasaran, sehingga rakyat banyak kembali memakai kain dari kulit kayu yang disebut vuya, kain yang ditentun sendiri dari benang kapas serta goni.

Yang dapat hidup agak enak di zaman Jepang hanyalah orang-orang Indonesia kaki tangan Jepang. Dan mereka-mereka ini pulalah yang kadang-kadang bertindak lebih kejam dari pada orang Jepang sendiri.

Pada hakekatnya raja dihormati karena ia raja, tetapi lebih dihormati dan ditakuti adalah orang Jepang dan pembantunya yang tinggal di daerah kerajaan itu menjadi pengawas orang-orang Indonesia dalam pengolahan sawah, ladang, kebun-kebun kapas dan jarak yang ditanam besar-besaran.

Di daerah Poso antara satu tempat dengan tempat lainnya ada juga hubungan dagang seperti ikan, garam, dari Kolonodale dan Bungku diangkut ke Tomata dan beras dari Tomata diangkut ke Kolonodale dan Bungku. Begitu pula dari Toli-Toli dan Parigi disuplai beras ke daerah lain yang membutuhkan tapi semuanya ini diatur dan diawasi oleh *Nantaibo* bukan oleh rakyat secara bebas.

D. PENGARUH POLITIK

Selama pendudukan Jepang di Sulawesi Tengah, rakyat hidup dalam suasana tertekan penuh ketakutan karena Jepang memerintah secara *fassist*. Kebebasan berkumpul, berbicara mengemukakan pendapat tak ada sama sekali. Semua dipaksakan harus tunduk pada kemauan Jepang. Rakyat diarahkan untuk taat dan membantu Jepang dalam memenangkan perang melawan Sekutu.

Untuk menegakkan disiplin dalam pemerintahan dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya supaya jangan timbul disebut *Kempetai* dan *Toketai* yang merupakan momok dan sangat ditakuti rakyat.

Untuk menyediakan bahan perbekalan keperluan perang maka rakyat dikerahkan menjadi *romusya*, dipekerja paksakan sebagai

budak diperas tenaganya tanpa diimbangi dengan jaminan yang layak, tak dipenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan lain-lainnya. Rakyat dilatih fisik dan mentalnya, dikobarkan semangatnya untuk bersatu mengsucceskan perang Asia Timur Raya melawan Sekutu.

. Di Poso dan Banggai rakyat dikerahkan untuk mengupas lapisan mika untuk keperluan perang di samping menanam kapas, jarak dan yute. Yang paling berat dirasakan rakyat terutama di daerah Poso adalah membuat jalan raya Pendolo Mangkutana (Sulawesi Selatan) \pm 96 km panjangnya, jalan ini kelak dipakai oleh Jepang pada waktu mundur ke Sulawesi Selatan setelah kalah dari Sekutu. Rakyat dipekerjakan secara masal untuk membuat benteng-benteng pertahanan dan memperbaiki lapangan terbang. Sejak akhir tahun 1942 lapangan terbang *Sidera* \pm 13 km dari Palu diperbaiki dengan mengerahkan rakyat melalui kepala kampungnya masing-masing.

Pada tahun 1944 hari Sabtu kira-kira jam 11.30 siang datanglah pesawat pembom Sekutu dalam dua gelombang. Gelombang pertama 6 buah pesawat. Gelombang ke dua datang lagi 5 pesawat menjatuhkan bom sehingga menimbulkan banyak korban dari para pekerja. Semua korban itu bukannya dirawat oleh Jepang tapi baik yang mati maupun yang luka parah diangkut sendiri oleh kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing dan dirawat oleh keluarganya sendiri.

Di Parigi dan Luwuk yaitu di gunung Tovera dan Kampangan rakyat disuruh membuat lubang pertahanan di perut gunung dengan dipasangi alat radar sehingga menjadi sasaran pemboman yang gencar Sekutu di sekitar tahun 1943.

Di samping itu Toli-Toli menjadi basis pertahanan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang selama pendudukan Jepang.

Pemuda-pemuda dilatih sebagai *seinendan*, diajar baris berbaris dan memepgunakan senjata. Ringkasnya selama pendudukan militer Jepang, kehidupan rakyat dibawa kepada kehidupan militer dituntut dengan disiplin yang keras di satu pihak, di lain pihak Jepang dengan pembantu-pembantunya melakukan tindakan sewenang-wenang merampas hak kebebasan dan hak milik rakyat dengan dalih untuk dipergunakan memenangkan perang melawan sekutu. Partai-partai politik semua dibekukan tak diizinkan melakukan kegiatan-kegiatan. Terhadap tokoh-tokoh partai diadakan pengawasan yang ketat. Pada akhir tahun 1943 dari Manado oleh

penguasa Jepang dikirimlah seorang yang bernama *Kumontoi* mengadakan penangkapan secara masal di Buol Toli-Toli, Gorontalo dan Donggala dengan dalih membasmi mata-mata musuh. Yang ditangkap adalah tokoh-tokoh pergerakan politik, tokoh-tokoh pemerintahan, guru-guru dan rakyat biasa. Ada ratusan jumlahnya orang-orang yang ditangkap itu disiksa secara kejam. Sebagian dari tangkapan itu dikirim ke penjara Manado. Lebih dari setengah orang-orang yang ditangkap itu meninggal karena siksaan. Di antara yang meninggal dalam penjara Manado adalah bekas pejabat raja Toli-Toli Mattata Daeng Masese dan dikuburkan di pekuburan Sario Manado.

Baru pada tahun 1944 tahanan korban Kumontoi itu dibebaskan dan dikembalikan ke tempatnya masing-masing, kecuali beberapa orang yang dianggap berbahaya oleh Jepang tetap dipenjarakan di Manado sampai Jepang menyerah pada Sekutu.

E. KEGIATAN MASYARAKAT

Pada mulanya di Toli-Toli yang menjadi basis pertahanan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang di Sulawesi Tengah, rakyat tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tunduk dan patuh pada perintah penguasa Jepang.

Tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih yang mengadakan aksi pada tanggal 1 Februari 1942, banyak meninggalkan kota dan tinggal di luar kota Toli-Toli. Sebagiannya lagi ikut tertangkap dan dipenjarakan ke Manado. Namun setelah melihat dan mengalami kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh kaki-tangan-kaki tangan Jepang terhadap rakyat di Kampung Ogotua, Soni, Bampula, Malomba dan sekitarnya maka tokoh-tokoh partai PSII yang ada di kampung-kampung itu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk melancarkan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan menentang perbuatan-perbuatan yang dinilai sudah melanggar norma-norma agama itu. Pemukulan sewenang-wenang terhadap rakyat dan pemerkosaan wanita-wanita bahkan kadangkadangkang isteri orang pun diambil secara paksa dari tangan suaminya untuk dijadikan alat pemuas hawa nafsu Jepang dan kaki tangan-kaki tangan mereka, telah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Kesulitan pakaian, kekurangan bahan makanan membuat rakyat tak sabar dan tidak kuat lagi menahan, sehingga tadinya perasaan takut luar biasa terhadap Jepang berbalik menjadi perasaan benci yang meluap-luap dan menimbulkan sikap nekad melawan pada

Jepang dan kaki tangannya. 24)

Perasaan benci rakyat terhadap Jepang dan kakitangannya makin meningkat lagi setelah datangnya Abang Ali (dari Jawa) dan *Tantong Madayuni* (*suku Dondo*) dari Tarakan. Mula-mula kedua orang ini menemui tokoh-tokoh partai (PSII) di Bambapula masing-masing bernama Ladjabare, Lasanong dan Lapanrita untuk melaporkan bahwa Jepang sudah mendekati kekalahannya. Di Tarakan, Berau dan Bulungan telah terjadi pemberontakan rakyat melawan Jepang. Dengan kalahnya Jepang oleh Sekutu maka ada rencana Jepang untuk membunuh rakyat seluruhnya supaya kalau Sekutu datang tak ada lagi rakyat yang ditemuinya dan hanya akan memerintah batu dan pohon saja. Oleh karena itu sebelum rakyat dibunuh maka rakyat harus berontak pada Jepang.

Pada waktu itu di Toli-Toli telah banyak tokoh-tokoh masyarakat serta rakyat biasa ditangkap atas perintah *Ken Kanrikan Imaki* dengan tuduhan mata-mata musuh.

Rakyat kampung Nalu yang ditahan, para guru dan pegawai dibuatkan asrama di kampung Panasakan. Kepada mereka oleh Jepang diperintahkan menggali lubang perlindungan dengan alasan untuk tempat bersembunyi jika ada pemboman Sekutu, pada hal sebenarnya lubang itu dipersiapkan sebagai tempat penguburan massal jika diadakan pemancungan rakyat kelak.

Mendengar laporan dari Abang Ali dan Tantong Madayuni itu maka tokoh-tokoh masyarakat kampung Bambapula pada tanggal 12 Juni 1945 mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan rencana mengadakan pemberontakan terhadap Jepang bersama kakitangannya.

Sementara itu polisi di Ogotua mendapat informasi bahwa 2 orang pelarian dari Tarakan ada di Bambapula. Pada tanggal 12 Juni 1945 dikirimlah 2 (dua) orang polisi Jepang ke Bambapula masing-masing bernama *Krek* dan *V. Manoppo*. Keduanya langsung menuju ke rumah kepala Kampung Bambapula tapi keduanya dihadang rakyat di tengah jalan sebelum sampai ke rumah kepala kampung.

V. Manoppo menyerahkan diri tetapi *Krek* melarikan diri sehingga

24) Wawancara dengan Bp. Haji Mahmud Radjaili di Kampung Panasakan Toli-Toli pada tanggal 18 Nopember 1979.

dikejar beramai-ramai sampai tertangkap dan karena melawan maka ia dibunuh, senjatanya dirampas.

Kedatangan dua orang polisi ke Bambapula itu adalah untuk mencari Abang Ali dan Tantong Madayuni.²⁵⁾

Setelah musyawarah di kampung Bambapula, Tantong Madayuni melanjutkan perjalanan ke kampung Malomba untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana. Tanggal 1 Juli 1945 diadakanlah musyawarah antara para tokoh masyarakat desa Malomba dipimpin langsung oleh Tantong Madayuni di rumah seorang tokoh masyarakat yang bernama Radjaili yang juga sebagai ketua ranting PSSI di Malomba. Pertemuan tersebut memutuskan :

1. Seluruh rakyat desa Malomba laki-laki tua/muda harus melawan pemerintah Jepang bersama kakitangannya dengan alat apa saja yang dapat dipergunakan.
2. Barang siapa yang mungkir atau lari, harus dibunuh dan disita seluruh harta bendanya.
3. Penjagaan desa Malomba harus diperketat dari dua arah. Di Timur yaitu di Tinabogan dipimpin oleh Baula dan di Barat yaitu di Lais dipimpin oleh Lasaenong.
4. Jika telah terjadi pertempuran maka kedua penjaga tersebut harus tolong-menolong dan suku Daya Lauje dari desa Ogowale sudah harus siap dengan sumpit menunggu komando dari pimpinan yaitu Tantong Madayuni.

Demikianlah betapa beratnya penderitaan rakyat sehingga menimbulkan sikap nekad untuk melawan kepada Jepang.”

Berita pembunuhan polisi Jepang di kampung Bambapula dan rencana rakyat Malomba hendak memberontak pada pemerintah Jepang oleh salah seorang polisi Jepang di Malomba dilaporkan kepada *Ken Kanrikan Imaki* di Toli-Toli. Sejak pertemuan tanggal 1 Juni 1945 di Malomba rakyat kampung Malomba dan sekitarnya telah bersiap-siap menjaga kemungkinan adanya serangan dari Jepang bersama kakitangannya.

Pada tanggal 18 Juli 1945 datanglah *Ken Kanrikan Imaki* dengan kapal motor berlabuh di desa Tinabogan dengan pengawasan sepasukan polisi dan tentara Jepang. Di desa Tinabogan *Ken Kanrikan Imaki* ditemani oleh *Suco Toli-Toli Haji Mohammad*

25) Wawancara dengan Bp. Haji Mohammad Salim Haji Mallu di kampung Baru Toli-Toli tanggal 16 Nopember 1979.

Saleh Bantilan, polisi Makalo dan Hamlet Semen dengan naik gerobak menuju ke Malomba, sedangkan pasukan-pasukan polisi dan tentara Jepang lainnya naik motor laut ke Malomba. Mendengar kedatangan rombongan Ken Kanrikan ini maka rakyat Malomba dan sekitarnya bersiap menunggunya.

Sewaktu memasuki desa Malomba polisi pengawal Ken Kanrikan memerintahkan kepada rakyat supaya meletakkan senjatanya masing-masing. Lanoni yang telah bertekad dan berjanji akan membunuh siapa saja bangsa Jepang yang lewat di depannya hari itu, meletakkan senjatanya berupa parang di bawah pahanya.

Melihat rakyat patuh meletakkan senjatanya maka polisi yang bernama Hamlet Semen pengawal rombongan meletuskan senjatanya ke atas sebagai kode bagi polisi dan tentara di atas motor laut bahwa keadaan aman dan perlawanan rakyat sudah diatasi. Mendengar letusan ini rakyat segera memegang senjatanya lagi dan berlari menuju rombongan Ken Kanrikan. Lanoni yang terdekat dengan gerobak tumpangan Ken Kanrikan segera memotong kepala Ken Kanrikan Imaki yang sedang turun dari gerobak sehingga kepalanya terpenggal dan mati saat itu juga. Melihat kejadian ini polisi Makalo menembak Lanoni hingga ia tersungkur dan meninggal. Raja Toli-Toli Haji Mohammad Saleh Bantilan pun hampir korban seandainya tak dilindungi oleh Datu Intan.

Dari arah laut pasukan polisi dan tentara Jepang menghujani tembakan ke darat menyebabkan banyak dari rakyat yang jatuh korban. Yang meninggal pada kejadian tersebut adalah Ken Kanrikan Imaki dan Lanoni. Imaki dikuburkan di Tinabogan dan Lanoni di Ogogasang, Malomba. Sampai sekarang ini kuburan Lanoni masih tetap ada di Ogogasang belum dipindahkan ke Makam Pahlawan Toli-Toli.

Yang menderita luk parah dalam peristiwa Malomba ini adalah polisi Jepang Makalo dan dari pihak rakyat adalah Bebelan, Taniangka, Haji Hamzah dan Daeng Marencong.

Pada tanggal 21 Juli 1945 pemerintah Jepang lalu mengadakan penangkapan terhadap beberapa tokoh pemberontak rakyat Malomba yaitu :

1. Bebelan.
2. Taniangka.
3. Haji Hamzah.
4. Amat.
5. Bacolena.

6. Abdul Wahab
7. Usman.
8. Adam Labudu.
9. Labudu.

Kesembilan orang ini dengan tangan diborgol di bawa ke Toli-Toli dan sesampainya di sana mereka dipancung di kampung Panasakan Dalam di kaki bukit lalu dikubur dalam satu lubang. Sekarang kearnangka dari ke 9 orang pahlawan tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli telah dipindahkan ke Makam Pahlawan Toli-Toli.

Setelah pemberontakan rakyat Malomba ini barulah pada tanggal 1 Agustus 1945 pemerintah Jepang di Toli-Toli memerintahkan pembebasan terhadap rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat kampung Nalu, para guru dan pegawai yang telah lama ditahan karena perintah Ken Kanrikan Imaki.

Seandainya tak terjadi pemberontakan rakyat Malomba dan pembunuhan Ken Kanrikan Imaki maka mungkin rakyat Toli-Toli yang menjadi korban pemancungan Jepang jauh lebih banyak lagi.²⁶⁾

Perlawanan lainnya di Sulawesi Tengah dalam melawan Jepang terjadi pula di Balantak dan Ranga-Ranga (wilayah Luwuk Banggai) di mana perlawanan tersebut dipimpin oleh Mantide. Juga di desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso terjadi aksi rakyat menangkapi tentara Jepang oleh Abe Pande, *Tarico Hio* dan kawan-kawannya, sehingga sisa pasukan Jepang menyingkir ke Tawaelia.²⁷⁾

Pemberontakan rakyat pada ke dua tempat di atas kurang lengkap data-datanya kami peroleh sehingga tak dapat diuraikan secara terperinci.

Di Salinggoha Kecamatan Walea Kepulauan, pada tahun 1944 (2604 tahun Jepang), Talhata Dariseh dengan pengikut-pengikutnya melakukan perlawanan. Mereka tak mau taat lagi kepada pemerintah Jepang dan mendirikan pemerintahan sendiri di kampung Salinggoha (pulau Walea) kerajaan Una-Una dengan

26) Wawancara dengan Bp. Haji Mahmud Radjaili di kampung Panasakan Toli-Toli, tanggal 18 Nopember 1979.

27) Informasi tertulis dari G. Beba, Penilik Kebudayaan pada Kantor Dep. P & K Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

kepala pemerintahannya dipegang oleh Talhata Dariseh, Daeng Prangi. Bendera yang dikibarkan bukan bendera Merah Putih tetapi bendera dengan dasar hijau dengan bulan bintang putih di tengah-tengahnya. Karena adanya sikap rakyat Salinggoha ini maka dikirimkanlah sepasukan polisi dari Gorontalo untuk mengetahui dari dekat maksud dari penduduk Salinggoha. Pada waktu motor yang ditumpangi oleh polisi dari Gorontalo mendekati kampung Salinggoha maka rakyat dengan berperahu keluar menyongsong dengan bersenjatakan tombak dan klewang. Polisi-polisi lalu memberikan tembakan peringatan ke udara supaya meeka menyerah, tetapi ternyata mereka bukannya menyerah malah tambah maju mendekati motor yang ditumpangi polisi-polisi Jepang itu.

Melihat gelagat yang membahayakan itu maka polisi-polisi lalu menembaki para pemberontak sehingga banyak yang gugur ditembus peluru dan mayatnya jatuh ke laut.

Walaupun sudah banyak yang gugur tetapi kawan-kawannya yang masih hidup bukannya menyerah malah tambah nekad melawan, maju terus mendekati motor polisi. Akibatnya polisi terus memberondong senapan ke arah pemberontak-pemberontak sehingga korban makin banyak berjatuhan. Akhirnya polisi-polisi tadi berhasil juga mendarat. Di daratan, rakyat tetap mengagalkan perlawanan menyerang polisi-polisi itu. Polisipun terus bertindak dengan senjata apinya sehingga jatuh bergelimpangan korban-korban yang kena tembakan. Di antaranya yang korban terdapat ayah dari Talhata.

Melihat ayah Talhata telah gugur, sisa pasukan rakyat yang masih selamat mengundurkan diri masuk ke hutan di mana Talhata telah lebih dahulu membuat pertahanan di dalam hutan tersebut. Polisi yang datang tak berani menyerbu masuk ke dalam hutan tetapi kembali ke Gorontalo sambil membawa tawanan-tawanan yang dapat ditangkap.

Dua hari kemudian motor kembali lagi dari Gorontalo ke pulau Walea, kampung Salinggoha membawa polisi tentara Jepang. Sesampainya di kampung Salinggoha dikirimkanlah kurir untuk menemui Talhata di dalam pertahanannya di hutan. Mengetahui bahwa ada tentara Jepang di motor itu maka terpaksa Talhata keluar dari persembunyiannya tetapi terus ditangkap oleh tentara Jepang. Ia dengan pengikut-pengikutnya ditangkap dan di bawa ke Menado kira-kira ada 20 orang semuanya. Di penjara Menado

Talhata ditahan pada kamar tersendiri dipagar dengan kawat berduri dan orang-orang dilarang menghampiri atau bertemu dengannya. Sedangkan anak buahnya 19 orang lagi ditahan bersama-sama di dalam satu kamar.

Gerakan ini patut dibanggakan karena walaupun hanya diadakan dengan kepercayaan takhayul saja, dengan mengandalkan pada keampuhan dan kesaktian senjata keris, tombak dan golok sehingga dapat dipatahkan oleh Jepang dengan kekuatan senjata modernnya atau mitraliurnya. 28)

Pada tahun 1942 pos-pos Jepang di Sulawesi Tengah tidak begitu banyak.

Antara tahun 1944 – 1945 kekuatan Jepang di Sulawesi Tengah terdiri dari campuran Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

Markas besar Rikugun untuk Sulawesi Tengah terdapat di Poso. Sebagai tangsi-tangsi darurat mereka memakai rumah-rumah rakyat yang agak besar dan sekolah-sekolah.

Di Donggala bekas rumah Asisten Residen Donggala yang terletak di Gunungbale dijadikan sebagai markas batalion disamping berfungsi sebagai tempat Ken Kanrikan. 29)

Sekitar markas batalion tersebut dipasang lubang-lubang perlindungan dan juga sender radio. Untuk membuat lubang-lubang perlindungan itu rakyat dikerahkan bekerja paksa. Di atas gunung di sebelah selatan tempat markas tersebut ditempatkan pos pengawas bahaya udara yang disebut *Daigo Daici*. Karena adanya pos tersebut maka 10 menit sebelum pesawat tiba sudah diketahui hingga dibunyikan alarm bahaya udara. 30)

Di samping itu Toli-Toli juga dijadikan basis pangkalan pesawat udara untuk membantu sewaktu-waktu ke Tarakan dan Balikpapan. Akibat pelaksanaan politik militerisme Jepang, memberikan efek kegiatan masyarakat antara lain :

1. Kebudayaan

Para wanita di kampung digiatkan sehingga pandai memintal benang dari kapas kemudian mereka tenun menjadi sarung pelekat

28) Kementerian Penerangan Republik Indonesia Seri Propinsi Sulawesi, hal. 219.

29) Wawancara dengan Bp. W.S. Ruata di Palu, tanggal 14 September 1979.

30) Wawancara dengan La Semmeng La Malise di Donggala, tanggal 23 September 1979.

dan bahan pakaian lainnya.

Wanita pingitan tidak segan-segan lagi keluar rumah, mengikuti kegiatan organisasi wanita yang didirikan oleh pemerintah Jepang yaitu *Fujinkai*. Melalui *Fujinkai* ini para wanita dikerahkan bekerja di sawah-sawah dan kebun menanam kapas, yute untuk dibuat karung dan sebagainya. Mereka juga dilatih dalam baris-berbaris dalam *seinendan*. Pada masa pendudukan Jepang ini pula perkawinan kanak-kanak makin banyak dilakukan karena rasa takut pada Jepang.

2. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan masyarakat giat menuruti kehendak Jepang. Anak-anak diberi latihan fisik dan mental supaya kuat maka di sekolah-sekolah diajarkan olah raga bangun pagi cepat kemudian lari-larki (*kakiyasi*) lalu berkebun.

Tiap pagi sebelum pelajaran berlangsung dalam kelas, selalu didahului upacara menghormati bendera *Hinomaru* dan penghormatan pada *Kaisar Hirohito* dengan melagukan *Kamigayo*, lagu kebangsaan Jepang.

Setelah itu senam pagi Jepang (*taiso*).

Sejarah yang dipelajari adalah sejarah kepahlawanan Jepang, *Tenno Heika* Bangsa, jenderal-jenderal Jepang pemberani seperti *Togo*, *Yamamoto* dan lain-lain. Anak-anak sekolah diajarkan bahasa dan huruf Jepang (*Katakana*, *Hiragana* dan *Kanji*) juga lagu-lagu Jepang yang bersemangat untuk menumbuhkan keberanian bertempur melawan musuh dan lain-lain.

3. Bentuk kegiatan lainnya

Dipergiatnya kerja bakti (*kinrohosi*) dan kelompok-kelompok kerja (*tonarigumi*) di tiap-tiap desa. Rakyat besar kecil, tua muda, baik pria maupun wanita semua harus giat bekerja tak boleh ada orang-orang yang menganggur di desa-desa. Organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Tengah hanyalah *Seinendan* di mana pemuda-pemuda dilatih baris-berbaris dan diberi tugas sebagai *Hansip* menjaga keamanan kampungnya masing-masing.

Organisasi pemuda yang ada di bawah naungan Partai Politik seperti *SIAP*, *Pandu HW* dan lain-lain karena diawasi secara ketat oleh pemerintah Jepang terpaksa pasif saja atau dibekukan. Di Luwuk Gerakan Merah Putih yang pernah mengadakan aksi merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda bulan Pebruari 1942

tokoh-tokohnya pun tidak dapat bergerak lagi sejak Jepang mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Nasional Gerakan Merah Putih dengan dalih Indonesia belum sanggup menghadapi Sekutu kalau datang menyerang.

Karena Komite 12 yang merupakan badan pelaksana pemerintahan Gerakan Merah Putih Luwuk dibubarkan dan berlakulah pemerintahan militer Jepang dan Raja Banggai tetap diakui sebagai raja oleh pimpinan pemerintah Jepang di Manado. Akibat dari pada tindakan Jepang membubarkan Pemerintahan Gerakan Merah Putih Luwuk ini maka anggota-anggotanya pun mengambil sikap. Ada yang bersikap pasif tak mau bekerja sama dengan Jepang, ada yang bersiasat mempergunakan kesempatan bekerja pada Jepang agar dapat mengikuti dan mengetahui taktik dan siasat Jepang, lalu menjadi *Jumpo* (polisi) Jepang seperti A.R. Lanasir, bekas Komandan Pasukan Gerakan Pemuda Merah Putih Luwuk-Banggai menjadi petugas bagian *Security*, dan ada pula yang ditangkap dan dipenjarakan akibat laporan dari bekas aparat pemerintah Belanda yang kembali dipercaya Jepang sehingga mereka melaksanakan pembalasan pada tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih dengan menggunakan kedudukannya sebagai orang kepercayaan Jepang. Ironisnya karena tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih yang ditangkap itu dituduh mata-mata musuh (Sekutu) pada hal justru merekalah yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Belanda pada 12 Pebruari 1942 di Luwuk.

Di antara bekas pegawai Belanda yang pernah ditangkap oleh Pemuda Gerakan Merah Putih Luwuk pada peristiwa 12 Pebruari 1942 adalah A.W. Lantang malah oleh Jepang diangkat menjadi wakil kepala polisi (*Kaisatsuco*) di Luwuk dengan pembantunya Ince Umar Dahlan, bekas Bestaur Asisten. Yang menjadi *Keisatsuco* (kepala polisi) adalah seorang Jepang bernama *Sabuto Kiyosi*. 31)

Tak lama setelah A.W. Lantang diangkat menjadi wakil kepala polisi Luwuk oleh Jepang maka terjadilah penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh PSII yang dulunya diangkat menjadi komandan di tiap-tiap kampung oleh Gerakan Merah Putih mulai dari Luwuk, Nambo, Kinton, Balantak dan sekitarnya. Yang ditangkap itu antara lain Salim Hambali, Ys. Monoarfa, A. Lagonah,

31) Informasi tertulis Bp. A.R. Lanasir dari Luwuk.

Ys. Lanusi, Husain Lamonjong, Mariajang, Driowasito, Gai Ali, Linggi Hasyim dan lain-lain.

Terhadap Ys. Monoarfa dituduh telah memerintahkan kepada pimpinan PSII Luwuk, Nambo, Kintom dan Balantak agar PSII dijalankan (dikembakngkan) secara rahasia yang berarti suatu pembangkangan pada perintah Jepang dan dikategorikan sebagai sikap anti Jepang.

Untuk menolong kawan-kawan lainnya supaya mereka itu bisa bebas, maka tiga orang yaitu Ys. Monoarfa, A. Lagonah dan Salim Hambali mengaku bertanggung jawab atas soal PSII itu sehingga akibatnya selama masa pendudukan Jepang Ys. Monoarfa, Salim Hambali dan A. Lagonah mendekam dalam penjara Menado. Malahan Salim Hambali ini meninggal di dalam penjara Menado.³²⁾

Demikianlah selama pendudukan Jepang, karena ketatnya pengawasan dari Jepang yang memerintah secara fasis maka kegiatan tokoh-tokoh pergerakan di Sulawesi Tengah dapat dikatakan beku untuk sementara waktu.

Nanti pada saat-saat Jepang menyerah kepada Sekutu barulah kembali aktivitas pergerakan diadakan secara rahasia dengan sponsornya berasal dari tokoh-tokoh pergerakan yang duduk dalam pemerintahan pada waktu itu.

F. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK/SOSIAL ANTARA LAIN.

- a. Di Sulawesi Tengah Gerakan Tiga A ini hanya dikenal oleh masyarakat dalam bentuk semboyan yang di bawa oleh Jepang. Yang dikenal masyarakat Sulawesi Tengah semboyan itu berbunyi : "*Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia*". Biasanya pada waktu diadakan tarian Dero semboyan Tiga A ini sering dinyanyikan bersama-sama.

Sebagai suatu gerakan/Tiga A, masyarakat di Sulawesi Tengah tak mengenalnya. Jadi apa yang pernah dibentuk di Pusat tak pernah dialami dan dikenal di Sulawesi Tengah mengenai Gerakan Tiga A ini.

32) Wawancara dengan Bp. Yusuf Minoarfa di Luwuk, tanggal 23 September 1978.

- b. Demikian pula mengenai *Cuo Sangi In* masyarakat di Sulawesi Tengah pada masa itu tak mengetahuinya.
 Karena Sulawesi Tengah merupakan bagian dari *Syu Menado* di mana pejabat tertinggi Jepang yang ada di Sulawesi Tengah hanya Ken Kanrikan maka dengan demikian Sulawesi Tengah sudah ikut diwakili melalui wakil-wakil dari *Syu Menado*.
- c. Selama masa pendudukan Jepang di Sulawesi Tengah, organisasi kepemudaan yang memang telah ada sebelumnya tidak dapat berkembang dengan wajar malah dibekukan. Yang ada hanyalah organisasi pemuda yang dibentuk oleh dan untuk keperluan pemerintah Jepang.
 Pemuda-pemuda dilatih dalam barisan *Seinendan* di samping dikerahkan bersama rakyat pada umumnya melakukan *kin-rohosi* untuk berkebun juga dipekerja paksakan membuat perlindungan dan pertahanan Jepang, membuat jalan raya dan sebagainya.
- d. Organisasi wanita yang ada di Sulawesi Tengah selama masa pendudukan Jepang hanyalah *Fujinkai*. Organisasi kewanitaan lainnya tak ada.
 Wanita-wanita diorganisir untuk dikerahkan bertanam kapas kemudian pada sorenya dikumpulkan untuk memintal benang. Pada umumnya *Fujinkai* ini diketuai oleh isteri raja atau puteri raja. Kadang-kadang pula anggota *Fujinkai* ini dikerahkan untuk memasak apabila sewaktu-waktu ada pembesar Jepang datang dari Menado bersama rombongannya.
- e. Dengan terbentuknya *Dokoritsu Jumbi Coosakai* di Jakarta pada 1 Maret 1945 yang diumumkan pembentukannya oleh *Seiko Syikikan Kumakici Harada* selaku pimpinan pemerintah militer Jepang di Jawa, maka di Sulawesi Tengah pada bulan Mei-Juni 1945 bendera Merah Putih dinaikkan bersama-sama dengan bendera Hinomaru (bendera Jepang) dan Indonesia Raya bebas dinyanyikan. Peristiwa ini ditanggapi masyarakat Sulawesi Tengah sebagai pengakuan *de facto* Jepang atas kemerdekaan Indonesia.³³⁾
 Di Toli-Toli sang Merah Putih berkibar di samping bendera

33) Wawancara dengan Bp. W.S. Ruata di Palu, tanggal 14 September 1979 dan Bp. Abdul Rahman Ilimullah di Tinombo, tanggal 10 Oktober 1977.

Jepang pada tanggal 27 Mei 1945. ³⁴⁾

Hal ini menyebabkan tokoh-tokoh pergerakan di daerah Sulawesi Tengah mulai mengadakan gerakan secara diam-diam karena walaupun Jepang sudah mengizinkan naiknya bendera Merah Putih di samping bendera Jepang namun pengawasan dan sikap keras mereka masih tetap dijalankan.

Di sekitar tahun 1944 pesawat pembom Sekutu sudah mulai melancarkan pemboman pada obyek-obyek pertahanan militer Jepang yang ada di Sulawesi Tengah seperti pemboman atas lapangan terbang Sidera dekat Palu dan pantai Donggala mulai dibom pesawat-pesawat Sekutu sekitar bulan September 1944. ³⁵⁾

Daerah Luwuk-Banggai pun dihujani bom oleh Sekutu terutama di gunung Kampangan/Balantak di mana Jepang memasang instalasi radarnya tapi sebelum dapat berfungsi sudah datang kapal-kapal udara Sekutu membomnya sehingga terpaksa instalasi radar itu dipindahkan ke tempat lain. Selain itu juga Pagimana dan tempat pengolahan mika di Banggai dan sekitar pulau-pulau Peleng dan Labobo Bangkurung diserang Sekutu dari udara. Dengan datangnya pemboman yang bertubi-tubi pada obyek-obyek penting itu maka Jepang pun mempergiat jaringan spionasenya di sekitar tahun 1944 itu, dengan datangnya beberapa orang pemuda Jepang dikirim dari Kendari ke Luwuk. Pemuda-pemuda Jepang itu menyamar sebagai *Toyobo* yaitu pegawai bagian pertanian juga dari *Minsenhukokai* (usaha pelayaran). Petugas-petugas tadi dari *Hanakikan* atau Kembang bangsa suatu jaringan mata-mata yang bertanggung jawab atas tetap tegaknya pemerintahan Jepang.

Namun ternyata *spion-spion* tadi dipikat oleh kontra spionase Sekutu dengan jebakan wanita-wanita cantik menyebabkan untuk kedua kalinya dikirim lagi dari Kendari seorang petugas bernama *Semmang* (suatu nama samaran), dibantu oleh seorang anggota *Heiho* yang bernama *Malaeasang* asal dari Jenepono (Sulawesi Selatan). Mereka dapat membongkar jaringan spionase Sekutu di Luwuk yang telah bersiap menung-

34) T. Kawandaud, *Tambo dan Sejarah Buo*, Drukkerij Annaser, Gorontalo, 1949, hal. 69.

35) Wawancara dengan Bp. W.S. Ruata di Palu, tanggal 14 September 1979.

gu tibanya Sekutu. Jaringan tersebut terdiri dari beberapa orang bekas pegawai Belanda yang berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Akan tetapi karena dikaburkan oleh laporan-laporan palsu yang dibuat oleh alat-alat pencari muka pada Jepang maka tidak terjadi penangkapan atas diri spion-spion Sekutu itu.³⁶⁾ Akhirnya kepala *Hanakikan* dari Kendari sendiri bernama *Hirabayasi* (seorang bekas kolonel) datang ke Luwuk menyelidiki langsung kegiatan mata-mata Sekutu dan ketahuanlah beberapa orang Taiwan yang diturunkan melalui kapal selam di sekitar Banggai kepulauan dan mereka itu menyamar sebagai tentara Jepang yang pura-pura kapalnya pecah karena dibom Sekutu. Husin Djuddawi yang memakai nama samaran Semmang sewaktu ditugaskan dari Kendari menyelidiki mata-mata Sekutu di Luwuk adalah juga merupakan tokoh dari organisasi *Keris Muda Sulawesi Selatan*.

Kesempatan ke Luwuk dipergunakannya untuk menemui tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih tahun 1942 yang ada di Luwuk seperti A.R. Lanasir, A.G. Mambu, Dr. Soetaryo, Abdul Azis Larekeng dan lain-lain. Kepada tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih itu secara rahasia oleh Semmang diberitahu supaya bersiap-siap mengatur dan mempersiapkan diri meneruskan perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan.

Dibentuklah personalia persiapan Resimen dari Divisi IV Keris Muda di Luwuk-Banggai sebagai berikut :

- 1) Dr. Soetaryo selaku Komandan Resimen.
- 2) Abdul Rahman Lanasir selaku wakil Komandan.
- 3) Abdul Azis Larekeng, Kepala Staf.
- 4) T.S. Bullah, Kepala Bagian I
- 5) Abdurrahman, Kepala Bagian II.
- 6) S.A. Amir, Kepala Bagian III.
- 7) Abdul Kadir, Kepala Bagian IV.
- 8) A.G. Mambu Kepala Bagian V.

Namun karena situasi yang masih belum memungkinkan untuk bergerak terang-terangan maka hanya dengan rahasia dan diam-diam mereka menanti saat yang tepat untuk bergerak terang-terangan.

36) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

Antara lain kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Keris Muda Luwuk ini adalah pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah, satu peleton tentara Jepang yang mundur dari Halmahera bersenjata mitraliur dan senjata lainnya dilucuti oleh pemuda Merah Putih di bawah pimpinan Ince Umar Dahlan. Tetapi dengan macam-macam alasan dan bujukan akhirnya pasukan Jepang itu dapat lolos ke Sulawesi Selatan.³⁷⁾

- f. Selama pendudukan militer Jepang di Sulawesi Tengah tak ada terbit media massa.

Hanya ada beredar surat kabar dari Menado yang bernama *Selebes Shinbun* (*Pewartu Selebes*). Dapat dikatakan di seluruh wilayah *Residensi Menado* *Selebes Shinbun* ini beredar. Isi dari *Selebes Shinbun* ini hanyalah propaganda untuk kepentingan Jepang.

Surat kabar ini dipimpin oleh *Hayakawa* dan sebagai *Redaktur-nya* G.E. Dauhan serta pembantu Redaktur O.H. Pantow. Wartawan yang ada di Sulawesi Tengah seperti Horas Siregar dan Haji Ince Makka tidak aktif menerbitkan surat kabarnya karena ditahan oleh Jepang dengan tuduhan mata-mata musuh.³⁸⁾

37) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

38) Wawancara dengan Bapak Horas Siregar di Palu pada tanggal 17 September 1979.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN AWAL DAN PROCES RE- VOLUSI KEMERDEKAAN DI DAERAH

Setelah tentara Jepang mulai terdesak dalam pertempuran di lautan Pasifik pada tahun 1943 maka Sulawesi Utara dijadikan tempat penarikan mundur dari pasukan-pasukan tentara Jepang baik *Kaigun* maupun *Rikugun*.

Dalam bulan Septemer 1944 pulau Morotai direbut dan dijadikan esbagai salah satu pangkalan Sekutu. Dari Morotai kapal-kapal pembom Sekutu melancarkan pemboman ke daerah Sulawesi pada umumnya terutama pada obyek-obyek pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Di samping serangn udara, Sekutu juga mengirimkan kapal-kapal selam ke perairan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah antara lain di sekitar perairan Luwuk-Banggai.

Di Luwuk-Banggai orang-orang Taiwan sebagai mata-mata diturunkan dengan kapal selam dan mereka berlaku sebagai tentara Jepang yang kapalnya pecah kena serangan pemboman Sekutu. Hal ini diketahui ketika kepala *Hanakikan* dari Kendari yang bernama Hirobaysi datang ke Luwuk menyelidiki kegiatan mata-mata Sekutu di sana. Di antara mata-mata Sekutu itu terdapat pula beberapa orang aparat pemerintah Jepang bekas pegawai Belanda dahulu. Mereka telah mengetahui bahwa Jepang sudah kalah di beberapa front pertempuran dan tidak lama lagi Sekutu akan datang. Hal ini mereka ketahui dari *Bunken Kanrikan* Luwuk bernama *Komiya* yang sebenarnya juga mata-mata Sekutu. Nanti ketahuan setelah Jepang menyerah dan mundur ke Sulawesi Selatan maka di Kamp tawanan Rappang, Komiya ini disambut dengan penghormatan oleh tentara Australia dan diperlakukan khusus dari tawanan-tawanan lainnya.

Pada tanggal 6 September 1944 pelabuhan Bitung dihancurkan oleh pemboman Sekutu, menyusul pada tanggal 7 September 1944 kota Menado dan tanggal 8 September 1944 kota Langoan. Setelah kota Menado hancur maka pucuk pimpinan pemerintahan

militer dan sipil Jepang dipindahkan ke kota Tondano, keduanya dipegang oleh Panglima Angkatan, *Laksamana Hamanaka* dengan kepala stafnya *Takasaki*. Karena keadaannya yang makin terdesak oleh Sekutu maka Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Diadakanlah di kota Tondano suatu Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari : E.H.W. Palengkahu (Ketua), Dr. R.C.L. Senduk, D.A. Th. Gerungan, Kusnodhanupoyo, H.D. Manoppo, B.W. Lopian, E.R.S. Warow, C.P. Hermanses, Tom Olij dan lain-lain.

Pada tanggal 1 April 1944 di Papakelan, Tondano oleh *Bunken Kanrikan Ishikla* dibukalah kursus sekolah kader pemerintahan. Pada saat pembukaannya bendera Merah Putih dinaikkan bersamaan dengan bendera Hinomaru. Peserta kursus terdiri dari pemuda-pemuda, pejabat dari semua instansi yang dikepalai oleh seorang Jepang dengan maksud mereka-mereka itulah yang dipersiapkan sebagai pengganti Jepang untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan politik persemakmuran Jepang dalam kawasan Asia Timur Raya.¹⁾

Dari Sulawesi Tengah dikirimkan utusan mengikuti kursus itu A.B. Djanggola dari Palu, Lolontomene Lamakarate dari Biromaru, Bede Djiloi dari Kulawi dan Wongko Lembah Talasa dari Poso. Di Sulawesi Tengah pada saat-saat terakhir kekuasaan Jepang, masyarakat tidak mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya karena Jepang sangat merahasiakan kealahannya melawan Sekutu. Jepang masih menggembar-gemburkan bahwa di segala medan pertempuran mereka selalu menang.

Di Luwuk setelah kapitulasi, Jepang mengatakan bahwa *Senso Jasmee*, perang dihentikan dan mereka diatur pulang dahulu nanti suatu masa perang akan dilanjutkan kembali.²⁾

Ternyata pada tanggal 21 Agustus 1945 Jepang menyerahkan pemerintahan kepada pejabat-pejabat Indonesia di Tondano kepada E.W.H. Palengkahu cs.,³⁾ kemudian di Sulawesi Tengah sebagai wilayah dari *Syu Menado*, secara diam-diam Jepang menyerahkan

1) B. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak, Peristiwa Patriotik, Pebruai 1946*, Badan Penerbit Alda Jakarta, hal. 22 - 23.

2) Informasi tertulis Abdul Rahman Lanasir dari Luwuk.

3) B. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak Peristiwa Patriotik, Pebruai 1946*, Badan Penerbit Alda, Jakarta.

kekuasaan pemerintah kepada raja-raja setempat. Untuk wilayah Poso diserahkan kepada Raja Muda W.L. Talasa dan untuk wilayah Palu Donggala diserahkan kepada Raja Banawa, Rohana Lama-rauna.

Di Luwuk secara diam-diam dibentuk Resimen persiapan Devisi IV Keris Muda Luwuk dengan pimpinan Dr. Soetaryo pada tahun 1944 ketika Husin Djuddawi alias Semmang diutus oleh *Hanarikan Kendari* meneliti kegiatan mata-mata Sekutu di Luwuk. Di bawah pimpinan komandan pasukan Ince Umar Dahlan pemuda Merah Putih Luwuk sebagai anggota Keris Muda Luwuk berhasil menawan dan melucuti satu peleton angkatan darat Jepang pelarian dari pulau Halmahera lengkap dengan senjata mitraliur dan senjata lain-lainnya. Akan tetapi dengan bermacam-macam alasan dan bujukan, oleh Jepang, akhirnya senjata yang telah dilucuti diserahkan kembali kepada pasukan Jepang dan mereka dapat meloloskan diri melanjutkan pelariannya ke Sulawesi Selatan.

Di Luwuk-Banggai secara diam-diam pimpinan pemerintahan Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Raja S.A. Amir dan penjagaan keamanan diserahkan kepada polisi orang Indonesia.

Orang-orang Jepang mulai menghilang satu persatu mengundurkan diri ke Sulawesi Selatan. Di antara mereka yang mundur ini ada seorang Jepang yang tidak disebutkan namanya sempat membisik ke telinga A.R. Lanasir: "*Indonesia Dokoritsune*". Pada mulanya bisikan ini belum disadari apa artinya oleh A.R. Lanasir. Nanti kemudian baru diketahuinya bahwa itu berarti: "*Indonesia sudah merdeka*" setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.⁴⁾

Sementara itu pada saat-saat menjelang kapitulasi Jepang maka pada tanggal 23 Oktober 1944 tokoh pejuang Gerakan Merah Putih tahun 1942 dari Luwuk yang ditawan di Manado masing-masing Ys. Monoarfa dan A. Lagonah dibebaskan bersama 13 orang tawanan dari Molibagu setelah mereka ditahan selama 2 tahun 3 bulan karena balas dendam aparat pemerintah Jepang di Luwuk yang dulunya pegawai pemerintah Belanda. Sebenarnya dari Luwuk 3 orang yang ditahan tetapi seorang di antaranya

4) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

adalah Salim Hambali Ketua PSII Balantak meninggal di dalam tahanan.

Ketika akan kembali ke Luwuk, Ys. Monoarfa dan A. Lagonah disuruh menghadap ke kantor Putera. Di kantor itu keduanya diberi penerangan mengenai maksud dan tujuan Putera dalam menghadapi janji Kemerdekaan bagi Indonesia. Di samping itu keduanya ditugaskan oleh pengurus Putera untuk membagi obat berupa kina dan lain-lain kepada rakyat yang sakit di pesisir pantai Menado.

Setelah itu keduanya diberi mandat untuk memberikan penerangan-penerangan tentang janji kemerdekaan bagi Indonesia di Gorontalo, Poso dan Luwuk. Mereka pun dibekali surat jalan supaya tidak mendapat kesulitan dari tentara Jepang dalam perjalanan. Karena hanya jalan kaki maka baru pada tanggal 29 Nopember 1944 mereka tiba di Gorontalo. Berhubung sulitnya hubungan laut maka mereka terpaksa bertahan 9 bulan lamanya di Gorontalo. Nanti awal Agustus 1945 baru ada tumpangan motor ke Poso dari Gorontalo. Demikianlah karena sulitnya perhubungan sehingga tugas yang diembannya dari Putera Manado untuk Poso dan Luwuk tak dapat dilaksanakan.

Ys. Monoarfa bersama Amin Larekeng berangkat dengan motor laut ke Poso bersama-sama dengan rombongan tentara Jepang. Karena gencarnya pesawat-pesawat pembom Sekutu datang membombom maka motor yang ditumpangi mereka itu diperlengkapi dengan senjata penangkis udara dan selama pelayaran mengambil route di kala siang berlayar sambil sewaktu-waktu bersembunyi di tanjung dengan ditutupi daun-daun kelapa menjaga kemungkinan tiba-tiba datangnya pesawat pembom Sekutu. Sehingga jarak Gorontalo-Poso ditempuh 3 hari. Selama beberapa hari di Poso mereka diberitahu secara bisik-bisik oleh *Tatusy Gunsyo* bahwa perang sudah berhenti dan 2 hari kemudian diberitahu lagi bahwa Indonesia sudah merdeka.

Sementara itu pesawat-pesawat Sekutu membuang selebaran berwarna kuning di atas Poso yang berisi pemberitahuan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan Sekutu akan datang. Mengetahui ini maka Amin Larekeng kembali ke Gorontalo untuk menyusun pertahanan bersama-sama Nani Wartabone dan teman-temannya, sedangkan Ys. Monoarfa meneruskan perjalanan ke Luwuk untuk mengorganisir pertahanan dari bekas Gerakan Merah Putih Luwuk tahun 1942 sambil berusaha merebut senjata dari

tentara Jepang.

Sesampai di Luwuk Ys. Monoarfa dipanggil oleh polisi dan dipukuli tanpa ditanyai lebih dahulu. Sesudah dipukul baru ditanyai lalu dijelaskan oleh Ys. Monoarfa bahwa Jepang sudah menyerah dan Sekutu tak lama lagi akan datang.

Mendengar penjelasan itu barulah polisi-polisi Jepang itu kaget dan oleh *Buco Kurupu* ia disuruh pulang. Ys. Monoarfa lalu menemui Ken Kanrikan Kumiya sambil memperlihatkan mandat dari Putera Manado.

Kepada Ken Kanrikan dimintanya supaya senjata-senjata tentara Jepang Luwuk diserahkan kepada pemuda-pemuda Merah Putih karena Indonesia sudah merdeka dan perlu senjata untuk mempertahankan diri terhadap Sekutu yang akan datang. Ken Kanrikan lalu merundingkan permintaan tersebut dengan kepala polisi Jepang bernama *Sakuda*. Tetapi ternyata jawaban Ken Kanrikan bahwa senjata-senjata itu harus diserahkan kepada Sekutu sebagai pertanggung jawaban. Karena gagal mendapat senjata dari Jepang dan khawatir jangan-jangan terulang lagi seperti Gerakan Merah Putih tahun 1942 di mana ada teman-teman seperjuangan disangka kawan padahal lawan maka Ys. Monoarfa kembali ke Poh mengambil keluarganya kemudian kembali ke Gorontalo untuk bergabung dengan Nani Wartabone dan kawan-kawannya di Gorontalo oleh Nani Wartabone telah dibentuk kelaskaran di tiap-tiap kampung untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Ys. Monoarfa disertai menjadi pemimpin laskar di Bonepantai (Bilungala).⁵⁾

Berita tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu cepat tersebar di Sulawesi Tengah karena pesawat-pesawat Sekutu menyebarkan dari udara. Di Palu dan Donggala selebaran-selebaran itu berbunyi agar penduduk menjauhi obyek-obyek militer Jepang dan tak lama lagi Sekutu akan datang, supaya rakyat jangan lagi membantu Jepang. Menurut Horas Siregar ada rencana Jepang untuk mengadakan pemancungan terhadap tokoh-tokoh masyarakat utamanya raja-raja sehingga sudah digali lubang-lubang panjang untuk penguburan masal tapi pemancungan itu tak jadi karena Jepang telah kalah pada Sekutu.⁶⁾

5) Informasi tertulis Yusuf Monoarfa dari Luwuk.

6) Wawancara dengan Bp. Horas Siregar di Palu pada tanggal 17 September 1979.

Di Poso pada tanggal 5 Agustus 1945 oleh Ken Kanrikan Poso diutus seorang tentara Jepang bernama *Watanabe* membawa surat rahasia untuk Bunken Kanrikan Kolonodale yang bernama *Asahi*. Dari Tomata naik seorang pelajar SD (namanya tak diingat lagi oleh informan) ikut menumpang pada oto yang dipakai oleh *Watanabe* ke Kolonodale. Berhubung hari sudah malam kendaraan tidak dapat dijalankan karena rusaknya jalan, maka mereka terpaksa bermalam pada sebuah kampung bernama Bunta yang jaraknya \pm 9 km dari Kolonodale di rumah seorang bernama Galela. Secara kebetulan pada malamnya pelajar SD itu menemukan surat rahasia yang dibawa oleh *Watanabe* dan diperlihatkannya kepada informan (Rabe Entoh) yang sama-sama menginap dengan rombongan yang akan ke Kolonodale. Oleh Rabe Entoh surat itu lalu dibuang ke dalam kakus.

Keesokan harinya baru *Watanabe* mengetahui bahwa surat yang ditugaskan kepadanya untuk membawanya sudah tak ada lagi di tempatnya. Namun demikian ia tetap ke Kolonodale menemui Bunken Kanrikan melaporkan kehilangan surat tersebut. Mengetahui kehilangan surat tersebut Bunken Kanrikan *Asahi* lalu mengerahkan semua pegawai bangsa Indonesia yang ada di Kolonodale ke Bunta untuk mencari surat yang hilang itu. Namun tetap surat itu tak ditemukan maka Rabe Entoh ditangkap dan dengan tangan diborgol ia dimasukkan ke sel Kempetai Kolonodale. Di sel itu ia disiksa dan apabila makanan diberikan kepadanya dengan memakai tempurung maka ia terpaksa membungkukkan badan menghirup makanan karena tangannya dua-dua diikat di belakang.

Pada tanggal 8-8-1945 karena tak terbukti kesalahannya sebab ia tetap merahasiakan surat yang dibuangnya itu, ia lalu dikeluarkan dari sel dengan pesan supaya jangan mendendam.⁷⁾ Setelah Jepang menyerah maka mereka tenang menanti datangnya Sekutu sambil itu mereka hanya menjaga keamanan tidak mencampuri lagi urusan pemerintahan. Sebagian lagi tentaranya yang ada di Sulawesi Tengah ditarik ke Poso lalu ke Sulawesi Selatan melalui jalan raya yang dibuat pada Zaman Jepang dari Poso ke Palopo di Sulawesi Selatan.

7) Wawancara dengan Bp. Rabe Entoh di kampung Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso, tanggal 15 Oktober 1979.

Di Toli-Toli pada masa awal proklamasi kemerdekaan rakyat tak mengetahuinya. Karena seringnya mendapat pemboman Sekutu maka rakyat berpencaran menyingkir ke desa-desa di luar Toli-Toli. Sekitar pertengahan bulan Oktober 1945 Mohammad Mahmud dan Ahmad Mahmud datang dari Gorontalo diutus oleh Nani Wartabone membawa bendera Merah Putih ke daerah Buol. Bendera tersebut dikibarkan di Leok selama kurang lebih 3 minggu.

Di Buol ketika itu masih ada satu kompi tentara Jepang dipimpin oleh Tanaka lengkap persenjataannya. Mereka mengambil pertahanan di Air Tenang. Untuk keperluan mereka maka hewan-hewan, makanan dan milik rakyat mereka rampas menyebabkan timbulnya kemarahan rakyat.

Berita proklamasi kemerdekaan di daerah Sulawesi Tengah mula-mula terdengar dan diketahui oleh tokoh-tokoh pejuang di Poso dari pemberitaan orang Jepang sendiri.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 di atas daerah Poso pesawat-pesawat Sekutu menyebarkan pamflet berwarna kuning berisikan pemberitahuan dengan huruf-huruf besar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Tetapi tidak semua pamflet itu sampai ke tangan rakyat karena Jepang dan kakitangannya mengumpulkan pamflet-pamflet tersebut dan rakyat diserukan supaya jangan percaya pada isinya. Oleh kepala Kampung Malei (bagian kerajaan Tojo) bernama Abu Maloco, secara rahasia selebar dari pamflet itu dikirimkan kepada Abdul Latief Mangitung di tempat persembunyiannya di atas kampung Malei karena ia menjadi buronan polisi Jepang sejak peristiwa Gerakan Merah Putih tahun 1942 di Ampana-Tojo.

Setelah membaca isi pamflet tersebut Abdul Latief Mangitung berangkat ke Poso pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mengetahui dari dekat situasi yang sebenarnya dan bermalam di rumah salah seorang anggota Gerakan Merah Putih tahun 1942 yang bernama Lanokang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kira-kira jam 15.00 sore Abdul Latief Mangitung dikunjungi di tempat penginapannya oleh seorang perwira Jepang yang dikawal oleh dua orang anggota *Heiho* asal Sulawesi Selatan bernama Saleh Topetau dan Djafar. Perwira Jepang itu mengatakan bahwa "*bangsa Indonesia sudah merdeka*". Mula-mula berita ini dikira hanya pancingan Jepang terhadapnya maka tak berani menanggapi.

Baru setelah 2 orang *Heiho* membenarkan berita itu dengan menyatakan bahwa mereka berduapun langsung mendengar berita proklamasi dari radio milik Jepang sewaktu mereka sedang bertugas, barulah berita itu diyakini kebenarannya.⁸⁾

Sementara itu dari keterangan I Latanco Talamoa diperoleh penjelasan bahwa berita proklamasi diketahuinya dari seorang tentara Jepang kenalan baiknya bernama *Nakamuta* dari Angkatan Darat.

Setelah mendengar dari radio tentang proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Nakamuta buru-buru ke rumah I Latanco Talamoa dan berkata; "Jepang sudah kalah, tapi Indonesia sudah merdeka menghadapi Beranda. Beranda, Amerika ganti Jepang." Ketika I Latanco Talamoa bertanya: "Mengapa begitu?" Dijawab oleh tentara Jepang tersebut: "Ada berita dari Batavia, Indonesia ada proklamasi kemerdekaan melalui radio oleh Soekarno-Hatta".⁹⁾

Menurut catatan harian dari R.G. Ratupamusu, tidak lama sesudah berita proklamasi didengar di Poso, maka pada tanggal 25 Agustus 1945 tibalah di Poso utusan Gubernur Sulawesi Dr. G.S. S.J. Ratulangi dari Makassar melalui jalan darat dari Palopo ke Poso.

Utusan tersebut adalah A.N. Hajarati dan Hamzah Ilahude untuk membentuk Pemerintahan Nasional di Poso serta memberi penerangan tentang telah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada saat kedatangan A.N. Hajarati dan Hamzah Ilahude inilah bendera Merah Putih dinaikkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diadakanlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk pimpinan-pimpinan partai politik. Pertemuan dihadiri ± 40 orang tokoh/pemimpin masyarakat setempat di mana pada kesempatan itu diberikan penjelasan tentang Proklamasi Kemerdekaan dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan tersebut.

Pada pertemuan itu pula dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional dan diangkat sebagai kepala Pemerintahan Nasional untuk wilayah Poso adalah Wongko Lemba Talasa. Untuk Dewan Pertahanan Nasional dipilih Ibrahim Muhammad

8) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

9) Wawancara dengan I Latanco Talamoa di kampung Lombogia, Kecamatan Poso Kota, tanggal 18 Oktober 1979.

selaku ketuanya. Dan sebagai delegasi/utusan ke Palu untuk membawa dokumen propaganda Merah Putih/lambang Merah Putih dipilih R.G. Datupamusu.

Ada 9 (sembilan) dokumen/surat yang harus dibawanya ke Palu masing-masing untuk: raja Parigi, Tagunu; raja Tawaeli, Lamakampali; raja Palu, Janggola; raja Banawa; Rohana Lamarauna; raja Biromaru Lamasaera; raja Kulawi, Djiloi; raja Moutong, Kuti Tombolouutu; Kepala Pemerintahan Negeri Palu, Tjatjo Ijazah dan kepala polisi di Palu. ¹⁰⁾

Menyusul pada bulan Nopember 1945 tiba lagi utusan Pemuda Republik Indonesia (PRI) dari Palopo ke Poso melalui jalan darat. Utusan tersebut terdiri dari M. Landau selaku pimpinan rombongan, bersama Umar Abdullah dan Nur Apala. Tujuannya ke Sulawesi Tengah untuk membentuk Cabang PRI di Poso sambil mengadakan pertemuan/rapat untuk membeikan penerangan tentang proklamasi kemerdekaan dan tugas-tugas bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu.

Dari Poso M. Landau dengan rombongannya ke Ampana, Bunta dan Pagimana.

Di Ampana raja meminta M. Landau dan kawan-kawannya memberikan penerangan kepada rakyat Ampana dan sekali gus mengibarkan bendera Merah Putih.

Pada saat M. Landau dan kawan-kawan tiba di Bunta mereka disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat. Begitu pula ketika mereka tiba di Pagimana mereka mendapat kesan tokoh-tokoh politik dan masyarakat di tempat itu memang telah memiliki kesadaran dan jiwa nasionalisme yang telah mendalam karena sudah mengalami perkembangan sejak zaman Belanda sampai saman Jepang.

Makanya kedatangan M. Landau dan kawan-kawan disambut dengan gembira dan hangat oleh masyarakat di tiga tempat tersebut. Dalam setiap rapat-rapat umum yang diadakan di tiga tempat itu bendera Merah Putih dinaikkan, diiringi lagu Indonesia Raya. ¹¹⁾

Mengenai sikap Jepang terhadap ini semua, mereka hanya diam saja. Hanya saja ketika pemuda-pemuda meminta senjata

10) Catatan harian R.G. Datupamusu dari Ampana, Kabupaten Poso.

11) H.M. Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, halaman 144-145.

Jepang tak memberikannya dengan alasan senjata-senjata itu harus diserahkan kepada Sekutu sesuai instruksi dari atasannya. Namun demikian di Poso Jepang tidak melarang pemuda mengambil senjata yang sudah terkumpul sambil mengatakan: "*Indonesia senjata boleh curi-curi.*"

Jadi tak terjadi perampasan senjata pada Jepang oleh pemuda di daerah Poso. Demikian pula Jepang tak pernah menyerahkan begitu saja senjata-senjata kepada pemuda. Tapi Jepang juga tak menghalangi pemuda-pemuda yang mengambil senjata secara diam-diam/sembunyi-sembunyi.

Pada waktu itu pimpinan pemuda di kota Poso adalah Sidik Utina, Yakob Lamadjuda dan W.L. Talasa.

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

Setelah PPKI menetapkan UUD 1945, ketuanya membentuk satu panitia kecil yang ditugaskan menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah RI. Panitia kecil ini diketuai oleh Otto Iskandardinata dengan anggota-anggotanya Mr. Subarjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Dr. Amir, Hamindan, Dr. Ratulangi dan Mr. Puja. Keesokan harinya Panitia kecil ini menyampaikan usul-usulnya. Ada 4 masalah yang perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah, yaitu urusan rakyat, hal pemerintahan daerah (kepangrehprajaan) pimpinan kepolisian dan tentara kebangsaan. Mengenai urusan pemerintahan daerah, dalam garis besarnya diajukan usul-usul antara lain sebagai berikut :

Daerah-daerah Indonesia lainnya dijadikan 4 gubernemen, yaitu Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. *Gubernemen* dikepalai oleh seorang Gubernur atau Mangkubumi yang untuk sementara oleh KND. ¹²⁾

Sebagai Gubernur Sulawesi Pertama oleh pemerintah pusat ditunjuk Dr. G.S.S.J. Ratulangi dan sebagai ibu kota propinsi adalah Makassar. Sulawesi Tengah sebagai salah tau wilayah dari Propinsi Sulawesi pada masa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan.

12) The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Penerbit Karya Kencana, Yogyakarta, hal. 12 - 13.

Setelah Gubernur Dr. Ratulangi tiba di Makassar maka dikirimnyalah utusan-utusan ke seluruh wilayah propinsi Sulawesi untuk menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan dan untuk membawa siaran-siaran tertulis dari Gubernur Sulawesi. Di antara utusan-utusan tadi membawa :

1. Sebuah teks Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Surat Anjuran untuk mempertahankan kemerdekaan.
3. Surat keputusan pertemuan raja-raja se Sulawesi Selatan bertempat di rumah Arumpone di Jongaya yang memutuskan tak mau dijajah lagi.

Pernyataan tetap setia kepada Republik Indonesia dan akan tetap mempertahankan Republik Indonesia.¹³⁾

1. Sikap Pasukan Jepang

Setelah mulai tersiarnya berita proklamasi di daerah Sulawesi Tengah, maka pasukan-pasukan Jepang yang dikumpulkan di Poso dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah untuk mundur ke Sulawesi Selatan, tak memperlihatkan reaksi apa-apa. Kecuali di Poso di mana Dewan Pemerintahan Nasional setelah datangnya utusan Gubernur Sulawesi A.N. Hajarati, maka daerah-daerah lainnya kekuasaan pemerintahan berada di tangan raja-raja setempat. Begitu pimpinan tentara Jepang di Sulawesi Tengah mengetahui rajanya *Tenno Heika* sudah menyerah pada Sekutu maka mereka menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada orang Indonesia sendiri dalam hal ini kepada raja-raja. Di Luwuk Jepang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada raja Sukuran Amiruddin Amir, di Poso kepada W.L. Talasa dan di Palu kepada raja Banawa Rohana Lamarauna.

Di daerah Sulawesi Tengah di mana terdapat tokoh-tokoh ex Gerakan Merah Putih 1942 yang selama pemerintahan Jepang ada yang ditangkap dengan tuduhan mata-mata musuh, malah sampai ada yang dipancarkan di muka umum, ada yang mengambil siasat bekerja sama dengan Jepang dan ada pula yang pasif jadi pekerja swasta, begitu mendengar kekalahan Jepang dan akan datangnya Sekutu, mulai bangkit kembali untuk mengumpulkan teman-teman seperjuangannya tahun 1942 dan menggalang ke-

13) Kementerian Penerangan R.I., *Buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, hal. 24.

kuatannya kembali untuk menghadapi kemungkinan datangnya Sekutu dengan dugaan pasti Belanda akan kembali menjajah karena Belanda masuk dalam barisan Sekutu.

2. Hambatan-Hambatan

Dengan semangat tinggi tokoh-tokoh pergerakan yang telah dibekukan kegiatannya selama zaman Jepang, mulai mengadakan konsolidasi pergerakannya lagi, menghubungi teman-teman seperjuangannya dari zaman akhir penjajahan Belanda tahun 1942, namun mereka terbentur pada ketiadaan senjata/perengkapan kecuali semangat dan senjata tajam seperti keris, tombak dan sumpit.

Beberapa orang tokoh pemuda mendesak pada Jepang untuk diberi senjata tapi Jepang dengan tegas menolaknya karena mereka mendapat instruksi bahwa hanya kepada Sekutu saja mereka dapat menyerahkan senjata-senjata itu. Hanya dengan cara mencuri-curi maka pasukan pemuda di Poso dapat memiliki beberapa pucuk senjata api/senapan ex senjata Jepang. Di samping itu hambatan lainnya pun datang dari sebagian raja-raja sendiri yang bersikap ragu-ragu pada proklamasi dan kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan. Pada umumnya raja-raja malah menanti datangnya Belanda kembali. Begitu pula sikap pegawai-pegawai pemerintahan lainnya bekas pegawai Belanda yang kembali memegang jabatannya pada zaman Jepang. Juga para bekas-bekas KNIL yang menjadi *Jumpo* (polisi Jepang) ketika mengetahui kalahnya Jepang lalu mengambil inisiatif sendiri mengkonsolidasi pasukannya kembali untuk menunggu datangnya tentara *Sekutu/NICA*. Karena mereka-mereka itu memegang senjata maka terpaksa pejuang-pejuang yang hendak mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 harus bertindak hati-hati dan secara rahasia karena pengawasan keamanan diambil alih oleh bekas-bekas KNIL ini dari tangan Jepang selama menanti datangnya Sekutu.

3. Partisipasi Masyarakat

Setelah terdengarnya berita bahwa Indonesia sudah merdeka, maka pada umumnya rakyat menyambutnya dengan gembira. Akan tetapi karena banyak bekas-bekas *Jumpo* dari ex KNIL yang menjadi petugas keamanan, maka terpaksa rakyat hanya saling memberi tahu satu sama lain secara berbisik-bisik bahwa bangsa

Indonesia telah merdeka.

Antara rakyat satu sama lainpun tidak bersifat terbuka, karena suasana peralihan di mana belum dapat diketahui siapa kawan dan siapa lawan.

Seperti halnya di Palu, menurut Haji M. Sanusi Patimbang, sebelum datangnya NICA maka terjadi penangkapan masal di pasar Palu terutama warga yang berasal dari Sulawesi Selatan karena kedapatan menyimpan lencana Merah Putih di bagian dalam kopiahnya. Oleh karena itu mereka hanya menggunakan kode saling menggosokkan atau menyusun jari telunjuk dan jari tengah seperti menjepit rokok apabila saling bertemu satu sama lain, sebagai kode dwi warna, merah putih.

Jika diacungkan kode itu dan tidak dibalas dengan cara yang sama berarti itu bukan kawan. ¹⁴⁾

Dapat dikatakan rakyat terbagi dua, ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Yang kontrak disebabkan karena ketidak tahuannya di samping karena memang telah dipengaruhi dan masuk pengikut-pengikut raja yang memihak kepada Belanda.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN PERJUANGAN BERSENJATA DI DAERAH

Di Poso pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, maka pada sore harinya beberapa orang tokoh pejuang bekas Gerakan Merah Putih 1942 telah mengetahuinya dari pemberitahuan orang-orang Jepang sendiri. Tokoh-tokoh tersebut adalah Abdul Latief Mangitung, I Latanco Talamoa dan Yusuf Monoarfa. Setelah Yusuf Monoarfa yang baru pulang dari Menado melalui Gorontalo ditahan selama 2 tahun 3 bulan di penjara Menado oleh Jepang, semasih berada di Poso mendapat bisikan dari *Tataisy Gunsyo* bahwa Indonesia sudah memproklamlirkan kemerdekaannya dan berita tentang menyerahnya Jepang diketahuinya dari *pamflet-pamflet* yang dijatuhkan dari pesawat sekutu.

Mengetahui hal tersebut maka Ys. Monoarfa buru-buru hendak kembali ke Luwuk dengan maksud akan mengaktifkan lagi bekas

14) Wawancara dengan Haji M. Sunusi Patimbang di Palu, tanggal 26 Desember 1979.

anggota-anggota Gerakan Merah Putih 1942 untuk dibentuk menjadi laskar yang akan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan apabila Sekutu/Belanda kembali menjajah. Sebelum kembali ke Luwuk lebih dahulu Ys. Monoarfa menemui *Thaico Kempetai Jepang* untuk memberitahukan kepulangannya ke Luwuk.

Oleh *Taicho Kempetai Ys. Monoarfa* diberi beberapa lembar kain panjang serta beberapa meter kain cita serta sepucuk pistol bersama pelurunya. Dengan naik oto yang kebetulan mau ke Ampana ia menuju Ampana lalu disambung dengan memakai perahu ke Bunta.

Setiba di Bunta ia lalu menemui teman seperjuangannya dalam Gerakan Merah Putih 1942 yang bernama S.H. Bunai. Kepada S.H. Bunai diceritakannya apa yang telah diketahuinya di Poso bahwa Nippon sudah menyerah. Sekutu akan datang berarti Belanda akan kembali lagi menjajah dan kemerdekaan sudah diproklamkan. Dimintanya agar S.H. Bunai mengkoordinir pejuang-pejuang Gerakan Merah Putih 1942 di Bunta untuk disusun kembali menjadi pasukan-pasukan yang akan mempertahankan kemerdekaan. Untuk persenjataan pasukan-pasukan itu Ys. Monoarfa akan terus ke Luwuk guna meminta senjata dari Jepang. Sebelum ke Luwuk S.H. Bunai dan Ys. Monoarfa menemui *Nakamisi Nippon* yang berkedudukan di Bunta untuk memperlihatkan mandat dari Putera yang dibawanya dari Manado untuk dilaksanakan tugas Putera itu di Bunta tetapi oleh *Nakamisi* ia dianjurkan ke Luwuk lebih dahulu menemui Ken Kanrikan Kumiya. Namun setelah tiba di Luwuk ia langsung dipukuli oleh polisi-polisi Jepang tanpa ditanyai lebih dahulu. Setelah disiksa barulah ia dilepaskan. Akan tetapi setelah maksud Ys. Monoarfa untuk meminta senjata Jepang guna mempersenjatai pemuda-pemuda Merah Putih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda apabila kembali mau menjajah ternyata ditolak oleh Ken Kanrikan dengan alasan senjata-senjata itu harus diserahkan kepada Sekutu maka Ys. Monoarfa lalu kembali menjemput keluarganya di Poh dan seterusnya kembali ke Gorontalo bergabung dengan pasukan Nani Wartbone. Di Gorontalo ia disertai tugas menjadi komandan laskar di bagaian Bonepantai (Bilungala).¹⁵⁾

15) Informasi tertulis Yusuf Monoarfa dari Luwuk.

Pembentukan kelaskaran di Poso adalah sebagai berikut : Setelah Abdul Latief Mangitung didatangi oleh seorang perwira Jepang bersama 2 orang anggota *Heiho*, pada tanggal 17 Agustus 1945 sore kira-kira jam 15.00 yang memberitahukan bahwa Indonesia telah memproklamlirkan kemerdekaannya di Jakarta pada pagi harinya, maka Abdul Latief Mangitung lalu memprakarsai pertemuan antara tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih 1942 dan mengundang pula 2 orang *Heiho* yang bernama Saleh Topetau dan Jafar. Pertemuan itu dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945 malam bertempat di rumah Lanokang di kampung Sayo, Poso, yang juga merupakan tempat menginapnya Abdul Latief Mangitung.

Yang hadir dalam pertemuan itu adalah :

- 1) Abdul Latief Mangitung.
- 2) Yap Soei Ciong.
- 3) R. Mangolo
- 4). A.L. Pangemanan.
- 5) Tosayang.
6. Saleh Topetau (*Heiho*)
- 7) Jafar (*Heiho*)

Pertemuan tersebut menghasilkan terbentuknya Organisasi Laskar Tanjubulu dengan susunan personalianya :

1. Abdul Latief Mangitung, Komandan Laskar Tanjumbulu.
2. *Yap Soei Ciong*, Wakil Komandan Laskar Tanjumbulu.
3. A.L. Pangemanan, Kepala Staf.
4. R. Mangolo, Wakil Kepala Staf merangkap urusan Personalialia.
5. Tosayang, Kepala Bagian Perlengkapan.
6. Saleh Topetau, Komandan Pasukan Tempur.
7. Jafar, Bagian Persenjataan.
8. Lapasondrong, Pemasak/Kesejahteraan.
9. Lanokang, Penghubung.

Sebagai markas induk Pasukannya adalah kampung Malei.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Soleh Topetau dan Jafar datang melapor pada komandan laskar bahwa ia telah berhasil mengambil dan menyembunyikan 5 pucuk *karabijn Jepang* dan beberapa granat tangan. Senjata itu ditanam di kuburan Cina dan dijaga oleh Maleda seorang suku Mandar.

Untuk menggalang kembali kekuatan dari bekas pasukan Gerakan Merah Putih tahun 1942 di daerah Poso lainnya serta untuk menyebar luaskan berita proklamasi, maka pada tanggal 20 Agustus 1945 Abdul Latief Mangitung mulai mengadakan perjalanan keluar dari kota Poso. Daerah-daerah yang dikunjungi adalah :

- 1) Pusat Markas Induk di kampung Malei dan tokoh yang dihubungkannya di tempat itu untuk mengkoordinir pasukan adalah Mohammad Amin Dahlan.
- 2). Pusat Gerakan Merah Putih 1942 Tojo/Ampana dan tokoh yang dihubungkannya ialah R.G. Datupamusu dan Abu Saleh Tanjumbulu (putera raja Tanjumbulu yang dipancing oleh Jepang di Poso).
- 3) Wilayah Kecamatan Bunta, di tempat itu ia menghubungi Haji Sanusi Manganco, Baba Hamzah dan Lamusa.
- 4) Wilayah Kecamatan Pagimana-Luwuk dan menghubungi A.R. Lanasir dan Laicu Lanasir.

Abdul Latief Mangitung tiba di Pagimana pada tanggal 27 Agustus 1945.

Kebetulan di Luwuk/Pagimana memang telah terbentuk *Laskar Persiapan Resimen dari Divisi IV Keris Muda Luwuk* pada masa-masa akhir pendudukan Jepang. Pembentukannya dilakukan setelah tibanya Husin Djuddawi yang memakai nama samaran Semmang seorang tokoh Keris Muda dari Mandar (Sulawesi Selatan) di mana kedatangannya ke Luwuk adalah karena penugasan Jepang untuk menyelidiki kegiatan mata-mata Sekutu pada masa-masa menjelang menyerahnya Jepang. Kesempatan ke Luwuk ini dipergunakan oleh Husin Djuddawi alias Semmang untuk menghubungi tokoh-tokoh bekas Gerakan Merah Putih 1942 Luwuk yang di antaranya bekerja pada Jepang selaku polisi-polisi Jepang seperti A.R. Lanasir, Abdul Azis Larekeng. Juga A.G. Mambu, Dr. Soetaryo dan lain-lain dihubungkannya. Persiapan Resimen dari Divisi IV Keris Muda Luwuk itu, antara lain menyusun personalianya sebagai berikut :

- 1) Dr. Soetaryo, sebagai Komandan Resimen.
- 2) Abdul Rahman Lanasir, Wakil Komandan Resimen.
- 3) Abdul Azis Larekeng, Kepala Staf.
- 4) T.S. Bullah, Kepala Bagian I.
- 5) Abdurrahman, Kepala Bagian II.
- 6) S.A. Amir, Bagian III
- 7) Abdul Kadir, Bagian IV.

8) A.G. Mambu, Bagian V.

Pusat dari Keris Muda ini adalah di mandar dengan Panglimanya *Ibu Depu* atau dikenal juga dengan sebutan *Ibu Agung*, seorang tokoh pejuang wanita dari Mandar yang rela bercerai dengan suaminya raja Balanipa karena suaminya itu bekerja sama dengan Belanda/NICA.

Antara lain kegiatan dari Keris Muda Luwuk adalah melucuti senjata dari satu peleton tentara Jepang pelarian dari Halmahera yang singgah di Luwuk dalam perjalanan mundurnya menuju ke Sulawesi Selatan. Akan tetapi karena kalah siasat maka senjata yang telah direbut itu akhirnya diambil kembali oleh Jepang dan mereka berhasil meloloskan diri ke Sulawesi Selatan.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1945 bertempat di sekolah Islamiyah Bunta setelah datangnya Abdul Latief Mangitung dari Poso maka diadakanlah pertemuan antara tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih Luwuk tahun 1942 dengan pimpinan Resimen Keris Muda Luwuk. Yang hadir dalam pertemuan di antaranya adalah A.R. Lanasir, S. Kirdiat, Joseph Siwy, Haji Sanusi Manganco. Pertemuan itu kemudian disusul dengan mengadakan rapat raksasa di lapangan depan kantor *Gunco* Bunta dihadiri oleh pemuda-pemuda dan masyarakat setempat. Pada rapat tersebut berbicara tokoh-tokoh S. Kirdiat, A.R. Lanasir, Joseph Siwy dan sebagai protokol adalah A. Tapo. Pada umumnya pembicara-pembicara menyerukan dan memompakan semangat perjuangan pada pemuda-pemuda agar bersatu mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan diakhiri dengan mengucapkan sumpah setia bersama-sama pada proklamasi dan sang saka Merah Putih. Kepada para hadirin dibagi-bagikan lencana merah putih untuk dipakai. Dan dibentuklah barisan Gerakan Merah Putih di tempat itu sebagai bagian dari pasukan Keris Muda, dengan pimpinan-pimpinan diambil dari tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih 1942 seperti T.S. Bullah, S.H. Bunai(Gunco Bunta), Hasan Dahlan, S.P. Makaraw, M.A. Makaraw dan Noho Buato.

Di kota Luwuk sendiri Dr. Soetaryo sebagai komandan Resimen Keris Muda Luwuk bersama-sama S. A. Amir, S. Kirdiat, Abdul Azis Larekeng, Djakaria Agama, E.A. Musa, S. Datu Alam, Hasan Dahlan dan lain-lain menggalang pemuda-pemuda menyusun barisan pertahanan sebagai bagian dari laskar Keris Muda. Pun bekas-bekas polisi Jepang (Jumpe) di bawah pimpinan Ince Umar Dahlan, J.J. Tullar, Nasir Lahay dan Joseph Siwy berke-

kuatan + satu kompi bermarkas di asrama polisi Luwuk dialihkan menjadi polisi Merah Putih dan dikoordinir sebagai bagian dari Divisi IV Keris Muda Luwuk.

Diadakanlah latihan-latihan pada pemuda-pemuda di samping mengadakan penerangan-penerangan kepada seluruh lapisan masyarakat disertai *show of force* pemuda-pemuda Merah Putih dipimpin oleh Djakaria Agama.¹⁶⁾

Setelah Abdul Latief Mangitung tiba kembali di Poso pada tanggal 7 September 1945 maka kemudian ia mengunjungi Palu melalui Parigi. Di Palu tokoh-tokoh yang dikunjunginya adalah Haji M. Yoto Daeng Pawindu, M. Sunusi Patimbang. Yang terakhir ini sebenarnya pada tahun 1942 berada di Luwuk dan ikut dalam Gerakan Merah Putih 1942. Kepada kedua orang yang dihubungi di Palu itu dimintakan untuk mengkoordinir barisan muda sebagai bagian dari Laskar Tanjumbulu Poso untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan Sekutu dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan bendera Merah Putih apabila Belanda kembali mau menjajah lagi.

Anjuran dari Abdul Latief Mangitung oleh kedua orang tokoh di Palu diterima dan didukung sepenuhnya dan pada tanggal 17 September 1945 Abdul Latief Mangitung kembali ke Poso melalui Parigi.

Sementara itu wakil komandan Laskar Tanjumbulu *Yap Soei Ciong* telah menghubungi pula Lae di Pendolo dan D. Daud di Tentena di mana ke dua tempat itupun terbentuk kesatuan laskar yang siap menunggu komando walaupun hanya memiliki senjata-senjata seperti keris, parang dan tombak.

Di Donggala berita proklamasi pun mulai terdengar oleh masyarakat dan tokoh-tokoh pergerakan di tempat itu tetapi siapa yang pertama kali menyebarkan atau menyampaikannya tak ada satu informasipun yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Berbeda halnya dengan di Poso di mana berita proklamasi diketahui pada tanggal 17 Agustus 1945 sore karena disebarkan oleh orang Jepang sendiri yang bernama Nakamuta (dari angkatan darat) serta 2 orang *Heiho* yaitu Seleh Topetau dan Jafar.

Seperti halnya di tempat lain di Sulawesi Tengah sambutan

16) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

masyarakat setempat di Donggala atas berita proklamasi ini terbagi dua: ada yang pro dan ada yang kontra. Oleh rakyat yang pro dengan tokoh-tokoh pimpinannya lalu segera mengusahakan kontak dengan pejuang-pejuang di Wani, Tawaeli, Palu, Biromaru, Kaleke, Bambaira (Keris Muda) untuk mengadakan kerja sama dan saling membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sementara Alwi Muhammad dan Muhammad Amu (*Klerk pada kantor Ken Kanrikan Donggala*) sibuk menyusun program perjuangan tiba-tiba datanglah Alexander Monoarfa kira-kira medio September 1945 yang ketika itu sebagai kepala kantor *Minsen Unkookai* (kepala bagian pelayaran perahu) di Donggala, dari Ujung Pandang membawa petunjuk-petunjuk dan program perjuangan.

Dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk dan program yang dibawa dari Ujung Pandang (Makassar) itu, maka mulailah pejuang-pejuang di Donggala menyusun dan membentuk *Barisan Gerakan Merah Putih*.

Atas anjuran Alexander Monoarfa maka pada tanggal 21 September 1945 oleh Alwi Muhammad, Mohammad Amu dan kawan-kawan mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan di kampung Ganti (\pm 5 km dari kota Donggala). Dalam pertemuan itulah dihasilkan suatu bentuk organisasi perjuangan yang dinamai Gerakan Merah Putih dengan susunan pengurusnya :

- 1) Pelindung : Rohana Lamarauna (Raja Banawa).
- 2) Ketua Umum : Alwi Muhammad (Penilik Sekolah di Donggala).
- 3) Wk. Ketua Umum : Mohammad Amu.
- 4) Sekretaris : Alexander Monoarfa. Monoarfa.
- 5) Wakil Sekretaris : Udin Muhammad.
- 6) Bendahara : Abdul Wahid Maluku.
- 7) Pembantu-pembantu : A. Muhammad, Umar Papeo, A.T. Nurdin dan L.D. Lamarauna.
- 8) Pembantu Khusus : Andi Raga Pettalolo.

Kepada semua anggota Gerakan Merah Putih diberi lencana Merah Putih berukuran 2 x 3cm sebagai tanda pengenal dan sebagai kode dipergunakan salam 2 jari selaku simbol merah putih (dwi warna). Menyusul pula menggabungkan diri dalam Gerakan Merah Putih seluruh ex anggota *Seinendan* Limboro yang dipimpin oleh Abdul Wahid Maluku dan Labaci serta ex *Seinendan* Towale di bawah

pimpinan *Mislaini Laujeng* dan Abubakar.

Kesemua aktivitas Gerakan Merah Putih di Donggala ini baru pada taraf persiapan dalam bentuk organisasi politik karena mereka belum memiliki senjata. Tiba-tiba pada akhir bulan September 1945 Alexander Monoarfa ditangkap oleh kesatuan KNIL yang telah mengkonsolidasi diri dan mengambil alih tugas keamanan dari Jepang, lalu dipenjarakan di tangsi militer Palu. Penangkapan atas diri Alexander Monoarfa merupakan suatu pukulan bagi Gerakan Merah Putih yang belum dapat berbuat apa-apa karena belum memiliki senjata sehingga pada dasarnya masih pada taraf perjuangan segi politik.

Pemuda Umar Papeo yang juga merupakan bekas polisi Jepang lalu merencanakan mencari senjata untuk dipergunakan menyerang tentara KNIL supaya A. Monoarfa dibebaskan tetapi belum sempat terlaksana tiba-tiba pada awal Nopember 1945 datanglah Piola Isa dengan nama samaran Abdul Gani bersama 3 orang kawannya dari Sulawesi Selatan melalui Pare-Pare, Majene, Mamuju, Pasangkayu membawa instruksi dari Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi dan beberapa dokumen penting dari Maradia-Maradia Mandar yang menentang kembalinya Belanda di samping beberapa petunjuk cara-cara pembentukan kelaskaran.

Untuk kedua kalinya diadakan lagi pertemuan pada tanggal 7 Nopember 1945 di kampung Duyu (Ganti) oleh Muhammad Amu dan Umar Papeo dan kawan-kawan, pertemuan mana menghasilkan terbentuknya Laskar Pemuda Indonesia Merdeka (LPIM) dengan susunan personalianya :

- 1) Pelindung dan Pemimpin Umum : Rohana Lamarauna.
- 2) Wakil Pemimpin Umum I : Alwi Muhammad.
- 3) Wakil Pemimpin Umum II : Mohammad Amu.
- 4) Pemimpin Staf Umum : Umar Papeo.
- 5) Wakil Pemimpin Umum I : Piola Isa alias Abdul Gani
- 6) Wakil Pemimpin Umum II : A.T. Nurdin.
- 7) Pimpinan Staf I : Alexander Monoarfa.
- 8) Pemimpin Staf II : Andi Baro Lamarauna.
- 9) Pemimpin Staf III : Andi Ngaru Pettalolo.
- 10) Pemimpin Staf IV : Abdul Wahid Maluku.
- 11) Pemimpin Staf V : Lagama Borahima.
- 12) Ajudan Pemimpin Umum : Yusuf Isa.
- 13) Ajudan Wakil Pem. Umum I : Udin Muhammad
- 14) Ajudan Wakil Pem. Umum II : Bakir.

Dengan adanya dua bentuk organisasi perjuangan di Donggala pada waktu itu pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus 1945 namun caranya bergerak berbeda.

Gerakan Merah Putih bergerak di bidang politik sedangkan Laskar Pemuda Indonesia Merdeka (LPIM) bergerak di bidang kelas-karan.¹⁷⁾

Walaupun telah terbentuk organisasi-organisasi kelaskaran di berbagai tempat di Sulawesi Tengah pada awal-awal Revolusi Fisik setelah proklamasi 17 Agustus 1945 akan tetapi karena situasi yang serba darurat, sukarnya komunikasi dan belum terselenggarakannya administrasi yang teratur, maka seringkali ditemui masalah jabatan dan kedudukan dalam kelaskaran tersebut terdapat kesimpang siuran.

Sering-sering penunjukkan jabatan dan kedudukan berupa pemberian mandat, sering pula berupa pemberian perintah secara lisan malah ada pula secara penunjukkan langsung yang tidak menentu, kadang-kadang dalam keadaan darurat jabatan atau kedudukan anggota-anggota lainnya diambil alih mengikuti situasi yang datangnya tiba-tiba atau berubah secara mendadak.¹⁸⁾

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH

Di Donggala dan Palu setelah Jepang menyerah, maka polisi-polisi Jepang yang dulunya anggota KNIL lalu mengambil alih kekuasaan dari Jepang di bidang penjagaan keamanan, sambil menanti datangnya Sekutu.

Di Palu mereka dipimpin oleh seorang Jumbo yang bernama *Koenen ex Sersan KNIL*.

Pasukan Sekutu yang datang di daerah Sulawesi Tengah adalah pasukan Australia dan dibelakangnya ikut membonceng tentara NICA.

Di Sulawesi Tengah bagian barat pada bulan September 1945 datang dari Tarakan dan Balikpapan 2 regu *LOC (Leger Organisation Centrale)* dengan kapal motor (BO) bernama "*Beatrix*" untuk mengadakan kontak dengan bekas-bekas KNIL tersebut. Di Toli-Toli mereka menurunkan satu regu LOC dipimpin oleh

17). Informasi tertulis A.T. Nurdin dan Abdul Wahid Maluku dari Donggala.

18). Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

Sersan Mayor *De Vree*.

Di Palu *LOCI* yang datang dari Balikpapan itu mengaktifkan kembali ± 25 orang ex KNIL kemudian mereka dibawa ke Manado untuk penyusunan kembali sebagai pasukan tentara Belanda. Bersama raja-raja setempat di Donggala - Palu dan sekitarnya *LOC* ini membentuk pemerintahan darurat *NICA* di Sulawesi Tengah bagian Barat. ¹⁹⁾

Di Sulawesi Tengah bagian Timur pasukan tentara Sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di pelabuhan Poso pada tanggal 1 Nopember 1945 menurunkan bekas Asisten Residen terakhir di Poso sebelum zaman Jepang, bernama *Rijsdijk* dengan beberapa orang Belanda lainnya dikawal oleh satu regu tentara *NICA*.

Sebenarnya para pemuda Poso yang berjiwa republikan dipimpin oleh Sidik Utina, pimpinan Pemuda PNI dan Yakob Lamadjuda (keduanya bekas *HEIHO*) mau mengadakan perlawanan terhadap datangnya kembali penguasa Belanda itu karena mereka telah memiliki banyak senjata hasil pencurian dari Jepang akan tetapi karena raja tua Poso, Mokole Bangke Talasa, melarangnya maka terpaksa mereka tak jadi bertindak. Raja tua Poso itu malah menerima kedatangan Belanda (*NICA*) kembali karena berita yang diterima di Poso mengabarkan bahwa Datu Luwu (Palopo) telah menerima juga *NICA*.

Di depan pemuda-pemuda yang bersiap akan melawan Belanda Mokole Bangke Talasa bertempat di muka kantor pemerintahan Poso berkata antara lain :

"Sei vinanga mPoso, kasaenyamo yaku noparenta barce-ree posebuka raa.

Sei yaku damompau rikomi pura-pura, kajela tua bangke ri Poso da noparenta kita pura-pura.

Isema - sema anu baree mompokono naparenta dua kontorlolo,

Ane to bugi, palai ri bugisi,

Ane Gorontalo, palai ri Gorontalo,

Ane Manado, palai ri Manado,

Ane Java, palai ri Java".

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia :

"Ini negeri Poso sudah begitu lamanya saya memerintah tidak

19). Wawancara dengan Bapak Kadmah di kampung Tavanjuka, Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, tanggal 21 - 9 - 1979.

pernah terjadi pertumpahan darah.

Saya ingin berbicara kepada kamu sekalian bahwa, kedatangan tuan besar (Belanda) di Poso untuk memerintah kita semua. Siapa-siapa yang tidak menyukai pemerintahan tuan kontrolir;

Kalau dia orang Bugis, pergilah ke tanah Bugis,

Kalau dia Gorontalo, pergilah ke Gorontalo,

Kalau dia Manado, pergilah ke Manado,

Kalau dia orang Jawa, pergilah ke Jawa".²⁰⁾

Karena kata-kata raja tua tersebut maka terpaksa pemuda PNI yang tergabung dalam Gerakan Merah Putih pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamajuda bersama rakyat tak dapat berbuat apa-apa karena patuh pada rajanya.

Pada saat tentara Sekutu yang diboncengi tentara NICA mendarat di Poso pertama kali pada awal Nopember 1945 itu. W.L. Talasa sedang dalam perjalanan ke Sulawesi Selatan (Watampone) untuk menemui Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi memenuhi panggilan Gubernur yang diterima beberapa hari sebelumnya sehingga yang ditemui NICA adalah bapaknya Raja Tua Talasa (Mokole Bangke Talasa).²¹⁾

Akibat dari larangan raja tua untuk melawan maka pemuda-pemuda yang telah siap dengan senjata di tangan lalu menyerahkan senjata-senjata mereka kepada tentara Sekutu/NICA. Tetapi senjata-senjata lainnya yang masih disembunyikan di tempat lain mereka tak serahkan.

Senjata yang diserahkan berupa :

''3 pucuk senjata kaliber 12,7 ex senjata Jepang.

2 pucuk senjata *watermatel* ex senjata Jepang.

60 pucuk senjata karabijn Jepang.

10 pucuk senjata *revolver*.

40 pucuk senjata *double Loop* campuran senjata penembak burung''.

Di samping itu senjata-senjata lainnya mereka buang ke sungai dan di laut.

Walaupun terjadi penyerahan tak bersyarat dari pemuda-pemuda PNI yang disebutkan tadi, namun pare Pemuda Gerakan Merah Putih yang tergabung dalam Laskar Tanjumbulu pimpinan

20). Wawancara dengan Bapak Ahmad Rafik Talamoa di kampung Uentanaga B, Kecamatan Ampana Kota, Kab. Poso, tanggal 11 - 10 - 1979.

21). Wawancara dengan Bapak W.L. Talasa di kampung Kasintuvu, Kecamatan Poso Kota, tanggal 15 - 11 - 1977.

Abdul Latief Mangitung lalu bergerak di luar kota Poso, sebagiannya lagi ada yang mundur ke Selatan bergabung dengan laskar PRI Luwu (Palopo) dan saling membantu menghadapi pasukan Belanda di tempat itu. Sebagiannya lagi yang bermarkas di kampung Malei tetap berjuang menentang secara diam-diam pemerintahan NICA dengan bergerak di bawah tanah melakukan *sabotase-sabotase*.

Bertepatan dengan pendaratan tentara Australia (Sekutu) dan NICA di Poso maka tiba pula utusan PRI (Pemuda Republik Indonesia) Palopo di Poso dipimpin oleh M. Landau dengan teman-temannya Umar Abdullah dan Nur Apala, tujuannya untuk membentuk Cabang PRI di Poso.

Diadakanlah pertemuan di rumah Lanokang di kampung Sayo, antara pimpinan Laskar Tanjumbulu Poso dengan utusan PRI Palopo yang menghasilkan tersusunnya badan pengurus sbagai berikut :

- 1). Abdul Latief Mangitung : Ketua PRI Cabang Poso.
- 2). *Yap Soei Ciong* : Wk. Ketua Cacang.
- 3). A.L. Pangemanan : Sekretaris.
- 4). R. Mangolo : Wk. Sekretaris.
- 5). Jafar (Heiho) : Kepala Pasukan Pemuda.
- 6). Abu Maloco : Keuangan.
- 7). Tosayang : Penyelidik.
- 8). Ipasa : Penghubung.

Terbentuknya pengurus badan perjuangan bersama antara PRI dan Resimen Tanjumbulu ini tidak merubah kepengurusan Laskar Tanjumbulu yang telah ada sebelumnya. Kedua organisasi kelas-karan tersebut dibina bersama-sama untuk berjuang bersama-sama pula dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Karena keadaan makin gawat dengan kenyataan raja menerima kembali kedatangan Belanda dan sebagian pemuda teman seperjuangan tadinya telah berbalik haluan, maka M. Landau segera kembali ke Palopo untuk melaporkan situasi di Poso dengan melalui Tentara dikawal satu regu kesatuan Laskar Tanjumbulu yang dipimpin oleh Martinus pada tanggal 25 Nopember 1945. Umar Abdullah dan Nur Apala diusahakan berangkat menuju ke Ampana dengan perahu layar dijemput oleh R.G. Datupamusu dan anggota Laskar Tanjumbulu lainnya, selanjutnya menuju Bunta Pagimana lalu ke Gorontalo untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan di Gorontalo. Tetapi setibanya di Gorontalo, Nani

Wartabone bersama teman-teman lainnya telah ditangkap NICA dan diasingkan ke Morotai (Maluku Utara). Karena itu ke duanya lalu kembali melalui Ampena di mana di tempat ini ikut pula ke Malili tokoh pejuang dari Ampena Abu Saleh Tanjumbulu (putera raja Tanjumbulu yang dipancung oleh Jepang tanggal 10 - 10 - 1942).⁽²²⁾

Dari Poso Pasukan tentara Sekutu terus ke Luwuk-Banggai di mana pasukan Sekutu ini dipimpin oleh Mayor Wilson. Turut pula dalam rombongan itu L. Baraw, bekas kontroleur Parigi sebelum pendaratan pasukan Jepang dan juga pernah menjadi aspirant kontroliur Luwuk sebelum ia menjabat kontroliur Parigi. Pada tanggal 3 Nopember 1945 pagi kapal perang Australia yang membawa tentara Sekutu itu memasuki pelabuhan Luwuk. Yang pertama turun adalah Angkatan Darat, menyusul Angkatan Laut kemudian diikuti pemuda Australia yang menjadi awak kapal tersebut. Sesampai di darat mereka disambut oleh sebagian besar pegawai Belanda dahulu dan mereka saling berpeluk-pelukan satu sama lain. Turut menyambut pula pasukan polisi Merah Putih pimpinan Ince Umar Dahlan yang masih memakai topi berlambang *Sakura* dengan lambang/lencana merah putih di dada masing-masing. Dengan bayonet terhunus tentara Sekutu (NICA) mencungkil lambang *Sakura* di topi mereka, tetapi membiarkan lencana merah putih tetap melekat di dada masing-masing.

Pagi itu juga tentara Sekutu yang dipimpin oleh *Mayor Wilson* itu memberikan penerangan kepada rakyat kota Luwuk. Sebagian isi pidato Mayor Wilson yang diartikan oleh L. Baraw antara lain:

1. Jepang telah menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945.
2. Pemerintah sekarang kembali Pemerintah Hindia Belanda.
3. Kekuasaan tertinggi dikembalikan kepada Swapraja.
4. Mereka telah menerima laporan-laporan mengenai keganasan polisi-polisi Jepang."

Petang harinya mereka mengadakan pertandingan bola kaki persahabatan dengan pemain sepak bola Luwuk dengan hasil *draw* 2 - 2.

Keesokan harinya tanggal 4 Nopember 1945 mereka mengambil kesempatan berkeliling kota Luwuk melihat-lihat lobang persembunyian dan pertahanan Jepang, mengadakan rapat rahasia

22). Informasi tertulis Abdul Latief Mengitung dari Poso.

dengan pejabat pemerintah setempat, raja Banggai S.A. Amir. Dalam pertemuan itu diambil sumpah setia raja untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan NICA di daerah Luwuk-Banggai dan keamanan diserahkan kepada polisi.

Pada tanggal 4 Nopember 1945 itu juga kapal perang Australia yang ditumpangi oleh tentara Sekutu itu meninggalkan Luwuk menuju Poso dan seterusnya ke Parigi membawa dan menurunkan bekas kontrolieur Parigi L. Baraw di kota itu.

Sementara itu dari Poso instruksi Gubernur Sulawesi Dr. Ratu-
langi berupa :

1. Teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Surat anjuran mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air yang telah diproklamirkan itu.
3. Surat keputusan konperensi raja-raja se Sulawesi selatan yang menyatakan tidak ingin dijajah lagi,²³⁾

disebar luaskan ke seluruh daerah Sulawesi Tengah, ke Luwuk-Banggai dan ke Palu.

Ke Luwuk-Banggai diutus Abdul Muis M. Nasir (Lamuis Lanasir) adik dari A.R. Lanasir melalui Ampana, Bunta, Pagimana dan tiba di Luwuk pada awal Nopember 1945. Waktu itu raja Banggai S.A. Amir baru saja menerima kekuasaan pemerintahan NICA yang dipercayakan oleh Belanda kepadanya.

Ketika diperlihatkan ke tiga surat dari Gubernur Sulawesi kepadanya, raja S.A. Amir seolah-olah tidak memberikan tanggapan apa-apa, malah seperti bingung dan bimbang. Permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan beliau oleh pemuda Gerakan Merah putih yang pernah berjuang bersamanya di tahun 1942, dihindarinya dengan meninggalkan kota Luwuk menuju ke kampung Sugilat (Kintom) dan hanya mengajukan adiknya yang bernama Sulaeman Amir sebagai wakil.

Pada tanggal 5 Nopember 1945 diadakanlah pertemuan di rumah Sulaeman Amir dihadiri oleh:

- 1). S. Amir, mewakili raja Banggai (Pemerintah).
- 2). Lamuis Lanasir (bekas Heiho) sebagai kurir dari Poso.
- 3). T.S. Bullah, Pimpinan GIM (Gerakan Indonesia Merdeka) dari Pagimana.
- 4). A.R. Lanasir, Pembantu Komandan/Koordinator keamanan Keris Muda Luwuk.

23). Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

Pembicaraan berkisar pada bagaimana tanggapan/sikap pemerintah kerajaan pada isi ketiga surat tersebut.

Akan tetapi tanggapan pihak pemerintah kerajaan mengecewakan dengan mengemukakan alasan-alasan :

1. Raja Banggai diangkat dan diambil sumpahnya secara tradisional oleh 4 orang kepala kampung atau disebut Basalo Sangkap, sedangkan mereka belum pernah dihubungi.
2. Telah beberapa kali terjadi perubahan pemerintahan sehingga menyulitkan/meruwetkan administrasi kerajaan Banggai, dan yang memikul tanggung jawab/resikonya adalah Swapraja.

Mendengar itu maka A.R. Lanasir lalu menjawab: bahwa kalau memang begitu seharusnya prosedur yang ditempuh, mengapa menerima NICA tanpa lebih dahulu bermusyawarah/mendapatkan persetujuan dari Basalo Sangkap?

Karena sikap pemerintah kerajaan demikian maka Lamuis Lanasir, A.R. Lanasir dan T.S. Bullah meninggalkan pertemuan dan menuju ke Pagimana dan Bunta seterusnya Lamuis Lanasir kembali ke Poso.

Tentara Sekutu (NICA) masuk di Buol pada awal Nopember 1945. Mereka datang dari Manado dengan motor laut sebanyak satu regu dipimpin oleh Sersan Lumoa. Kedatangan mereka ke Buol adalah untuk mengambil satu kompi tentara Jepang dipimpin oleh Tanaka dan telah ditawan oleh pemerintah dan rakyat setempat.

Sebelum tentara NICA datang, telah tiba di Buol Mohammad Mahmud dan Ahmad Mahmud yang diutus oleh Nani Wartabone, pimpinan Pemerintahan Nasional Gorontalo, membawa sehelai bendera Merah Putih untuk dikibarkan di Buol. Kedua orang tersebut datang di Leok pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan langsung menaikkan bendera Merah Putih di Leok yang sempat berkibar selama kurang lebih 3 minggu, lalu tentara NICA pimpinan sersan Lumoa datang. Mereka menurunkan bendera Merah Putih dan menggantikannya dengan bendera merah putih biru (bendera Belanda).

Mohammad Mahmud dan Ahmad Mahmud kemudian ditangkap oleh pasukan tentara NICA lalu keduanya diangkut bersama-sama dengan tawanan satu kompi tentara Jepang naik perahu layar menuju Menado. Perjalanan mereka dengan perahu layar dari Buol ke Menado itu memakan waktu \pm 18 hari.

Setibanya di Menado raja Haji Ahmad Turungku menghadap

pimpinan pemerintah NICA di Menado sambil menyerahkan tawanan tentara Jepang yang satu kompi itu.

Di Menado itulah raja Haji Ahmad Turungku menerima mandat untuk melaksanakan pemerintahan NICA di Buol sebagai seorang raja.²⁴⁾

Jadi dalam bulan Nopember 1945 itu praktis di daerah Sulawesi Tengah sepenuhnya berlaku pemerintahan NICA yang pelaksanaannya di tangan raja-raja setempat.

1. Sikap Masyarakat

Sesudah pemerintahan NICA berlaku sepenuhnya di seluruh daerah Sulawesi Tengah, mereka mulai menyusun pemerintahan daerah dengan struktur sama dengan pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Sebagian besar pegawai yang memegang pemerintahan NICA pada saat itu adalah bekas pegawai Belanda, baik mereka yang selama pendudukan Jepang tetap aktif sebagai aparat pemerintah Jepang maupun mereka yang di non aktifkan ataupun sebagai tahanan kota. Dengan terbentuknya aparat pemerintahan NICA di daerah Sulawesi Tengah, masyarakat (rakyat pada umumnya) terbagi menjadi 2 (dua). Sebagian besar pro kepada kemerdekaan yang telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ingin berjuang terus mempertahankannya dan sebagian kecil merasa gembira dan menerima datangnya Belanda (NICA) berkuasa kembali di daerah Sulawesi Tengah.

Golongan pertama yaitu mereka yang pro kepada kemerdekaan sejak saat mulai menerima berita proklamasi kemerdekaan sampai pada waktu datangnya tentara Sekutu yang diboncengi NICA, mereka telah berusaha berjuang menentangnya. Gerakan-gerakan pemuda yang menamakan dirinya Gerakan Merah Putih yang menentang keras kembalinya pemerintah Belanda (NICA) di Sulawesi Tengah, tak dapat berbuat apa-apa karena pimpinan mereka yaitu raja-raja telah memberikan pernyataan menerima dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah NICA.

2. Akibat-akibatnya

Dengan datangnya NICA yang dibantu oleh tentara Australia

²⁴⁾ Wawancara dengan Bapak Haji Mohammad Mahmud di kampung Panasasakan, Toli-Toli, tanggal 18 Nopember 1978.

kembali ke Sulawesi Tengah, dan mendapat sambutan baik dari raja-raja dan aparat pemerintahan lainnya/bekas pegawai-pegawai Belanda sebelum perang, walaupun sebagian rakyat dengan pemimpin-pemimpin pergerakan tak menyetujuinya tapi mereka yang menentang ini tak dapat berbuat apa-apa. Karena kurangnya alat persenjataan, sukarnya komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya serta gerakan-gerakan laskar yang ada tidak terkoordinir secara baik dalam satu komando, ditambah lagi kurangnya persatuan akibat politik pemecah belah Belanda dengan bujukan pangkat dan fasilitas lainnya maka dengan mudah NICA berhasil menguasai seluruh Sulawesi Tengah.

Di Luwuk setelah mendaratnya tentara Sekutu pada awal Nopember 1945 mereka tak lama di tempat itu, hanya mendrop pasukan NICA kemudian berangkat lagi setelah mengadakan pertemuan dengan raja bersama bekas pegawai Belanda sebelum perang di mana raja Luwuk-Banggai tetap dinyatakan sebagai kepala kerajaan dan dimintai kesetiaannya pada Belanda. Sebagai reaksi atas hal ini, maka pihak Gerakan Merah Putih yang berada di bawah koordinasi Devisi IV Keris Muda Luwuk pun mengadakan demonstrasi, disusul rapat di tangsi polisi. Dalam rapat tersebut *Djakarta Agama* mengajak rakyat untuk berjuang terus mempertahankan kemerdekaan.

Bertempat di bangsal pertemuan masyarakat, diadakan juga rapat raksasa di mana S. Kirdiat berbicara mengajak dan menginsyafkan rakyat untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. ²⁵⁾

Begitu NICA datang di samping siasat membujuk, juga melaksanakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang. Penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin pejuang dengan mudah sekali dilaksanakan. Tokoh-tokoh yang tadinya telah pernah ikut dalam pemberontakan pada awal perang dunia ke dua (Gerakan Merah Putih 1942) mulai diusut perkaranya kemudian ditangkap. ²⁶⁾

Sekitar bulan Desember 1945 tiba di Luwuk pasukan polisi Belanda (NICA) dari Poso dipimpin oleh J. Rimporok.

25) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

26) Kementerian Penerangan RI, *Buku Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi*, tahun 1953, hal. 231.

Dalam perjalanan dari Poso ke Luwuk mereka meliwati Pagimana. Di Pagimana ini sambil menghamburkan gula-gula dan uang logam kelip dan ketip ke tengah-tengah rakyat, juga mengadakan propaganda untuk menerima Belanda kembali dan mengejek pimpinan pejuang di tempat itu, T.S. Bullah yang pada saat itu sedang sakit dengan tantangan : "Di mana tentara Merah Putihmu".

Setiba di Luwuk, berdasarkan laporan-laporan dari kakitangan Belanda di tempat itu maka terjadilah penangkapan-penangkapan terhadap bekas-bekas *Jumpo* yang pro Republik seperti; Kairupan, Joseph Siwy, Abdul Azis Larekeng, Abdul Muis Larekeng, Taher Litepo, Atjo Matorang dan lain-lainnya.

Juga tokoh-tokoh bekas Gerakan Merah Putih tahun 1942 ditangkap dimasukkan ke penjara Luwuk kemudian diangkut ke Menado dan dipenjarakan di kota itu. Penangkapan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 1947.²⁷⁾

Oleh karena persenjataan pasukan/laskar tak ada karena bantuan senjata yang ditunggu dari Sulawesi Selatan tak kunjung datang maka dengan mudah pasukan polisi NICA menangkap tokoh-tokoh pejuang di Bunta. Di antara yang ditangkap itu adalah:

1. Su'dan Kirdiat.
2. Ahmad Fulilehan.
3. K.S. Onge.
4. Hasan Bafaddal.
5. Yahya Laganja.

Tokoh-tokoh yang ditangkap itu dianiaya dan dipukul luar biasa terutama S. Kirdiat dan Ahmad Fulilehan, lidahnya ditusuk dengan jarum. Sambil dipukuli, pada keduanya disodorkan daging babi, dengan garpu ke mulutnya. Karena hebatnya siksaan yang diderita, sehingga ada yang jatuh pingsan. Begitu pula terhadap tawanan-tawanan yang dari Luwuk dan Pagimana semuanya disiksa dengan hebat sebelum dan sesudah dimasukkan penjara Luwuk dan kemudian diangkut ke Menado. Kemudian mereka diadili oleh pengadilan Militer Belanda (*Temporaire Krijgsraad*) di Menado dengan tuduhan mengadakan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah yang sah (*wetboek van Strafrecht*) artikel 108, 109 dan 110 dijatuhi hukuman penjara sesuai tuntutan *oditur*

27) Informasi tertulis Yusuf Monoarfa dari Luwuk.

Militer (Mr. Keul) di Menado sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. T.S. Bullah dari Pagimana, | 12 tahun penjara. |
| 2. S. Kirdiat dari Bunta, | 12 tahun penjara. |
| 3. H.S. Manganco dari Bunta, | 12 tahun penjara. |
| 4. A.G. Mambu dari Luwuk, | 10 tahun penjara. |
| 5. Go Weng Sui dari Pagimana, | 10 tahun penjara. |
| 6. Ys. Monoarfa dari Pagimana, | 12 tahun penjara. |
| 7. A.R. Lanasir dari Pagimana, | 8 tahun penjara. |
| 8. A. Lagonah dari Pagimana, | 5 tahun penjara. |
| 9. Ince Umar Dahlan dari Luwuk, | 8 tahun penjara. |
| 10. Dr. Soetaryo dari Luwuk, | 6 tahun penjara. |
| 11. Ahmad Fulilehan dari Lobu, | 8 tahun penjara. |
| 12. R.G. Makadada dari Luwuk, | 6 tahun penjara. |
| 13. B. Worotikan dari Luwuk, | 6 tahun penjara. |
| 14. Salmin Jibrán | 8 tahun penjara. |
| 15. Abdurrahman Al Idrus | 8 tahun penjara. |

Setelah sidang pengadilan Militer Menado memvonis tahanan-tahanan itu beberapa bulan kemudian dari Jakarta datangnya vonis bagi mereka sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. T.S. Bullah tetap divonis | 12 tahun penjara. |
| 2. S. Kirdiat tetap divonis | 12 tahun penjara. |
| 3. H.S. Manganco menjadi | 10 tahun penjara. |
| 4. A.G. Mambu tetap | 10 tahun penjara. |
| 5. Go Weng Sui tetap | 10 tahun penjara. |
| 6. Ys. Monoarfa menjadi | 6 tahun penjara. |
| 7. A.R. Lanasir menjadi | 6 tahun penjara. |
| 8. A. Lagonah menjadi | 4 tahun penjara. |
| 9. Ince Umar Dahlan menjadi | 4 tahun penjara. |
| 10. Dr. Soetaryo menjadi | 2 tahun penjara. |
| 11. Ahmad Fulilehan menjadi | 6 tahun penjara. |
| 12. R.G. Makadada menjadi | 2 tahun penjara. |
| 13. B. Worotikan menjadi | 2 tahun penjara. |
| 14. Salmin Jibrán menjadi | 4 tahun penjara. |
| 15. Abdurrahman Al Idrus menjadi | 2 tahun penjara. ²⁸⁾ |

Di dalam penjara Menado tahanan pejuang dari Luwuk Banggai ini ditahan bersama-sama dengan pejuang-pejuang lainnya dari Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mangondow, Gorontalo, Toli-

28) Informasi tertulis A.R. Lanasir dari Luwuk.

Toli dan Poso juga bersama tahanan-tahanan tentara Jepang.

Di Parigi dan Palu pada akhir tahun 1945 mendarat pula pasukan NICA bersama seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi kontrolir di Parigi sebelum datangnya Jepang. Pejabat tersebut adalah L. Baraw. Walaupun sebelum kedatangan pasukan NICA di tempat itu telah datang utusan dari Resimen Tanjungbulu dari Poso (R.G. Datupamusu) membawa surat seruan kepada raja-raja di Parigi, Palu dan Donggala supaya berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak kedatangan Belanda namun raja-raja di tempat tersebut menerima dengan senang kedatangan Belanda kembali. Akibatnya pada tanggal 31 Januari 1946 oleh Belanda diadakanlah penangkapan tokoh-tokoh Republikan antara lain Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. (Ketuga Gerakan Merah Putih Sigli-Dolo), Haji Lasingka dan Lakacinda, Daeng Pawara Lahusaeni (Pimpinan Merah Putih Dolo), Taleb Lacinala (Pimpinan Merah Putih di Bora), M. Dj. Abdullah (Staf Pimpinan Merah Putih Sigli-Dolo di Kaleke), Waluntina (Pimpinan Merah Putih di Palu) dan Said Ali Sahibu (pimpinan Merah Putih di Tawaeli).

Sebabnya mereka ditangkap karena rapat yang mereka adakan di Sidera yang merencanakan perlawanan terhadap kekuasaan yang ada waktu itu, bocor diketahui oleh aparat pemerintah NICA.²⁹⁾

Mereka semua dimasukkan dalam sel tahanan markas polisi NICA. Demikian pula halnya dengan tokoh-tokoh pejuang dari Donggala mengalami hal yang sama dengan rekan-rekan dari Palu. Antara lain yang ditangkap dan ditahan di tangsi Besusu Palu adalah : Alexander Monoarfa, Alwi Mohammad, Mohammad Amu, Umar Papeo, Andi Baro serta Abdul Gani, nama samaran dari Isa Piola bersama 3 (tiga) orang kawannya yang pada waktu itu melaksanakan tugas sebagai kurir dari Sulawesi Selatan untuk Sulawesi Tengah, tertangkap di Tondo dekat Palu. Ke semua tahanan tersebut mengalami siksaan diperlakukan keras serta ejekan dan hinaan dari kakitangan Belanda selama berada dalam tahanan.³⁰⁾

29) Haji Moh. Djaruddin Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulteng 1975, hal. 41.

30) Informasi tertulis Abdul Wahid Maluku dan Andi Tjella Nurdin dari Donggala.

Demikianlah akibat-akibat yang terjadi di Sulawesi Tengah karena datangnya kembali pemerintahan NICA Belanda yang memboncong pada tentara Sekutu.

Walaupun di Poso terbentuk kelaskaran Resimen Tanjumbulu yang erat hubungannya dengan PRI dari Luwu-Palopo (Sulawesi Selatan), di Luwuk terbentuk laskar Divisi IV dari Keris Muda Luwuk sebagai bagian dari laskar Keris Muda Mandar begitu pula dengan di Palu-Donggala yang kelaskarannya erat hubungannya baik dengan laskar Tanjumbulu Poso maupun dengan Keris Muda dari Mandar akan tetapi karena ketiadaan senjata, terjadinya perpecahan-perpecahan akibat politik pemecah belah Belanda, akibat raja-raja di tempat itu menerima Belanda kembali dengan senang, maka penangkapan terhadap tokoh-tokoh pimpinan kelaskaran pun terjadi. Dari semua bentuk kelaskaran yang pernah ada di Sulawesi Tengah selama revolusi fisik tak ada yang diresmikan menjadi kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tapi yang ada hanyalah secara perorangan, ada satu dua yang kemudian menjadi anggota militer dalam kesatuan Resimen Hasanuddin di Makassar (Ujung Pandang).³¹⁾

31) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

BAB III

PERJUANGAN DI DAERAH

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I SAMPAI MASA AKSI MILITER BELANDA II

Tempat yang pertama mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Poso karena pada tanggal 17 Agustus 1945 sore Abdul Latief Mangitung dan I Latanco Talamoa serta Yusuf Monoarfa mendengarnya dari seorang perwira Jepang.

Abdul Latief Mangitung salah seorang tokoh dari Gerakan Merah Putih 1942 di Poso lalu mengambil inisiatif mengaktifkan kembali pasukan Gerakan Merah Putih 1942 dengan membentuk Laskar Tanjumbulu.

Begitu mendengar berita proklamasi dari seorang perwira Jepang yang disertai 2 (dua) orang anggota *Heiho*, Abdul Latief Mangitung mengundang kedua orang anggota *Heiho* tersebut menghadiri pertemuan pada malamnya jam 19.00 di mana turut pula hadir tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih Poso tahun 1942.

Pertemuan diadakan di rumah tempat Abdul Latief Mangitung menginap dan yang hadir di antaranya :

1. Abdul Latief Mangitung.
2. Yap Sui Ciong.
3. R. Mangolo.
4. A.L. Pangemanan.
5. Tosayang.
6. Saleh Topetau (*Heiho*).
7. Jafar (*Heiho*).

Hasil pertemuan itu adalah terbentuknya organisasi Laskar Tanjumbulu dengan susunan personalianya :

1. Abdul Latief Mangitung, Komandan Laskar Tanjumbulu.
2. Yap Sui Ciong, Wakil Komandan Laskar Tanjumbulu.
3. A.L. Pangemanan, Kepala Staf.
4. R. Mangolo, Wakil Kepala Staf merangkap urusan Personalia.
5. Tosayang, Kepala Bagian Perlengkapan.
6. Saleh Topetau, Komandan Pasukan Tempur.
7. Jafar, Bagian Persenjataan.
8. Lapasondrong, Bagian Kesejahteraan/Pemasak.
9. Lanokang, Penghubung.

Sebagai Markas Induk Pasukan diputuskan Kampung Malei.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Saleh Topetau dan Jafar datang melapor pada komandan laskar bahwa telah berhasil disembunyikan 5 (lima) pucuk senjata *karabijn* Jepang dan beberapa buah granat tangan. Senjata itu ditanam di kuburan Cina dan dijaga oleh Maleda seorang suku Mandar.

Tanggal 20 Agustus 1945 Abdul Latief Mangitung mulai keluar dari Poso untuk menghubungi bekas-bekas pejuang 1942 lainnya guna menggalakkan kembali Pasukan Gerakan Merah Putih 1942 sambil menyampaikan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Daerah-daerah yang dikunjungi adalah :

- 1) Pusat Markas Induk di kampung Malei, menghubungi Mohammad Amin Dahlan.
- 2) Pusat Gerakan Merah Putih 1942 Ampana-Tojo dan menghubungi R.G. Datupamusu dan M. Sunusi Patimbang.
- 3) Wilayah Kecamatan Bunta dan menghubungi Haji Sunusi Manganco, Baba Hamzah dan Lamusa.
- 4) Wilayah Kecamatan Pagimana-Luwuk dengan menghubungi A.R. Lanasir dan Laicu Lanasir.

Ia meneruskan perjalanan ke Tojo-Ampana, Pagimana, Bunta dan Palu untuk menghubungi tokoh-tokoh pejuang di tempat tersebut agar membentuk pula barisan-barisan laskar mempertahankan kemerdekaan apabila Sekutu datang, karena itu berarti Belanda kembali akan menjajah sebab Belanda berada di barisan Sekutu.

Pada tanggal 25 Agustus 1945 dari Makassar (Ujung Pandang) tiba di Poso utusan Gubernur Sulawesi A.N. Hajarati untuk membentuk pemerintahan sipil di Kabupaten Poso di mana W.L. Talasa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan di Poso.

Untuk menghubungi raja-raja di wilayah Donggala-Palu dikirim R.G. Datupamusu dan ke Luwuk dikirim Abdul Muis Lanasir untuk menghubungi raja Banggai. Keduanya membawa dokumen dari Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi. Juga dibentuk PNI (Pemuda Nasional Indonesia) dipimpin oleh Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda. Mengenai perjuangan di Poso menurut Abdul Latief Mangitung adalah sebagai berikut : Pada waktu itu pemuda persenjatai dari hasil pencurian senjata Jepang karena sejak pasukan Jepang yang ada di Poso mengetahui kealahannya pada Sekutu maka mereka lalu melepaskan dan menumpuk begitu saja senjatanya di gudang untuk diserahkan apabila tentara Sekutu datang.

Secara terang-terangan Jepang tak mau menyerahkan senjatanya pada pemuda tapi apabila senjata itu dicuri maka inipun dibiarkannya saja. Pada awal bulan Nopember 1945 datang di Poso utusan dari PRI (Pemuda Republik Indonesia) Palopo, M. Landau bersama 2 (dua) orang kawannya Umar Abdullah dan Nur Apala dengan tujuan membentuk Cabang PRI di Poso.

Terbentuklah Cabang PRI Poso yang dipimpin oleh Abdul Latief Mangitung. Akan tetapi pada awal Nopember 1945 itu pula datanglah pasukan tentara Sekutu (Australia) membawa NICA yang disambut oleh raja tua Poso, Talasa, dengan baik. Pada waktu itu W.L. Talasa sedang dalam perjalanan ke Sulawesi Selatan untuk memenuhi panggilan Gubernur Dr. Ratulangi. Karena raja tua tak mengizinkan pemuda-pemuda melakukan perlawanan di kota Poso, maka terpaksa pemuda-pemuda PNI pimpinan Sidik Utina dan Yakop Lamadjuda menyerahkan senjatanya sebelum bertempur.

Utusan M. Landau dari PRI Palopo melihat situasi ini lalu cepat-cepat kembali ke Palopo untuk melaporkan situasi di Poso dengan melalui Tentena dikawal satu regu kesatuan Laskar Tanjumbulu dipimpin oleh Martinus.

Pada akhir Nopember 1945 utusan organisasi pemuda Poso Y.K. Yanis dan Ahmad Dahlan menuju Palopo seterusnya ke Sengkang untuk menghadiri konperensi pemuda se Sulawesi. Konperensi tersebut menghasilkan kebulatan tekad menolak kedatangan Belanda di Indonesia. Konperensi pemuda itu juga mengusulkan agar dapat diberikan bantuan persenjataan dari pihak manapun untuk mengusir penjajah NICA yang dibantu oleh Sekutu di Indonesia.

W.L. Talasa ikut pula menghadiri pertemuan pemuda di Sengkang itu kemudian meneruskan perjalanan ke Watampone. Karena kota Poso sudah dikuasai oleh Belanda (NICA) maka markas perjuangan dipindahkan ke luar kota Poso yaitu di Malei.

Pada tanggal 31 Desember 1945 kesatuan Laskar Tanjumbulu ditingkatkan susunan personalianya karena wilayah kegiatannya sudah meliputi seluruh Sulawesi Tengah.

Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

1. Abdul Latief Mangitung : Komandan Laskar Tanjumbulu.
2. Yap Sui Ciong : Wk. Komandan Laskar Tanjumbulu
3. A.L. Pangamanan : Kepala Staf.
4. I Latanco Talamoa : Kepala Staf I/Penyelidik.

5. L. Bungkato : Wakil Kepala Staf I/Pantai Barat Donggala.
6. Abu Saleh Tanjumbulu : Kepala Staf II/Bagian Operasi.
7. R. Mangolo : Kepala Staf III/Personalia.
8. Abu Maloco : Kepala Staf IV/Bahagian Keuangan
9. Darius Raupa : Kepala Staf V/Penerangan.
10. Ipassa : Penghubung.
11. M. Nani : Perlengkapan/Urusan Persenjataan seberang/Tawao.
12. Saleh Topetau : Komandan Batalyon I, Poso-Tojo.
13. Abdullah Hamid : Komandan Batalyon II, Poso-Moutong.
14. Lae Pendolo : Komandan Batalyon III, Pendolo - Tentena.
15. Laicu Lanasir : Komandan Batalyon IV, Luwuk - Kolonodale.
16. Muhammad Amin Dahlan : Komandan Batalyon V, Ampana - Togeana.
17. R.G. Datupamusu : Komandan Batalyon VI, Palu-Donggala.
18. P. Marhum : Komandan Kompi Otonom Buol - Toli-Toli.
19. R.M. Kusnodhanupoyo : Penasihat.
20. Y.K. Yanis : Penasihat.

Ke 20 orang tersebut di atas menjadi pimpinan Laskar Tanjumbulu Sulawesi Tengah dan bermarkas Induk di kampung Malei, Tojo, dan segala kegiatan dipertanggung jawabkan pada masing-masing pimpinan di daerah yang telah ditentukan dan senantiasa kompak dengan pimpinan komando Markas di Malei.”¹⁾

Pada tanggal 15 Januari 1946, komandan Markas Tanjumbulu, Abdul Latief Mangitung berangkat ke Palopo untuk melaporkan situasi daerah Sulawesi Tengah kepada Komandan PRI Palopo. Pada tanggal 15 Januari 1946 itu pula pasukan dikumpulkan/dikoordinir oleh Pimpinan PRI Palopo untuk menggempur tentara Belanda di Palopo.

Untuk pertempuran itu telah diatur formasi, di mana dari jurusan tenggara dipimpin oleh M. Landau, pasukan dari Lasosua meng-

1) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

hampiri istana Datu Luwu dipimpin oleh Yusuf Setia dibantu dengan pasukan dari Poso dipimpin oleh Martinus dan H.R. Bando.

Pada tanggal 23 Januari 1946 dinihari jam 03.00 pecahlah pertempuran sampai jam 12.00 siang kemudian pasukan yang dipimpin oleh Martinus dan H.R. Bando dan pasukan berani mati pimpinan S.S. Mahmud mengundurkan diri ke kampung Lamasi bahagian pantai.

Akibat pertempuran itu kota Palopo hangus terbakar, dan kedua belah pihak jatuh banyak korban. Dari pasukan Poso gugur R. Mangolo, Martinus dan kawan-kawannya.

Pada tanggal 24 Januari 1946 praktis seluruh kekuatan pasukan pejuang mengambil posisi pertahanan yang baru dengan mengundurkan diri ke pinggir-pinggir kota Palopo dan pemerintah RI kerajaan Luwu memindahkan staf pemerintahannya ke Lamasi yang dipimpin oleh Andi Jemma. Di samping itu gerakan-gerakan pasukan bersenjata makin meluas sampai ke bahagian tenggara Sulawesi (ke daerah Latou).

Pada tanggal 1 Maret 1946 untuk peningkatan organisasi bersenjata maka PRI kemudian dilebur menjadi PKR (Pembela Keamanan Rakyat) Luwu, yang berstatus *Divisi* dilengkapi dengan 7 (tujuh) Resimen kelaskaran meliputi wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah termasuk di dalamnya Laskar Tanjumbulu yang ditetapkan menjadi kesatuan Resimen VII Tanjumbulu yang ditetapkan menjadi kesatuan Resimen VII Tanjumbulu. Divisi PKR Luwu Sulawesi Tengah pimpinannya adalah Abdul Latief Mangitung.

Mengenai komposisi personalia tiap-tiap resimen, diatur dan disusun sendiri oleh Komandan Resimen masing-masing dan khusus susunan personalia Resimen VII adalah sebagai berikut :
"Staf Resimen VII.

1. R.M. Kusnodhanupoyo : Penasihat
2. Y.K. Yanis : Penasihat.
3. Abdul Latief Mangitung : Komandan Resimen VII.
4. Yap Sui Ciong : Wakil Komandan Resimen VII.
5. A.L. Pangamanan : Kepala Staf.
6. I Latanco Talamoa : Kep. Staf I/Bahagian Penyelidik.
7. L. Bungkato : Wakil Kepala Staf I/Pantai Barat Donggala.
8. A.S. Tanjumbulu : Kepala Staf II/Bahagian Operasi.

- 9. R. Mangolo : Kep. Staf III/Bahagian Personalia.
- 10. Abu Maloco : Kep. Staf IV/Bahagian Keuangan.
- 11. Darius Raupa : Kep. Staf V/Bahagian Penerangan.
- 12. Ipassa : Penghubung.
- 13. M. Nani : Perlengkapan/Urusan Persenjataan
seberang/Tawao.

Batalyon I Poso – Tojo.

- 1. Saleh Topetau : Komandan Batalyon I.
- 2. A.T. Darise : Kepala Staf Batalyon.
- 3. A. Latanu : Kepala Staf I.
- 4. Tosayang : Perlengkapan.
- 5. Mane : Penghubung.
- 6. Jafar : Komandan Operasi.
- 7. Hasan Hatibe : Wakil Komandan Operasi.
- 8. Abubakar Bagenda : Dan Kie I/Poso Kota.
- 9. Masewa Dg. Paliweng : Dan Kie II/Malei.
- 10. Hamid Dg. Pawawo : Dan Kie III/Tongku.
- 11. Dosa : Dan Kie IV/Uekuli.
- 12. Mudo : Dan Kie V/Sayo – Tagolu.
- 13. Laodo : Kepala Polisi Batalyon.

Batalyon II Poso – Parigi – Muotong.

- 1. Abdullah Hamid : Komandan Batalyon II.
- 2. Uli Kinsal : Kepala Staf Batalyon.
- 3. Halidu Niode : Kepala Staf I.
- 4. Bahrain Pilomono : Kepala Bahagian Perlengkapan.
- 5. Halodo Bido : Penghubung.
- 6. Lahado Dg. Mananti : Kepala Bahagian Keuangan.
- 7. Abdul Rahman Bahaswan : Dan Kie I.
- 8. Rasyid Laboro : Dan Kie II.
- 9. Abdurrahman Ilimullah : Dan Kie III.
- 10. Lapadu : Dan Kie IV.
- 11. Tjatjo Lahamado : Dan Kie V.

Batalyon III Pendolo – Tentena – Taripa

- 1. Lae Pendolo : Komandan Batalyon III.
- 2. D. Daud : Wakil Komandan Batalyon.
- 3. Yopi : Kepala Staf I.
- 4. H. Bando : Komandan Operasi.
- 5. H. Muncai : Kepala Personalia.
- 6. Alama : Dan Kie I.

Batalyon IV Luwuk – Kolonodale

1. Laicu Lanasir : Komandan Batalyon IV.
2. Murlan : Wakil Komandan Batalyon.
3. R. Rimbalangi : Kepala Staf.
4. Lasaing : Komandan Operasi.
5. H.M. Sanusi Manganco : Dan Kie I/Mori Tas.
6. Manenong : Dan Kie II/Kolonodale-Bungku.
7. Abd. Halim Matoleang : Dan Kie III/Batui dan sekitarnya.
8. Badowi Akelo : Dan Kie IV/Bunta dan sekitarnya.
9. Kahar Moidadi : Dan Kie V/Luwuk.

Batalyon V Ampana – Togeang

1. Mohammad Amin Dahlan : Komandan Batalyon V.
2. M.Y. Lacompo : Kepala Staf Batalyon.
3. Taher Radjapatta : Dan Kie I.
4. L. Binangkari : Kepala Staf I Batalyon V.

Batalyon VI Palu – Donggala

1. R.G. Datupamusu : Komandan Batalyon VI dan ayahnya Datupamusu sebagai Penasihat
2. M. Sunusi Patimbang : Kepala Staf.
3. Haji Lasangka : Kepala Bagian Keuangan.
4. Lapato Daeng Ismail : Dan Kie I.
5. Lagama Borahima : Dan Kie II.
6. Lamanu : Dan Kie III.
7. Ladising : Dan Kie IV.

Kompi otonom Buol Toli-Toli

- P. Marhum : Komandan Kompi otonom.”

Pada tanggal 15 April 1946, gabungan Resimen II Masamba dipimpin oleh Haji Side dan Resimen VII yang dipimpin oleh A.S. Tanjumbulu, dikerahkan ke daerah Swapraja Lore-Bada untuk menghadang patroli tentara dan polisi NICA di daerah Bada. Dalam penyerangan ini pasukan Indonesia menderita kehilangan 30 orang anggotanya ditawan oleh NICA di antaranya seorang bernama Suleman (Papa Bora) ditembak mati sesudah disiksa dengan membakar pantatnya dengan damar dan seorang lagi meninggal dalam tawanan yaitu Haji Side.” 2)

2) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

Pada tanggal 1 Januari 1947 di Poso terbentuk satu badan perjuangan yang dinamai Barisan Nasional Indonesia (BNI) Cabang Poso dan berpusat di Manado.

BNI didirikan pada tanggal 28 September 1946 di Manado oleh tokoh-tokoh bekas Gerindo, Parindra, Partindo dan lain-lain Pimpinannya di Manado antara lain G.E. Dauhan.³⁾

Badan ini hanya bersifat politik, memprotes segala tindak-tanduk tentara NICA. Dengan berbagai cara, BNI Cabang Poso dapat mempengaruhi sebagian tentara NICA menjadi anggotanya dengan memeberikan kartu pengenalan BNI yang berlambang banteng, sebagian pula anggota-anggotanya disusupkan dalam jawatan dan pegawai pemerintahan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh organisasi tersebut.

Susunan pengurus organisasi BNI Cabang Poso adalah sebagai berikut :

1. Yap Sui Ciong sebagai Ketua.
2. A.L. Pengemanan sebagai Wakil Ketua.
3. M.B. Kusoy sebagai Sekretaris.
4. Hanna sebagai Wakil Sekretaris.
5. I. Latanco Talamoa sebagai Komisariss.
6. *Ong Hok Lae* sebagai Penasihat.”

Di Kolonodale dibentuk juga Cabang BNI dengan pelopor-pelopornya Sungka Marunduh, Junius Tomakaka. Badan pengurus lainnya adalah Taemba Tomakaka, Menenong, Siara, Mainda Rumampuo.

Pada bulan Juni 1948 J. Tomakaka dan M. Rumapuo berangkat ke Makassar (Ujung Pandang) untuk mengadakan hubungan dengan pejuang-pejuang di sana akan tetapi sekembalinya ke Kolonodale sebelum turun dari kapal barang-barangnya digeledah. Untuk J. Tomakaka masih sempat menyerahkan dokumen mereka kepada seorang anak perempuan yang menyembunyikannya, hingga tak didapat oleh tentara NICA.

Ke duanya lalu ditahan oleh pemerintah Kolonodale. Di samping itu dibentuk pula organisasi kelaskaran yang dipimpin oleh S. Marunduh, sebagai bagian dari PKR (Pembela Keamanan Rakyat) Palopo.⁴⁾

3) Kementerian Penerangan RI, *Buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, hal. 511.

4) Informasi tertulis M. Parobe dari Kolonodale.

Pada tanggal 27 Maret 1947, Komandan Resimen VII Tanjumbulu Divisi PKR Luwu Sulawesi Tengah, Abdul Latief Mangitung, ditangkap oleh tentara NICA di kampung Sayo dan ditahan di asrama tentara NICA Poso sampai tanggal 5 April 1947. Tahanan-tahanan yang ada di Poso, banyak mendapat pertolongan dari Jaksa Theodorus Polii. Mereka dituduh Belanda sebagai ekstremis, tapi Jaksa Th. Polii menganggap mereka sebagai tahanan politik.

Selama Komandan Resimen VII Tanjumbulu ditahan maka pucuk pimpinan dijalankan oleh Saleh Topetau. Sementara itu Komandan Divisi PKR Luwu dan kepala pemerintahan Kerajaan Luwu yang pro Republik ditahan pula di Sulawesi Selatan. Hal ini mempengaruhi hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, terutama hubungan antara Induk pasukan PKR Luwu dengan pihak pasukan Resimen VII Tanjumbulu Divisi PKR Luwu Sulawesi Tengah tidak lancar lagi.

Di Donggala pembentukan badan perjuangan Gerakan Merah Putih terjadi pada bulan September 1945 setelah datangnya Alexander Monoarfa, kepala *Minsen Hikokai Donggala*, dari Makassar (Ujung Pandang) membawa beberapa petunjuk pelaksanaan perjuangan dari sana. Akan tetapi belum sempat bergerak A. Monoarfa telah tertangkap.

Pada tanggal 11 Nopember 1945 malam beberapa orang pemuda anggota Gerakan Merah Putih antara lain A.T. Nurdin, Abdul Wahid Maluku, Andi Ngaru Pettalolo dan kawan-kawannya menyelip masuk ke pelabuhan Donggala dan menaikkan bendera Merah Putih yang berasal dari bendera merah putih biru yang dirobek birunya.

Pada keesokan harinya timbullah kegemparan di kota Donggala melihat bendera Merah Putih berkibar di atas tiang di depan kantor pelabuhan Donggala. Peristiwa ini mengakibatkan ditangkapnya *Gaspar Philep* yang bertugas jaga malam di kantor douane ketika terjadi pengibaran bendera Merah Putih tersebut. Ia ditahan di tangsi Besusu Palu dengan mengalami siksaan selama 2 (dua) minggu baru dilepas karena ia tutup mulut tak mau menyebutkan siapa pelaku-pelaku yang menaikkan bendera ketika ia jaga malam. Menyusul kemudian anggota Merah Putih bernama Umar Samani ditangkap pula. Dengan tertangkapnya Umar Samani ini maka bocorlah rahasia-rahasia Gerakan Merah Putih.

Walaupun terjadi penangkapan atas anggota-anggota Gerakan

Merah Putih di atas tetapi tokoh-tokoh lainnya yang masih bebas lalu membentuk organisasi kelaskaran bernama Laskar Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) pada bulan Nopember 1945 itu juga. Kemudian tiba pula utusan dari Sulawesi Selatan bernama Abdul Gani (nama samaran dari Piola Isa) dengan menumpang perahu membawa surat-surat dokumen untuk pejuang-pejuang di Donggala dan Palu. Awal tahun 1946 Umar Papeo ditangkap dan pertengahan tahun 1946 menyusul penangkapan atas diri A.T. Nurdin. Setelah sebulan ditahan dan disiksa di tangsi Besusu Palu baru dilepaskan. Menyusul penangkapan atas diri Piola Isa, Filipis Ranti dan Umar di kampung Tondo dekat Palu, akibat bocornya rahasia rencana penyerbuan pada tangsi Besusu di Palu. Laskar PIM yang belum sempat memiliki senjata yang cukup tetap juga mengadakan gangguan-gangguan pada pemerintahan NICA baik di Donggala maupun di Palu berupa sabotase, penghadangan patroli, pembakaran-pembakaran dan sebagainya antara lain mengadakan :

1. Serangan pada kantor polisi Donggala di Ganti ± 4 km dari Donggala dilakukan oleh A.T. Nurdin, Andi Baro, Mislani dan kawan-kawan pada pertengahan bulan Nopember 1945. Pada serangan ini berhasil direbut beberapa senjata api dan pedang Jepang.
2. Penghadangan tentara NICA yang sedang patroli ke Banawa Selatan, jembatan Limboro dibongkar dan dirusakkan pada akhir Nopember 1946 oleh Abdul Wahid Maluku, Andi Baro dan kawan-kawannya.
3. Penyerangan atas patroli NICA yang sedang menuju ke Surumana, Banawa Selatan, oleh Andi Baro, Mislani dan kawan-kawannya pada awal tahun 1947.
4. Pembakaran gudang Yayasan Kopra Fonds Donggala di Tanjung Batu oleh Ladising dan kawan-kawan yang mengakibatkan ribuan ton kopra habis terbakar.

Oleh pemuda-pemuda Gerakan Merah Putih dibentuk pula suatu perkumpulan seni drama yang bernama Sandiwara Pemuda Kita (SPK). Pembentuk dan pimpinannya adalah Abdullah Bachmid dan Muhammad AminPettalolo di Donggala yang menampilkan ceritera-ceritera yang bertemakan perjuangan. Oleh kaki tangan Belanda SPK ini dilawan pula dengan mendirikan Persatuan Pemuda Donggala (PPD) yang menampilkan drama-darma dan nyanyian-nyanyian yang bersifat ke Belanda-Belandaan.

Karena situasi makin panas antara pejuang-pejuang dengan NICA

maka mulailah dibentuk sektor-sektor pertahanan dalam wilayah Donggala. Di pihak NICA pun makin sering melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang termasuk di antaranya Alwi Muhammad, pimpinan dari Gerakan Merah Putih, ditahan di tangsi militer Palu.

Oleh karena makin banyak pejuang-pejuang ditahan, maka oleh pemuda-pemuda laskar PIM direncanakan suatu penyerbuan atas tangsi Militer Palu akan tetapi rahasia penyerbuan itu dapat diketahui oleh Belanda dari kaki tangannya.

Sementara diadakan persiapan untuk penyerbuan tiba-tiba Alwi Muhammad pucuk pimpinan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia daerah Donggala dikeluarkan dari tahanan karena sakit payah tapi tetap sebagai tahanan kota. Melihat keadaan kesehatan pimpinannya mengkhawatirkan maka tokoh-tokoh laskar PIM lainnya lalu mengadakan kontak dengan badan-badan perjuangan lainnya. Diadakanlah beberapa pertemuan antara lain :

1. Pertemuan di Desa Kaleke, Palu

Pertemuan tersebut diadakan pada akhir tahun 1945 atas inisiatif dari Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. bertempat di Kaleke (Watujulai suatu tempat yang tersembunyi di kaki gunung) di luar kota Palu, dihadiri oleh utusan-utusan pejuang kemerdekaan dari Wani, Tawaeli, Palu, Biromaru, Donggala dan Kaleke sendiri. Utusan dari Gerakan Merah Putih pada pertemuan tersebut dari Donggala adalah Andi Ngaru Pettalolo, Lagama Borahima, Mohammad Tang dan Labaci.

Hasil pertemuan adalah :

- a) Kerja sama dalam perjuangan dengan saling membantu.
- b) Mengadakan koordinasi yang baik dalam tiap organisasi perjuangan yang ada di daerah Donggala.
- c) Menentang dan mendobrak setiap anasir-anasir yang anti kemerdekaan.
- d) Mengadakan kontak dengan organisasi perjuangan yang berada di Sulawesi Selatan seperti KRIS Muda di Mandar, Mamuju dan lain-lain.

2. Pertemuan di desa Towale Kecamatan Banawa Afdeling Donggala. (Sekarang Kabupaten Donggala).

Pertemuan diadakan oleh Laskar PIM bertempat di Towale,

Kampung Baru, di gedung SD Kampung Baru pada bulan Januari 1946, dihadiri oleh utusan-utusan pejuang dari BAMBALOKA (Sulawesi Selatan) yang diwakili KRIS Muda adalah Kepala Distrik BAMBALOKA bernama YANCE.

Utusan LASKAR PIM adalah ANDI NGARU PETTALOLO, ABDUL WAHID MALUKU, ANDI BARO LAMARAUNA, MISLAENI LAUDJENG, LABACI dan kawan-kawannya.

Garis-garis besar hasil pertemuan adalah :

- a. Kedua daerah yaitu DONGGALA dan MAMUJU/MANDAR saling bahu-membahu dalam perjuangan.
- b. Di Desa SURUMANA diadakan pos kontak rahasia bersama sebagai penghubung apabila ada sesuatu keperluan.
- c. Dari LASKAR PIM ditentukan personalia yang menangani pos rahasia adalah :

Komandan	:	ANDI BARO LAMARAUNA.
Wk. Komandan	:	MISLAENI LAUDJENG.
Penghubung	:	LAUTJI.
Pembantu	:	LANCELE, LABATJI, LAHUSE.

3. *Pertemuan di Desa Watatu, Kecamatan Banawa*

Pada bulan Pebruari 1946 oleh LASKAR PIM diadakan pula pertemuan di WATATU dihadiri oleh utusan-utusan pejuang dari :

- 1) BAMBIRA (Sulawesi Selatan) yang mewakili KRIS Muda adalah ANDI PELANG.
- 2) Dari KALELE PALU mewakili PNI KALEKE adalah DAENG MANUJU.
- 3) Wakil LASKAR PIM DONGGALA adalah ANDI BARO, LABATJI dan kawan-kawannya.

Hasil pertemuan adalah :

- a. Memberikan penerangan dan penjelasan apa arti merdeka dan kemerdekaan kepada masyarakat di sekitar kampung WATATU.
- b. Mengajak masyarakat berjuang guna kemerdekaan negara.
- c. Membulatkan tekad menentang siapapun juga yang menjadi penghalang perjuangan kemerdekaan.
- d. Mengadakan penghubung untuk komunikasi antara badan perjuangan.

4. *Pertemuan di Desa Bambaira, Sulawesi Selatan*

Pelaksanaan pertemuan adalah KRIS Muda; pertemuan diadakan di rumah guru Umar di BAMBIRA pada bulan Maret 1946 dihadiri utusan-utusan pejuang dari LASKAR PIM DONGGALA yang

diwakili oleh Mohammad Amu, Abdul Wahid Maluku.

Tokoh-tokoh pejuang Bambaira mewakili KRIS Muda adalah Andi Pelang, guru Umar dan beberapa orang kawannya.

Utusan dari Laskar PIM membawa mandat untuk pembelian senjata api dan granat.

Hasil pertemuan adalah :

- a. Pembelian senjata disetujui, diusahakan di Daerah Mandar atau Majene.
- b. Rencana mengadakan pertemuan antara organisasi perjuangan yang ada di sekitar daerah Donggala dan daerah Mandar-Mamuju bertempat di Bambaira.
- c. Memperkuat hasil-hasil pertemuan yang telah diadakan di Watatu dan Towale.
- d. Bila Laskar PIM memerlukan bantuan maka KRIS Muda bersedia membantu, karena laskar KRIS Muda dan Laskar PIM adalah bersaudara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Kira-kira seminggu lamanya utusan PIM berada di daerah Bambaira sambil mempelajari beberapa soal yang ada hubungannya dengan perjuangan baru kembali ke Donggala.

Akan tetapi kakitangan NICA yang disebar sampai ke pelosok-pelosok telah mengikuti segala gerak-gerik dari Laskar PIM ini sehingga terjadilah penangkapan-penangkapan secara besar-besaran oleh NICA.

Tak lama setelah kedua utusan Laskar PIM tiba kembali di Donggala, Umar Papeo ditangkap ditahan di tangsi Besusu Palu kemudian menyusul tokoh-tokoh pimpinan Laskar PIM ikut ditangkap sehingga sebagian besar pimpinan Laskar meringkuk dan disiksa di tahanan Militer Palu.

Demikian pula utusan yang baru pulang dari Bambaira ditangkap oleh NICA pada bulan April 1946 ditahan di Palu bersama tokoh-tokoh lainnya.

Akibat penangkapan-penangkapan tersebut maka sejak itu gerakan perlawanan dari Laskar PIM Donggala lumpuh karena Sulawesi Selatan pun sudah dikuasai oleh NICA.

Baru pada tahun 1948 mulai lagi dilakukan penyergapan patroli serdadu KNIL/NICA di Bambaira dengan menggunakan dinamit oleh Umar dan kawan-kawannya yang mengakibatkan banyak tentara KNIL mengalami luka parah.

Pada tahun 1948 itu juga oleh Andi Baro Lamarauna, Andi Ngaru

Pettalolo dan kawan-kawannya mengadakan penghadangan terhadap patroli tentara Belanda yang dipimpin oleh Sersan Supit dan Kapo. Pada penghadangan ini Andi Baro tertawan dan dimasukkan ke dalam tahanan Militer Palu. 5)

Di daerah Palu dan sekitarnya terbentuk juga organisasi-organisasi perjuangan akan tetapi pada umumnya bermarkas di luar kota Palu. Oleh karena kota Palu merupakan tempat kedudukan Pemerintah Belanda maka pejuang-pejuang yang ada di kota tersebut tak dapat bergerak dengan bebas. Di luar kota di kampung yang bernama Kaleke merupakan puast markas perjuangan melawan pemerintah Belanda/NICA dengan kakitangannya. Gerakan yang ada di tempat itu dikenal dengan nama Gerakan Merah Putih Sigi-Dolo dengan pimpinannya Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S.

Kelaskaran Merah Putih Sigi-Dolo di Kaleke ini mulai dibentuk ketika datangnya Abdul Latief Mangitung dari Poso pada awal terdengarnya Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Tengah. Yang ditemui oleh Abdul Latief Mangitung di Palu adalah Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. dan M. Sunusi Patimbang. Setelah terbentuknya barisan Merah Putih ini maka oleh pimpinannya diadakan kontak dengan Pemuda Indonesia Merdeka yang berpusat di Donggala.

Jadi Laskar Merah Putih Sigi-Dolo di Kaleke erat hubungannya dengan PIM dan KRIS Muda Cabang Donggala.

Kemudian berturut-turut datang utusan Abdul Gani (Isa Piola) dari Sulawesi Selatan melalui Donggala dengan naik perahu membawa dokumen untuk pejuang-pejuang di Sulawesi Tengah.

Rapat pertama diadakan tanggal 31 Desember 1945 di Sidera tetapi berhasil didengar oleh kakitangan Belanda sehingga terjadi penangkapan/penggerebegan sementara rapat berlangsung, karena Belanda/NICA telah datang di Palu pada bulan September 1945. Yang memimpin NICA tersebut adalah bekas kontroluor Parigi sebelum Jepang bernama L. Baraw. Walaupun sebelum datangnya Belanda/NICA ini R.G. Datupamusu telah dikirim dari Poso untuk menyampaikan surat berisi seruan kepada raja-raja agar menolak kembalinya pemerintahan Belanda karena

5) Informasi tertulis A.T. Nurdin dan Abdul Wahid Maluku dari Donggala.

Indonesia telah merdeka, tetapi ternyata kedatangan Belanda kembali disambut dengan baik oleh raja-raja.

Pada tanggal 31 Desember 1946 dilakukan penangkapan besar-besaran oleh Belanda terhadap tokoh-tokoh pejuang seperti Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S., Haji Lasingka, Lakacinda, ketiganya dari Merah Putih Kaleke. Menyusul ditangkap Daeng Pawara Lahusaeni pimpinan Merah Putih Dolo, Taleb Lancala dari Bora, M.Dj. Abdullah dari Merah Putih Biromaru dan Waluntina dari Pimpinan Merah Putih Palu.

Oleh karna tindakan penangkapan-penangkapan itu maka para anggota Merah Putih lebih berhati-hati dalam tindakannya. Di suatu tempat di kaki gunung yang terpencil bernama Watujulai diadakan rapat raksasa yang dihadiri ± 100 orang terbatas dari daerah Sigi-Dolo. Rapat tersebut mengambil keputusan kalau ada polisi/tentara NICA patroli ke Kaleke yang bermaksud melakukan penangkapan dan mengeluarkan tembakan, maka tiang pasar Kaleke yang terbuat dari besi harus dipukul sebagai kode dan rakyat dengan senjata yang ada padanya berbentuk golok, parang dan tombak akan segera menyerang serentak apabila mendengar kode tersebut. Sementara itu patroli dibiarkan melewati jembatan Sibonu Kaleke, baru diadakan pembongkaran jembatan, sehingga pasukan Belanda tak bisa atau terhalang dan kembali ke Palu.

Mendengar bunyi tiang dipukul, patroli Belanda jadi curiga dan cepat-cepat memutar otaknya untuk kembali ke Palu. Karena itu mereka mendapati anggota Laskar Merah Putih sedang membongkar jembatan.

Dengan todongan senjata oleh tentara NICA, 7 orang yang bertugas membongkar jembatan ditangkap dan dibawa ke Palu, ditahan di tangsi Militer Besusu.

Ke 7 orang tersebut disiksa setengah mati sehingga seorang di antaranya meninggal karena muntah darah setelah dilepaskan dari tahanan bernama Marini.

Yang cacat badannya akibat siksaan adalah Yalimposo. Yang 5 orang lagi masing-masing bernama Kamali, Dohana Lacambo, Yantara, Abdul Hamid Lakacinda dan Dodoro. ⁶⁾

Akibat penangkapan-penangkapan itu maka oleh Lolontomene

6) Wawancara dengan Bapak Pasturu Sobe di Pevunu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.

Lamakarate dan kawan-kawannya lalu memimpin Laskar Merah Putih Sigi-Dolo bersama rakyat mengadakan demonstrasi protes ke Palu, menuntut agar tokoh-tokoh mereka dibebaskan. Turut pula dalam demonstrasi ini Merah Putih dari Kaleke, Pesaku, Dolo dan Biromaru. Juga laskar yang ada di Tawaeli dihubungi dengan 2 (dua) orang kurir menunggang kuda masing-masing bernama Daeng Maladja Lamakampali dan Ain Lahusaeni, meminta laskar Tawaeli bergerak ke Palu pada saat yang sama dengan laskar dari Sigi-Dolo.

Seorang kurir lebih dulu dikirim ke Palu yaitu Jalil Jamal agar Merah Putih Palu pun berkumpul di pinggir sungai Palu di kampung Ujuna menanti tibanya rombongan dari Sigi-Dolo dan Tawaeli. Ada ± 1000 orang yang berbaris dari 3 (tiga) arah itu menuju rumah kepala pemerintahan Palu waktu itu *HPB L. Baraw*, dengan masing-masing membawa senjata berbentuk golok, parang dan tombak. Pasukan dari Kaleke dan Pesaku menyeberang di Tulo lalu bergabung dengan pasukan dari Dolo. Telepon di kantor pemerintah Dolo dikuasai supaya putus hubungan dengan Palu. Pada jam 8.00 pagi mereka berangkat menuju Palu dan bergabung dengan pasukan dari Biromaru di pertigaan jalan Palu-Biromaru dan Dolo. Sebelum meninggalkan pertigaan ini ke Palu oleh Lolontomene Lamakarate semua anggota disuruh mengambil air wudhu, setelah itu barulah mereka disiapkan dengan lebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian meneruskan perjalanan memasuki kota Palu.

Sepanjang jalan mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan tiba di Palu jam 10.00 pagi tepat ketika pasukan dari Tawaeli pun tiba di kampung Talise dan pasukan dari Palu sendiri sudah diatur di bagian belakang tangsi Besusu Palu.

Melihat massa yang datang membanjir maka oleh pihak pemerintah NICA yaitu *HPB Palu L. Baraw* lalu bersedia mengadakan perundingan dengan *Lolontomene Lamakarate* bertempat di rumah *HPB* di mana semua raja-raja juga berkumpul di tempat itu. Hasil perundingan ialah para tahanan akan segera dibebaskan besoknya. Karena adanya janji tersebut maka seluruh rakyat/pasukan Merah Putih kembali ke tempatnya masing-masing. Peristiwa ini membuat rakyat semakin yakin bahwa dengan keberanian dan persatuan perjuangan dapat berhasil.

Pada tanggal 3 Maret 1946 diadakan lagi rapat pimpinan laskar Merah Putih Sidi-Dolo bertempat di rumah Haji M. Yoto

Daeng Pawindu D.S. di Bambaru-Kaleke. Rapat dipimpin oleh Haji M. Yoto Daeng Pamindu D.S., sebagai sekretaris rapat adalah M. Djaruddin Abdullah. Hadir pula dalam rapat tersebut utusan-utusan dari luar; Andi Ngaru Pettalolo dan Lagama Borahima dari PIM Donggala, Daeng Maladja Lamakampali dari Merah Putih Tawaeli, Yunus Sunusi dan Jabar Rasau dari Palu, Daeng Pawara Lahusaeni dari Bora, Talob Laciala dan R. Laulemba dari Dolo. Dan dari Pevunu-Kaleke adalah Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S., Haji Lasangka, Lakacinda, L. Pakamundi, Datupamusu, Gagaramusu, Datupalinge serta semua staf Merah Putih Markas Kaleke.

Satu regu anggota laskar disiapkan untuk menjaga keamanan. Pertemuan akhirnya menghasilkan tekad untuk mempersatukan kekuatan baik ke dalam lingkungan maupun ke luar serta cara-cara dan siasat perjuangan di tempat masing-masing. Gerakan lebih ditingkatkan menjadi gerakan nyata melalui pembentukan partai-partai politik setempat dan sebagai badan-badan pengaman Gerakan Merah Putih harus diikuti sertakan di tiap-tiap tempat. Untuk kekuatan politik ke luar agar segera dibentuk sebuah gabungan dari semua partai politik dan organisasi massa yang ada. Untuk mempererat hubungan dengan seluruh rakyat akan ditempuh cara penggemblengan melalui rapat umum atau melalui pertunjukan-pertunjukan sandiwara dengan ceritera-ceritera yang bertema perjuangan, dalam kehidupan mengusahakan menanamkan rasa harga diri dengan melenyapkan perbudakan.⁷⁾

Selain dari pada gerakan-gerakan yang disebutkan tadi, di Palu oleh laskar Merah Putih juga dilakukan pembakaran gudang *koprafonds* pada tahun 1946 di kampung Besusu (lokasinya sekarang dijadikan tempat Bioskop Mandala).

Pada tahun 1946 itu pula penduduk Besusu menaikkan bendera merah putih di atas pohon kelapa.⁸⁾

Wilayah Taweli – Parigi sampai Sabang aktivitas gerakan Merah Putih yang dilakukan adalah melakukan *sabotase-sabotase* seperti pembakaran gudang *koprafonds* di Wani pada bulan April 1946 dan pembakaran gudang yang sama di Tompe/Sirenja pada tahun 1948.

7) M. Dj. Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulteng, 1975, hal. 43 - 44.

8) Wawancara dengan Bapak Kadmah di Kamp. Tawanjuka, Palu, 21-9-1979

Kode instruksi untuk mengadakan pembakaran gudang koprafonds adalah dengan mengirimkan puntung rokok yang sudah mati apinya dalam amplop. Untuk membakar jembatan kodenya memasukkan puntung korek api yang sudah mati ke dalam amplop. Amplop-amplop itu dikirim kepada orang-orang yang ditugaskan melakukannya.⁹⁾

Menurut Haji M. Yondi Maranua pembentukan laskar Merah Putih di Tawaeli dilakukan sekitar bulan Nopember 1945 dan kelaskaran ini erat hubungannya dengan KRIS Muda Mandar yang dibawa ke Tawaeli oleh Andi Getie ketika datang ke Tawaeli dari Sulawesi Selatan. Andi Gatie menghubungi M. Yondi Maranua, D.M. Lamakampali, Said Ali Sahibu dan Mohammad Amin Amu.

Susunan personalia laskar Merah Putih Tawaeli adalah sebagai berikut :

Said Ali Sahibu, sebagai Komandan.

M. Yondi Maranua, sebagai Kepala Staf.

beranggotakan 1 (satu) kompi, sebagaian dilatih di Poso, sebagian bekas *Heiho* dan *Jumpo* serta *Seinendan*.

Perwakilan laskar di Donggala adalah Ladising dan Umar Kandia.

Pada bulan Pebruari 1946 didirikan Gerima (Gerakan Indonesia Merdeka) dan pelopor-pelopornya adalah Said Ali Sahibu, Mohammad Amin Amu dan M. Yondi Maranua. Anggaran Dasar Gerima dibuat berpedoman pada Anggaran Dasar Partai PNI (Partai Nasional Indonesia).

Susunan pengurus dari Gerima adalah sebagai berikut :

Penasihat : Marjun Habie.

Ketua : Haji Borman Lembah.

Wakil Ketua : Radjadato Lembah.

Sekretaris : Mohammad Amin Amu.

Bendahara : D.M. Lamakampali.

Pembantu : Said Ali Sahibu dan M. Yondi Maranua.

Susunan pengurusnya ini didasarkan pada perhitungan politis pada saat itu. Gerima ini sebenarnya adalah merupakan suatu partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan sekaligus sebagai pelindung dari laskar Merah Putih menghadapi kekejaman Belanda terhadap pejuang-pejuang yang tertangkap.

⁹⁾ Wawancara dengan Bapak H.M. Yondi Maranua di Tawaeli, 27-9-1979.

Wilayah dari perkembangan Gerima adalah Kabonga, Parigi, Tompe, Sabang dan sebagian dari Biromaru.

Pada saat dilaksanakannya demonstrasi ke tangsi Palu untuk menuntut pembebasan tokoh-tokoh pimpinan laskar-laskar perjuangan yang sedang ditahan oleh Belanda, maka pimpinan laskar Merah Putih dari Tawaeli telah lebih dahulu diambil sumpahnya bertempat di rumah mertua ari D.M. Lamakampali oleh Daeng Mari Djaelangara. Yang disumpah adalah : Said Ali Sahibu, M. Yondi Maranua dan D.M. Lamakampali.

Di daerah Luwuk walaupun telah terbentuk juga kelaskaran sebagai bagian dari KRIS Muda Mandar/Divisi IV KRIS Muda Luwuk akan tetapi sejak datangnya Belanda/NICA yang disambut baik oleh raja Banggai bersama bekas aparat pemerintah Belanda yang dikembalikan pada tugas/kedudukannya semula oleh Belanda, sedangkan bantuan senjata yang dinanti dari Sulawesi Selatan tidak datang-datang maka laskar Merah Putih di Luwuk tak dapat berbuat apa-apa. Apalagi tokoh-tokoh aparat pemerintah Belanda yang pernah ditahan pada peristiwa Merah Putih tahun 1942 mulai menggugat kembali, mengusut perkara perebutan kekuasaan oleh Gerakan Merah Putih 1942. Akibatnya terjadilah penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh pejuang Merah Putih tahun 1942 di sana, yang sesudah Proklamasi Kemerdekaan menjadi pula tokoh-tokoh Laskar KRIS Muda Luwuk.

Oleh sebab itu tak ada gerakan yang dapat dilakukan apalagi ada tokoh-tokoh yang tadinya membantu Gerakan Merah Putih, berbalik bekerja sama dengan Belanda.

B. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL

Sejalan dengan operasi-operasi yang dijalankan oleh tentara Belanda di Sulawesi (termasuk di Sulawesi Tengah) untuk merintis jalan yang akan dilakui oleh tindakan politik ketatanegaraannya, maka setelah mereka berhasil menarik sebagian dari raja-raja yang kembali memangku jabatan mereka begitu pula setelah berhasil menarik sebagian pegawai bangsa Indonesia bekerja sama dengan mereka, maka mulailah direncanakan pembentukan Negara Indonesia Timur.

Pembentukan Negara Indonesia Timur ini dimaksudkan untuk menentang Negara Kesatuan yang dipelopori oleh Republik Indonesia. Jadi dengan pembentukan NIT dimaksudkan mengadu domba

kan rakyat yang mendiami daerah RI dengan rakyat daerah NIT.¹⁰⁾

Konperensi Malino dimulai tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Menurut Belanda, konperensi Malino ini adalah sebagai pelaksanaan pidato radio Ratu Belanda pada tahun 1942, bahwa akan diberikan kepada Hindia Belanda "*Hak menentukan nasib sendiri*". Konperensi ini meliputi daerah-daerah administrasi Timur Besar, Borneo (Kalimantan)⁴, Bangka-Bi.iton dan Riau. Wakil-wakil yang dikirim ke konperensi tersebut hanyalah mereka yang menyokong politik Belanda. Dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi ditulis bahwa utusan dari Sulawesi Tengah adalah Lora Molindo dan utusan ini adalah atas penunjukan Belanda sendiri.

Hasil konperensi Malino adalah rencana untuk membangun kembali ketatanegaraan Hindia Belanda selaku satu keseluruhan Indonesia seluruhnya yang berbentuk Federasi (Negara Indonesia Serikat) di dalam mana masing-masing bahagian (negara) akan disusun secara desentralisasi atau dipertahankan dalam daerah-daerah yang berbentuk otonom, sesuai dengan keinginan dari berbagai golongan penduduk atau dengan kata lain mau memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lima bulan setelah konperensi Malino diadakanlah konperensi Denpasar pada tanggal 8 Desember 1946 di Denpasar Bali.

Utusan Sulawesi Tengah yang menghadiri konperensi Denpasar adalah :

1. Adrial Duma Andilolo.
2. Daeng Maraja Lamakarate.
3. Tjatjo Idjazah.
4. Ince Ahmad Dahlan.
5. Wongko Lemba Talasa.
6. Mr. I Gde Panetje.

Sebagai diketahui bahwa konperensi Denpasar diadakan setelah persetujuan Linggarjati di mana antara lain persetujuan Linggarjati mencantumkan menyetujui pembentukan Negara Indonesia Serikat selanjutnya perhubungan antara Indonesia dan

10) Kementerian Penerangan RI, *Buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, 1953, hal. 75.

Belanda akan diatur dalam satu status.

Oleh Van Mook dikatakannya bahwa keinginan-keinginan konferensi Malino telah lengkap dimasukkan dalam isi persetujuan Linggarjati. Hasil konferensi Denpasar adalah terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai salah satu negara boneka karya Van Mook. Dan NIT ini merupakan pelaksanaan politik *divide et impera* H.J. Van Mook yang tidak senang pada Republik Indonesia yang menginginkan negara kesatuan. Sebelum terbentuknya NIT maka pemerintahan di Sulawesi Tengah kembali seperti pada zaman Belanda sebelum datangnya Jepang. Karena wilayah Sulawesi Tengah terbentuk dari beberapa kerajaan maka raja-raja tetap diakui kekuasaannya dan sebagai aparat pemerintah Belanda ditempatkan *Gezaghebber* atau kontrolleur di tiap-tiap Afdeling.

Setelah Belanda/NICA kembali berkuasa di Sulawesi Tengah maka yang menjadi Asisten Residen di Poso adalah *Rijdslijk* Asisten Residen Donggala adalah *De Leuw*. Oleh karena Donggala hancur akibat pemboman perang dunia ke II maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Donggala ke Palu.

De Leuw ini hanya sebentar memerintah di Palu karena digantikan oleh *HPB L. Baraw*.

Sejak 11 Januari 1946 seluruh wilayah keresidenan Menado telah diduduki NICA. Administrasi dan personalia dikembalikan pada status yang lama sebelum perang dunia. Rehabilitasi dan prioritas diberikan kepada pegawai-pegawai yang setia kepada Belanda. Rakyat yang sebagian besar telah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamakan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta spontan mendukung RI, dengan bimbingan dari tokoh-tokoh pergerakan setempat. Sebagai wilayah dari keresidenan Menado maka Sulawesi Tengah diatur pemerintahannya dari Menado.

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah menjadi Swapraja dan rajanya bergelar Kepala Swapraja. Kemudian jabatan kontrolleur diganti namanya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatselijke Bestuur*).

Wilayah Buol pada waktu itu merupakan bagian dari *Afdeling Gorontalo*. Pada bulan Mei 1946 sebagai HPB Buol ditetapkan Haji Ahmad Turungku (sebenarnya juga raja Buol). Ia datang ke Buol setelah dilantik di Menado sebagai HPB, bersama *Inspektur polisi Vienke* (orang Belanda) dan beberapa orang polisi lainnya mengadakan upacara pendudukan NICA, menaikkan bendera Merah Putih Biru dan bendera Australia (Sekutu). Sebagai reaksi

atas hal ini maka pada bulan September 1946 di Paleleh terjadi pengrobekan bendera Belanda dipimpin oleh seorang Tionghoa bernama *Tyong, wijkmeester* Tionghoa. Pada waktu itu yang menjadi Marsaoleh di Paleleh adalah Abdul Mangkona.

Kelanjutan aksi ini adalah didirikannya sebuah gerakan kebangsaan lokal bernama *Badan Persatuan Suara Rakyat (BPSR)* dengan personalianya :

Abdul Mangkona, sebagai Ketua.

Ali Mangkona, sebagai Wakil Ketua.

Usman Binol, Panitera/Sekretaris.

T. Kawandaud, H.A. Umar dan kawan-kawannya menjadi Pembantu.

Badan tersebut bertugas memberi penerangan kepada rakyat tentang keadaan situasi dalam perjuangan kemerdekaan melalui hak-hak demokrasi. Akibatnya *HPB* Buol bertindak menonaktifkan Abdul Mangkona dari jabatan Marsaoleh.

Dalam beleid politiknya, NICA mengarah kepada "hak penentuan nasib sendiri" bagi kaum politisi di Sulawesi Utara-Tengah untuk mana Van Mook telah menyiapkan konsepsi federalisme untuk seluruh Indonesia di bawah naungan Mahkota kerajaan Belanda. Menurut T. Kawandaud, pada permulaan bulan Nopember 1946 dalam rangka situasi "Linggarjati" dan menguatkan kedudukan NICA, maka datanglah ke Buol rombongan Pemerintah Gorontalo dikepalai oleh Asisten Residen Gorontalo *Tweerde*, memberikan instruksi supaya tiap-tiap distrik memilih 2 (dua) orang calon untuk dikirim ke konperensi Denpasar. Pada tanggal 17 Nopember 1946 terpilih calon-calon dari rakyat Paleleh yaitu Abdul Mangkona dan H.A. Umar, Distri Bunobogu: Bumbu Salakea dan Usman Bnol, *Distrik Liaw*: T. Kawandaud dan H.A. Gafur. Sebagai utusan dari pemerintah Buol adalah M.A. Turungku dan L. Lontoh. Utusan-utusan dari Buol ini lalu berangkat ke Gorontalo melalui laut. Pada prinsipnya wakil-wakil arkyat sebagai wakil distrik yang terpilih itu tidak ingin menyambut konperensi Denpasar. Terpaksa Pemerintah mengambil kebijaksanaan supaya Afdeling Gorontalo terwakili maka ditetapkanlah : *Ayuba Wartabone (Jogugu Suwawa)* dan *H.U. Katili (HPB)* Gorontalo ke konperensi Denpasar.

Utusan-utusan dari Buol lalu kembali dan membawa Cabang Gerakan kemerdekaan untuk Buol dengan susunan pengurus :

Ketua : Bumbu Salakea.

Wakil Ketua : T. Mangkona.
Penulis : M. Mailili.
Bendahara : T. Kawandaud.
Pembantu-2 : H.A. Umar, Usman Binol, H.A. Gafur dan Abdul
Mangkona.

Berdasarkan landasan "hak penentuan nasib sendiri" maka partai-partai politik diperbolehkan berdiri berkembang dan bergerak secara aktif. Melalui partai politik ini merupakan saluran demokrasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Di Menado didirikanlah Barisan Nasional Indonesia (BNI) yang berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Cabang-cabang BNI ini kemudian didirikan pada tanggal 1 Januari 1947 di Poso dan Kolonodale.

Konperensi Denpasar akhirnya menghasilkan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 dengan konstitusi sendiri ala Van Mook. Semua wakil-wakil yang ikut dalam konperensi Denpasar dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Sementara. Wakil-wakil Sulawesi Tengah dalam Dewan Perwakilan Sementara itu adalah Tjatjo Idjazah, Kepala Distrik Palu Timur dan Daeng Maraja Lamakarate mewakili Afdeling Donggala. Wongko Lemba Talasa, Bestuur Asisten Poso dan Ince Ahmad Dahlan, Ajunct penilik sekolah Banggai sebagai wakil dari Afdeling Poso. Dengan perantaraan NIT Belanda menentang dengan sekeras-kerasnya aliran-aliran yang pro Republik Indonesia. Pemerintah NIT hanya mengenal dan merayakan kemerdekaan tanggal 24 Desember 1946, tanggal 17 Agustus 1945 dilarang dirayakan di wilayah NIT.

Demikianlah dengan siasat yang licik Belanda melaksanakan politik kekuasaannya di wilayah NIT seolah-olah memang betul telah memenuhi *keinginan* dan tuntutan rakyat untuk merdeka sehingga dapat dibanggakannya pada dunia Internasional bahwa wilayah NIT sudah dikuasainya dan sudah terlepas dari Republik Indonesia. Tapi pada hakekatnya semua itu hanyalah sandiwara belaka karena orang-orang yang didudukan dalam pemerintahan hanyalah orang-orang yang dapat dan mau diperalatnya, yang mau menuruti kemauan Belanda. Tokoh-tokoh yang pro Republik umumnya ditangkapi dijebloskan ke dalam penjara terutama tokoh-tokoh laskar dituduh ekstremis sehingga perlawanan-perlawanan bersenjata di Sulawesi Tengah tak dapat berjalan, hanya berbentuk sabotase-sabotase dan perlawanan melalui perjuangan partai-partai

politik.

Dalam naskah peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur. Bab III (peraturan Tatanegara Sementara) pasal 14 point 5 e dituliskan :

"Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari resort afdeling Poso dan Donggala, melingkupi keradjaan-keradjaan Todjo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi-Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong dan Toli-Toli, semuanya terikat satu sama lain setjara perserikatan." 11)

Oleh sebab itu kepala-kepala Swapraja dari Sulawesi Tengah dikumpulkan di Poso dan dibentuklah Dewan Raja-Raja pada bulan Mei 1947. Pada saat itu timbul masalah siapa yang akan menjadi ketua Dewan Raja-Raja karena dari perimbangan jumlah Swapraja ternyata Sulawesi Tengah Bagian Barat (*Afdeling Donggala*) lebih banyak dari pada bagian Timur (*Afdeling Poso*). Untuk mengatasi hal ini maka Ide Anak Agung Gde Agung selaku Menteri Dalam Negeri NIT memutuskan: Ketua Dewan Raja-Raja Sulawesi Tengah adalah R.M. Pusadan dari Afdeling Donggala dan wakilnya adalah W.L. Talasa dan pusat pemerintahan adalah Poso. 12)

Sejak tanggal 2 September 1948 dibentuklah Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang meliputi Afdeling Donggala dan Afdeling Poso dengan pusat pemerintahan untuk Sulawesi Tengah sampai penyerahan kedaulatan adalah Poso. Dalam Dewan Raja-Raja ini tenaga orang-orang Belanda masih tetap berfungsi membantu daam bidang keuangan yaitu *Kerlen*, Sekretaris Dewan Raja adalah *Spijker* dan Kepala Pekerjaan Umum adalah *Sachomski*.

C. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN

1. Tata Pemerintahan

Susunan tingkat-tingkat pemerintahan di Sulawesi Tengah pada zaman NIT itu menurut Horas Siregar adalah sebagai berikut: Di tiap-tiap Swapraja dikepalai oleh kepala Swapraja (raja). Tiap-tiap swapraja terdiri dari beberapa distrik yang dikepalai oleh

11) Kementerian Penerangan RI, *Buku Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi*, 1953, hal. 114.

12) Wawancara dengan Bapak R.M. Pusadan di kampung Panasakan, Toli-Toli, tanggal 15 Nopember 1979.

seorang PHB (kontrolieur).

Pada zaman Belanda sebelum zaman pendudukan Jepang kontrolieur itu adalah orang Belanda. Pada zaman NIT HPB ini disamping dijabat oleh orang Belanda juga dijabat oleh orang-orang Indonesia yang telah berpendidikan (umumnya raja-raja setempat). Bestuur Asisten dan *GAIB (Gouvernements Ambtenaar voor Inlandsche Bestuur)* menjadi pembantu kepala-kepala Swapraja sebab mereka keluaran *Bestuur School*, sedangkan kepala-kepala swapraja di antaranya ada yang buta huruf.¹³⁾

Di daerah Poso oleh Barisan Nasional Indonesia Cabang Poso melakukan perjuangan dalam bidang politik memprotes segala tindak-tanduk tentara Belanda yang melakukan penangkapan-penangkapan tokoh pejuang, penekanan dan penindasan pada rakyat supaya jangan berjuang menyokong Republik Indonesia. Di samping itu BNI juga secara lihai menjalankan pengaruhnya menarik anggota-anggota tentara Belanda untuk menjadi anggota dengan mengeluarkan kartu pengenalan BNI berlambang banteng, di samping menyusupkan anggota-anggotanya dalam jawatan pemerintahan.

2. Sosial Ekonomi

Setelah perang dunia II selesai, rakyat Sulawesi Tengah yang menderita kurang sandang dan pangan pada zaman Jepang, oleh pemerintah NICA mulai mendatangkan bahan-bahan sandang dan pangan ke Sulawesi Tengah.

Kantor-kantor distribusi didirikan sebagai badan yang mengurus penyaluran barang-barang kebutuhan pokok. Oleh pemerintah Belanda pada waktu itu diusahakan agar barang-barang dapat disebarkan seluas-luasnya sampai ke kampung-kampung. Menurut A. Bustaman, pada tahun 1946 di Donggala dirikan *NIGEO (Nederlands Indische Gouvernement Economie Organisatie)*. Dari tahun 1946 - 1949 NIGEO ini mensuplai barang sandang pangan untuk didistribusikan kepada rakyat, dijual pada rakyat dengan harga murah. Terutama pada pegawai-pegawai dibagikan kupon-kupon pembagian untuk memperoleh jatah sandang dan pangan seperti beras, gula, mentega, susu, sabun, minyak tanah dan lain-lain.

Tahun 1949 NIGEO ini berubah menjadi *Borsumij*.

Hubungan melalui laut mulai pula diperlancar dengan mengaktif-

13). Wawancara dengan Bapak Horas Siregar di Palu, tanggal 17-9-1979.

kan kapal-kapal *KPM* secara tetap dan teratur.¹⁴⁾

Dengan mulai lancarnya pengangkutan laut maka *Stichting Het Coprafonds* yang mula-mula didirikan pada bulan September 1940 pada bulan Nopember 1950 berubah nama menjadi Yayasan Kopra. Tanaman kelapa rakyat yang merupakan pula hasil terutama Sulawesi Tengah di samping kayu hitam, mulai mendapat harga pasaran yang baik setelah pada zaman Jepang tak punya harga. Perdagangan kopra kembali lancar hingga rakyat yang memiliki kelapa mulai lagi memiliki uang. Di samping itu perahu-perahu pinisi mulai pula aktif melayari pantai Sulawesi Tengah menghubungkan Sulawesi Tengah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Melalui perahu-perahu ini pulalah hubungan antara pejuang-pejuang di Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan dijalin selain melalui jalan darat Palopo – Poso.

Berhubung karena tidak semua tempat dapat dihubungi dengan kapal-kapal *KPM* terutama dalam hal pelayaran pesisir, maka pada bulan Juli 1947 didirikan *NV Maskapei Kapal Sulawesi Selatan (MKSS)* untuk menghubungkan antara lain trayek Makassar – pantai Barat Sulawesi sampai Toli-Toli.

Pada bulan dan tahun yang sama didirikan pula *NV Nocemo* di Manado. Maskapei ini melayari trayek Manado – pantai Utara Sulawesi – Toli-Toli, Manado, Teluk Tomini dan sebagainya.

Bulan April 1947 didirikan *NV Perkapalan dan Pelayaran Indonesia Gorontalo (Perdigo)* dengan trayek kapalnya Teluk Tomini.

Pelabuhan-pelabuhan yang aktif untuk export hasil-hasil Sulawesi Tengah adalah Donggala, Toli-Toli, Parigi, Poso, Luwuk dan Kolonodale. Yang diexport adalah kopra, kayu hitam, damar dan hewan-hewan potong sapi dan domba.

Pada umumnya rakyat hidup dari bertani, mengumpulkan hasil hutan, nelayan dan berburu (untuk konsumsi sendiri), beternak dan dagang kecil-kecilan.

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan Belanda di Sulawesi Tengah maka oleh pemuda-pemuda pejuang diadakan sabotase-sabotase berupa pembakaran gudang-gudang *Coprafonds* di Poso, Donggala, Palu dan Wani, di samping membongkar jembatan-jembatan.

Juga dalam pembongkaran muatan kapal, buruh-buruh pelabuhan sengaja memperlambat kerja mereka sehingga kapal-kapal tertahan

14). Wawancara dengan A. Bustaman di Donggala, tanggal 23-9-1979.

lama di pelabuhan.

Sejak terjadinya pembakaran-pembakaran gudang koprafonds pada tahun 1946 maka oleh Belanda diadakanlah penjagaan-penjagaan ketat pada gudang-gudang kopra oleh satuan KNIL.

3. Sosial Budaya

Di bidang kehidupan seni budaya masyarakat Sulawesi Tengah kembali mengembangkan kebudayaan daerah yang selama pendudukan Jepang tak dapat dilaksanakan karena kehidupan ekonomi yang susah di samping karena susana perang dan tekanan penguasa Jepang yang membatasi gerak setiap orang. Upacara-upacara adat mulai lagi dilaksanakan dalam pesta-pesta adat terutama oleh golongan bangsawan. Dalam pesta-pesta raja dan bangsawan sering diadakan permainan adu ayam dengan memakai taruhan.

Pada pesta-pesta umum adu betis (bahasa daerah *Binti*) kembali menjadi populer di samping silat/kontau diiringi gendang dan gong. Juga pacuan kuda sering dilakukan sebagai tontonan dan bertaruh.

Dalam pacuan-pacuan kuda ini anak-anak sekolah secara bergilir meramaikannya dengan suling bambu. Untuk lembah Palu terkenal rombongan suling bambu dari kampung Kantevu, Kulawi. Pasar malam hampir setiap waktu diadakan di mana dalam pasar-malam-pasar malam itu diisi dengan permainan King, pertandingan-pertandingan musik bambu dan tontonan sandiwara.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1949, terutama pada hari-hari besar Belanda, ulang tahun NIT dan pesta kawin/putra raja-raja. Seni tari Jepang (pengaruh Islam) diiringi gambus dan marwas yang telah menjadi seni tari rakyat di kampung-kampung mulai lagi populer ditampilkan pada pesta-pesta perkawinan dan pesta-pesta lainnya.

Melalui tontonan sandiwara-sandiwara ini kaum pejuang kemerdekaan di Sulawesi Tengah menggembleg semangat juang rakyat melalui ceritera-ceritera yang bertemakan perjuangan.

Tahun 1946 - 1947 rombongan sandiwara Panca Warna datang dari Surabaya dipimpin oleh Djamaluddin Malik (almarhum). Antara lain lakon yang pernah ditampilkan adalah Arek-Arek Suroboyo. Tahun 1948 datang rombongan sandiwara Mutiara dari Ujung Pandang dipimpin oleh Ibrahim Alham. Ceritera-ceritera yang ditampilkan adalah ceritera-ceritera dengan tema perjuangan. Tahun 1949 - 1950 rombongan sandiwara Nusantara datang dari

Banjarmasin dipimpin oleh Sukri Main. Rombongan inipun menampilkan ceritera-ceritera perjuangan. Malah pernah main di Kaleke, kampung tempat Laskar Merah Putih pimpinan Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. dan ikut pula bermain pemuda-pemuda Merah Putih di tempat itu.

Akibat dari pertunjukan-pertunjukan sandiwara yang menampilkan ceritera-ceritera dengan tema perjuangan itu maka pemimpin-pemimpin sandiwara bersama sponsor-sponsornya atau panitia-panitia yang mendatangkan grup-grup sandiwara itu sering-sering dipanggil oleh polisi NICA untuk diinterogasi dan *diproses verbal* dan mendapat teguran jangan mengganggu keamanan.

Selain usaha mengobarkan semangat perjuangan rakyat melalui ceritera-ceritera sandiwara kekuatan masa pun digalang dan digembleng melalui perjuangan dengan wadah-wadah partai politik dan organisasi-organisasi massa.

Partai politik yang terbanyak anggotanya dan tertua di Sulawesi Tengah adalah PSII mulai diaktifkan kembali setelah dibekukan pada zaman Jepang. Di samping itu didirikan pula partai-partai politik yang bersifat lokal di antaranya di Sigi-Dolo dibentuk partai Perjuangan Rakyat Indonesia Merdeka disingkat *PRIMA* berpusat di Kaleke dengan ketuanya Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. dan sekretarisnya M. Dj. Abdullah.

Di Tawaeli Gerakan Indonesia Merdeka disingkat *GERIMA* ketuanya Haji Borman Lembah dan sekretaris Mohammad Amin Amu, di Wani Partai Rakyat Indonesia disingkat *PARINDO* dipimpin oleh Mohammad Arsyad dan Mashud Pettalolo.

Di Palu dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia disingkat *API*, ketuanya R. Ambyn dan sekretarisnya M. Yunus Sunusi.

Di Biromaru kaum wanitanya membentuk *PERWANI* dipimpin oleh Ny. Kalsum L. Rajatiangso dan Sitti Zubaedah Abdullah.

Yang dipilih menjadi penasihat dari semua partai politik di Lembah Palu dan sekitarnya adalah Dr. Soewondo kepala Rumah Sakit Umum Palu. Tugas utama dari Dr. Soewondo adalah menanam pengertian dan arti kemerdekaan serta membina raja-raja dan aparatnya untuk menyadari makna kemerdekaan bangsa dan negara yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 2 Januari 1947 seluruh partai politik di Palu dan sekitarnya mempersatukan diri dalam satu wadah gabungan bernama Gabungan Partai Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah disingkat *GAPPRIST* berpusat di Palu.

Ketua dan sekretarisnya terpilih masing-masing Mohammad Arsyad dari PARINDO Wani dan M. Dj. Abdullah dari PRIMA Sigi Dolo.

Anggota-anggotanya : "PSII Cabang Palu

Parpima Palu

Gerima Tawaeli

Parindo Wani

Prima Sigi-Dolo

Api Palu

Perwani Biromaru."

Penasihat gabungan partai ini tetap Dr. Soewondo kepala Rumah Sakit Umum Palu (kemudian pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta). Program dari gabungan ini ialah menghimpun kekuatan kedalam dan ke luar dan telah mengambil beberapa keputusan penting untuk disampaikan kepada pemerintah RI di Jogjakarta. Di samping itu mengadakan kerja sama dengan pergerakan rakyat di daerah lain di Sulawesi Tengah (Poso, Toli-Toli dan Donggala) juga dengan pergerakan-pergerakan di Sulawesi Selatan.

Antara lain *Gapprist* mengirim pernyataan kepala pemerintah RI di Jogjakarta mendukung keputusan Linggarjati yang dihasilkan oleh wakil pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Salinan pernyataan dukungan itu disampaikan pula kepada pemerintah setempat dalam hal ini Asisten Residen di Palu. Reaksi dari *A.R. De Mei* dan *HPB Van Oosten* setelah menerima salinan pernyataan itu adalah memanggil pimpinan *Gapprist* Jabar Pasau dan M. Dj. Abdullah dan mengatakan bahwa sikap *Gapprist* ini telah melanggar hukum di daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian wilayah dari NTT.

Oleh Wakil *Gapprist* dijawab bahwa dalam pasal 11 keputusan Linggar jati yang disetujui oleh wakil pemerintah Indonesia dan wakil pemerintah Belanda membenarkan adanya daerah-daerah dalam negara Indonesia untuk menentukan sikap tentang kedudukan atau status daerahnya.

Tanah Kaili khususnya dan Sulawesi Tengah umumnya adalah termasuk juga sebagai daerah yang mempunyai hak-hak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia sehingga merasa berhak untuk menentukan sikap terhadap isi keputusan itu.¹⁵⁾

15). Haji Mohammad Djaruddi Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*. Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, tahun 1975 hal. 44-47.

4. Pendidikan dan Agama

Bidang pendidikan di Sulawesi Tengah pada masa perjuangan pisik berjalan seperti biasa. Sampai tahun 1947 sekolah-sekolah yang ada umumnya hanya tingkat sekolah dasar. Pada tiap-tiap kampung terdapat SD yang berkelas III (tiga). Untuk melanjutkan pelajaran ke kelas yang lebih tinggi sampai tamat kelas VI (enam), murid-murid harus ke ibu kota kerajaan atau *landschap* karena hanya di situ terdapat sekolah berkelas IV (empat) sampai VI (enam). Uang sekolah murid-murid sebulan berkisar dari Rp.50,- sampai Rp.100,-.

Untuk memepelajari peneetahuan Agama bagi anak-anak dibuka pula sekolah-sekolah agama atau madrasah-madrasah pada waktu sore dari jam 15.00 - 17.30, sehingga anak-anak belajar pagi di sekolah umum dan sore harinya belajar di madrasah. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan meliputi Fikhi, Tauhid, Bahasa Arab dan mengaji Al Qur-an. Guru-gurunya ada yang dari Sulawesi Selatan di samping mereka tamatan sekolah Al-Khairat.

Guru-guru yang mengajar pada madrasah-madrasah itu tanpa gaji tertentu tapi sekedar atas hasil swadaya dari masyarakat tiap-tiap kampung.

Di samping itu sekolah-sekolah agama Alchairat pun kembali lagi dibuka dan berjalan seperti sebelum datangnya Jepang baik di Palu maupun cabang-cabangnya yang ada di kampung-kampung dan kota-kota lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. Lembaga pendidikan Islam Alchairat ini mula-mula hanyalah usaha pribadi dari pendirinya Haji Said Idrus Bin Salim Aldjufri, yang didirikan pada tanggal 30 Juni 1930 di Palu kemudian sejak tanggal 21 Agustus 1950 diasuh oleh sebuah Yayasan yang berbadan hukum di bawah taktis Pengurus Besar Alchairat.

Di samping tugas pengembangan pendidikan, Alchairat juga melaksanakan tugas Dakwah Agama dan kegiatan sosial lainnya. Di daerah-daerah lainnya seperti Wani, Parigi dan Donggala, Muhammadiyah pun mulai pula melanjutkan aktivitasnya setelah berhenti pada zaman Jepang. Usaha-usaha dakwah agama giat dilakukan dan tiap bulan Ramadhan selalu didatangkan ulama-ulama dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan memberikan ceramah-ceramah agama di mesjid-mesjid.

Pada tahun 1947 didirikan SMP Negeri 2 (dua) tahun di Palu dengan pimpinannya Rumbayan. Gurunya hanya 3 (tiga) orang yaitu Rumbayan, Pakasi dan Tairas. Murid-muridnya berasal dari

seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1949 murid-muridnya \pm 100 orang dan tahun 1949 itu sudah menamatkan pelajarannya untuk pertama kalinya. Pada tahun 1949 itu pula, gedung SMP itu terbakar gedungnya hingga terpaksa pindah ruangan belajarnya dengan memakai gedung *Sositeit* Palu, yang sekarang lokasinya gedung RRI dan gedung kesenian Krida Madamba Palu.

Setelah gedung SMP itu terbakar maka terjadilah pergantian pimpinan dari Rumbayan kepada *De Aalbers*. (orang Belanda). Di daerah Poso sebelum datangnya Jepang, pendidikan banyak yang ditangani oleh Zending tetapi ketika zaman Jepang campur tangan gereja dalam pendidikan dilarang. Usaha pengembangan agama Kristen pun tidak berjalan lancar selama itu. Petugas-petugas zending orang Belanda ditangkapi dan *diinternir* di Menado selama zaman Jepang.

Setelah kalahnya Jepang pada Sekutu maka kembali petugas-petugas zending yang telah dibebaskan oleh NICA kembali menjalankan tugas missinya di daerah Poso, di samping itu datang lagi tambahan tenaga baru dari daerah Belanda.

Pengembangan agama Kristen di daerah Sulawesi Tengah berjalan lancar pada masa-masa revolusi fisik. Baik yang dijalankan oleh Bala Keselamatan di lembah Palu maupun yang dijalankan oleh Zending (*NZG*) di Poso dan *Indische Kerk* di Luwuk. Pada tanggal 18 Oktober 1947 gereja Kristen Sulawesi Tengah dinyatakan berdiri sendiri setelah lebih dahulu mengajukan permintaan kepada *Letnan Gubernur Jenderal* di Batavia, untuk diizinkan berdiri sendiri. 16)

Sebelumnya itu gereja Kristen di Poso masih dibina secara langsung oleh *Konsulat NZG* di Batavia. Dengan berdirinya sebagai suatu institusi Gereja Kristen Sulawesi Tengah disingkat GKST maka jemaatannya pada waktu itu meliputi jumlah \pm 80.000 orang dan aktivitas penginjilannya pada suku-suku yang masih animis di Sulawesi Tengah ditingkatkan. Pekerjaan Bala Keselamatan di Sulawesi merasa lebih untung jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa, karena pekerjaan Bala Keselamatan di Sulawesi dapat berjalan lancar di tengah-tengah masa pergolakan. Karena itu

16) Jan Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, tahun 1977, hal. 454.

kesulitan tenaga-tenaga opsir kurang dirasai karena ada *kandidat* yang masuk ke sekolah opsir.

Suatu kehormatan dan kebanggaan karena kursus pertama sesudah perang diadakan di Kalawara (pada tanggal 15-8-1947), ketika itu *Mayor Poutiainen* menjabat sebagai pemimpin sekolah opsir, dia mendapat dukungan dan bantuan dari kantor Divisi, *Letnan Kolonel dan Nyonya Woodward*, sebagai komandan Divisi, dibantu oleh sekretaris Muda Divisi yang berasal dari Australia, senior *Kapten G.M. Callis*. Setelah perang kegiatan untuk pembaptisan dimulai lagi pada saat *Kolonel Woodward* disertai beberapa orang kadet pergi ke gunung. Di Morui 36 orang mereka baptis menjadi penganut Bala Keselamatan. Rombongan lainnya di bawah pimpinan 2 orangopsir wanita pergi ke Palu mengunjungi penjara dan tempat penampungan orang-orang berpenyakit kusta.

Di samping menambah penganut, para petugas penyebar Injil itu melakukan usaha-usaha di bidang sosial dan pendidikan dengan membuka kembali sekolah-sekolah dan klinik-klinik pengobatan.¹⁷⁾

Oleh zending yang bergerak di wilayah Poso dibuka kembali sekolah pendidikan untuk guru-guru sekolah rakyat dan untuk guru-guru *normalis* baik buat pengajaran Kristen maupun buat pengajaran pemerintah. Karena ternyata sekolah-sekolah rakyat gaya lama (3 atau 4 tahun) tidak lagi memadai. Di mana-mana diminta pengajaran rendah 6 tahun, sehingga untuk sekolah-sekolah itu dibutuhkan pengadaan guru secepatnya.¹⁸⁾

Itulah sebabnya *J. Kruyt* di Pamona membuka kembali sekolah pendidikan untuk guru-guru. Di samping itu pula dibuka suatu kursus pelengkap 2 tahun lagi bagi guru-guru sekolah rakyat yang telah bekerja selama beberapa tahun. Di samping pendidikan untuk guru, juga dibuka pendidikan untuk tenaga-tenaga penginjil. Di bidang pelayanan Medis pada zaman NIT didatangkan pula tenaga-tenaga dokter zending. Berturut-turut datang ke Poso dokter *J.F. De Wijn, A.C. Kruyt, J. Van Bergelijck* dan *J. Le Grand*. Juga dibuka klinik bersalin di Tentena oleh Bidan *Ny. M. Duy-*

17) M.M. Brouwer, *60 tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah*, Bala Keselamatan Kantor Pusat di Indonesia, Bandung, tahun 1977, hal. 79.

18) Jan Kruyt, *Op. Cit.*, hal. 447.

verman van Dongen sambil mulai membuka suatu sekolah pendidikan kebidanan untuk anak-anak puteri di tempat itu. Semua usaha itu di bawah pengawasan dokter di Poso. Anak-anak puteri yang telah tamat kemudian disebarkan bertugas di tempat-tempat lain yang membutuhkan.

5. Pers

Perkembangan pers di Sulawesi Tengah selama Revolusi Fisik kembali aktif dengan diterbitkannya "tengah bulanan" oleh wartawan Horas Siregar dan Haji Ince Makka.

Pada tahun 1947 diterbitkan majalah "Tjahaya" terbit 2 kali sebulan. Surat kabar ini dicetak di Samarinda dengan pemimpin redaksinya Horas Siregar. Wilayah peredarannya terbatas hanya di Palu dan sekitarnya. Tjahaya ini hanya beredar sampai tahun 1948.

Dari tahun 1948 sampai tahun 1949 terbit "Suara Sulawesi Tengah" 2 kali seminggu. Pemimpin redaksinya Horas Siregar dan Haji Ince Makka. Wilayah peredarannya meliputi seluruh daerah Sulawesi Tengah.

Di samping itu majalah-majalah dan surat-surat kabar dari pulau Jawa seperti Mimbar Indonesia, Merdeka dan lain-lain secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi beredar dari tangan ke tangan supaya jangan ketahuan oleh mata-mata Belanda.

Perkembangan dan jalannya perjuangan bersenjata pasukan-pasukan Republik Indonesia melawan Belanda di Jawa diikuti secara rahasia oleh pejuang-pejuang Sulawesi Tengah melalui radio yang hanya orang-orang tertentu saja memilikinya.

6. Organisasi kepemudaan dan kewanitaan

Di Palu pemuda-pemuda dibina melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Partai-partai politik dan organisasi yang memang telah mempunyai bagian kependuan sebelum zaman pendudukan Jepang kembali lagi mengaktifkan pembinaan pandu-pandunya. PSSI melalui pandu SIAP-nya, Muhammadiyah dengan HW-nya, PNI dengan Pemuda Demokratnya.

Sejalan dengan perkembangan perjuangan maka komandan sektor kota Palu M. Ali Pettalolo bersama kawan-kawan seperjuangannya seperti R. Ambya, Sandjoto, Suparlan (semuanya bekas Heiho), M. Yunus Sunusi, Hamzah Sunusi, T.H. Muda, Abas Palimuri dan Haji Hamzah mendirikan organisasi Angkatan Pandu

Indonesia (API) yang legal pada tanggal 27 Nopember 1946 di Palu.¹⁹⁾

Melalui API ini pemuda-pemuda digembleng semangatnya ditanamkan rasa kebangsaannya dan sedia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara.

Pernah diadakan latihan kepemudaan kira-kira seminggu lamanya paa tahun 1946 di Dolo dengan pelatihnya yang dipanggil Bung Durno bersama 3 orang kawannya. Mereka memberikan latihan dasar militer. Karena kepala distrik di tempat itu seorang tokoh pergerakan maka latihan tersebut tak dihalang-halangi.²⁰⁾

Pada tahun 1947 didirikanlah organisasi wanita yangindependen bernama Isteri Sedar dengan pimpinannya Puang Ratu (permaisuri raja Palu Djanggola), sekretarisnya adalah Ny. Aminah Djanggola Manopo dan wakil sekretaris adalah Ny. Aminah Siregar.²¹⁾

Isteri Sedar ini aktif dalam usaha-usaha sosial, mengadakan kursus pemberantasan buta huruf dan kursus-kursus ketrampilan wanita serta kegiatan-kegiatan olah raga.

Persatuan ibu-ibu Kristen pun didirikan dengan nama Kaum Ibu Immanuel. Organisasi-organisasi kewanitaan lainnya adalah Wanita Aisyiah, Wanita Muslimat dan Wanita Demokrat.

19) A.T. Nurdin, *Catatan Ringkas Riwayat Perjuangan Laskar PIM*.

20) Wawancara dengan L. Pandan di Pevunu-Kaleke, tanggal 16-9-1979.

21) Informasi tertulis Horas Siregar di Palu.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB

Menjelang diadakannya perundingan KMB pada umumnya pemerintahan NIT di daerah Sulawesi Tengah berjalan tenang-tenang saja karena raja-raja sebagai kepala pemerintahan Swapraja hanya menjalankan instruksi dari pemerintah NIT pada waktu itu. Kehidupan sehari-hari rakyatpun berjalan dengan tenang. Hanya tokoh-tokoh partai yang merupakan tenaga penggerak dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan yang tetap sibuk mengatur strategi dan perjuangan di bidang politik.

Perjuangan bersenjata dalam bentuk-bentuk kelskaran pada awal Revolusi Fisik kini beralih menjadi perjuangan politik. Dari pihak pemerintah NIT di daerah selalu berusaha untuk menarik tokoh-tokoh partai untuk bekerja sama. Namun sebagian dari mereka ada yang menjalankan politik non kooperasi sebagian pula mengambil siasat bekerja sama dengan tujuan supaya dapat mengikuti perkembangan politik pemerintahan dari dalam.

Dengan berbagai jalan tokoh-tokoh pejuang yang bergerak dalam wilayah lembah Palu berusaha membina segala lapisan masyarakat dari golongan rakyat biasa sampai pada tokoh-tokoh pemerintahan. Gelora pergerakan semakin meningkat pada tahun 1949 dengan berhasilnya kalangan pegawai dan guru-guru dipersatukan pada tanggal 6 Juni 1949 dalam wadah organisasi yang bernama Persatuan Pegawai Indonesia disingkat PERPI dengan ketuanya I Made Geria dan sekretarisnya M. Djaruddin Abdullah. Anggota PERPI ini terdiri dari pegawai-pegawai yang berada di kota Palu dan sekitarnya dari berbagai instansi.

Sebagai sayap kiri dari PERPI adalah Persatuan Isteri Sedar yang kemudian lebih disempurnakan susunan pengurusnya dan program kegiatannya.

Pada tahun 1949 Isteri Sedar yang berpusat di Palu diketuai oleh dokter Ny. Gerungan dan sekretarisnya Ny. Aminah Djangola Manopo serta wakil sekretarisnya Ny. Aminah Siregar. Mula-mula hanya bergerak di bidang pendidikan, sosial dan olah raga tapi kemudian ikut pula dalam kegiatan politik bersama PERPI.

Di bidang pendidikan Isteri Sedar giat melaksanakan pemberantasan buta huruf dipimpin oleh Ny. Sitti Zubaedah Abdullah dan Kalsum Sunusi bekerja sama dengan kepala SR Negeri II Palu. Pelaksanaannya meminjam tempat di gedung SR Negeri II Palu.

Pada bulan Juli 1949 dibentuk lagi satu wadah menghimpun organisasi-organisasi yang ada bernama Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia disingkat IPPRI berpusat di Palu. Di tengah-tengah kesibukan IPPRI menggalang anggota-anggotanya, maka pemerintah NIT membentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Makassar (Ujung Pandang) tempat ibu kota dari NIT. Wakil-wakil dari Sulawesi Tengah yang duduk di dalam lembaga legislatif tersebut ada 4 (empat) org. Di tingkat daerah Sulawesi Tengahpun dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlahnya 20 orang.

Melalui lembaga *legislatif* daerah ini dilakukanlah perjuangan yang senada dengan perjuangan partai politik karena kebetulan mayoritas dari anggotanya adalah mereka yang berjiwa republiken. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan ini di samping gerakan rakyat bersama partai-partai politik dilanjutkanlah perjuangan mengarah pada membubarkan NIT untuk kembali bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁾

Pemilihan anggota DPRD Sulawesi Tengah ini dilakukan dalam bulan Juli 1949, untuk daerah Afdeling Donggala melalui pemilihan rakyat langsung secara bertingkat.

Anggota yang terpilih kemudian dilantik di kota Poso pada tanggal 30 Agustus 1949. DPRD Sulawesi Tengah inilah yang memindahkan kekuasaan dari tangan Asisten Residen Belanda ke tangan Kepala Daerah Sulawesi Tengah di Poso.

Pada waktu itu sudah dibentuk Dewan Raja-Raja dengan kedudukan Ketua Dewan Raja-Raja berkedudukan di Poso. Dewan Raja-Raja inilah yang mengendalikan pemerintahan daerah sebagai badan *eksekutif*. Ketua Dewan Raja-Raja ketika itu R.M. Poesadan dan atas putusan DPRD Sulawesi Tengah Ketua Dewan Raja-Raja inilah yang diangkat sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tengah. Dalam Dewan Raja-Raja ini yang terdiri dari 15 orang raja, 8

1) Haji M. Djaruddin Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pembina Pariwisata Daerah Dati I Sulawesi Tengah, 1975, hal. 50.

orang raja dari bagian barat Sulawesi Tengah dan 7 orang raja dari Sulawesi Tengah bagian Timur.

Pada saat menjelang KMB Delegasi Belanda didukung oleh pemerintah NIT dalam usaha melemahkan posisi Republik Indonesia dengan tindakan mengirim berita yang dilakukan oleh Menteri Sosial NIT berbunyi sebagai berikut :

"Di daerah Sulawesi Tengah pada khususnya, Indonesia Timur pada umumnya, tidak ada lagi perlawanan, semua orang Republikan sudah tertawan dan seluruhnya Rakyat NIT pada umumnya patuh kepada pemerintah."2)

Untuk membuktikan ketidak benaran berita itu maka pejuang-pejuang Abdullah Riu, Andi Baso Rahim dengan kawan-kawannya pada tanggal 29 Oktober 1949 segera menuju Masamba (daerah Kabupaten Palopo sekarang) untuk melepaskan Andi Atas bersama 40 orang kawannya yang tertawan oleh Belanda.

Pasukan pejuang berhasil melepaskan semua pejuang yang tertawan oleh Belanda malah dapat merampas senjata dari pengawal penjara kemudian mereka menyerbu kantor polisi Masamba dan merampas persenjataan di kantor tersebut.

Dalam waktu yang singkat praktis seluruh kota Masamba dapat diduduki oleh para pejuang dari divisi PKR Luwu. Peristiwa ini dikenal dengan nama "*Masamba Affair*" dan mempengaruhi suasana perundingan KMB di mana Belanda tak dapat menyangkal bahwa sebenarnya kekuatan Republik di Sulawesi masih tetap ada. Disusul pula peristiwa aksi pasukan *Resimen VII Divisi PKR Luwu* cabang Sulawesi Tengah dipimpin oleh Abdul Latief Mangitung pada bulan Desember 1949, menggempur dan menduduki asrama KNIL di Poso selama 3 x 24 jam kemudian bertempur dengan polisi Belanda di Poso. Pada peristiwa itu seorang pejuang terluka kena tembak dan 50 orang pasukan PKR tertawan.

Setelah penyerbuan itu pasukan pejuang kemudian mengundurkan diri ke pedalaman.

Di Kolonodale oleh Besau Marunduh, Managanta dan Junius Tumakaka bersama kawan-kawannya merampas sepucuk senjata karabijn yang kemudian mereka bawa ke arah Malili maksudnya untuk bergabung dengan pasukan gerilya Sulawesi Selatan tetapi setibanya di Soroako mereka diragukan oleh pasukan di tempat itu

2) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

karena masalah perbedaan agama.

Pada tahun 1949 di Kolonodale terjadi pula aksi penurunan bendera Belanda setelah birunya dirobek dikerek kembali hingga berkibarlah bendera merah putih. Aksi ini dilakukan oleh pemuda Alex Suawa dan Frans Wattimena.³⁾

B. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH

Sebagai hasil KMB adalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di mana antara lain negara bagiannya adalah NIT. Sebagai wilayah dari NIT maka Sulawesi Tengah pada waktu itu pemerintahannya tidak mengalami perubahan. Hanya golongan Republikein yang merasa tidak puas sehingga timbullah 2 kelompok di wilayah NIT; masing-masing kelompok aliran Unitaris yang menghendaki bubarnya NIT dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945.

Penyerahan kembali kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 disambut di Sulawesi Tengah dengan upacara penaikan secara resmi bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.

Sebagai wilayah dari NIT maka tentaranya tetap tentara KNIL dan polisinya adalah Barisan Polisi Indonesia Timur.

Sejalan dengan isi persetujuan KMB para tahanan politik maupun tahanan militer dibebaskan. Tetapi pejuang-pejuang dari Luwuk yang ditahan di Makassar (Ujung Pandang) akhirnya baru dibebaskan pada tanggal 2 Mei 1950.

Sebenarnya mereka termasuk kategori pertama sesuai keputusan KMB harus dibebaskan tetapi karena sesuatu sebab maka nanti tanggal 2 Mei 1950 baru mereka dibebaskan setelah dipenjara 4 tahun lamanya. Karena penguluran waktu pembebasan ini maka serang di antara mereka yaitu S. Kirdiat meninggal di rumah sakit Dadi pada saat mereka ditunda pembebasannya dan masih dalam status tawanan. Sementara itu tahanan-tahanan politik Sulawesi Selatan yang telah dibebaskan lebih dahulu telah membentuk BPPRI (Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia) dengan keuanya Yusuf Bauty dan pengurus-pengurusnya Rahman Tamma, Karaeng Mandjarungi, Riri Amin Daud, Pondang.

3) Informasi tertulis M. Parobe dari Kolonodale.

Pada tanggal 6 Mei 1950 Ys. Monoarfa bersama A.R. Lanasir ke komisariat BPPRI menerima mandat serta instruksi untuk pembentukan komisariat BPPRI di Luwuk oleh Ys. Monoarfa dan Donggala oleh A.R. Lanasir.

Tanggal 10 Mei 1950 A.R. Lanasir bersama Ys. Monoarfa meng-hairi konperensi kilat BPPRI di Sungguminasa untuk membahas laporan dari perutusan Karaeng Mandjarungi dan Riri Amin Daud yang baru tiba dari Yogyakarta serta membahas rencana kerja dalam menghadapi NIT. Kepada peserta konperensi kilat dianjurkan untuk berjuang terus secara legal dan illegal untuk membubarkan NIT dan memperjuangkan segera tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia. ⁴⁾

Pada tanggal 15 Mei 1950 rombongan bekas tahanan politik dari daerah Luwuk-Banggai yang terdiri dari : T.S. Bullah, Ys. Monoarfa, A.R. Lanasir, Haji Sanusi Manganco dan Ahmad Fuli-lehan meninggalkan Makasar (Ujung Pandang) dengan kapala laut ke Luwuk bersama-sama dengan anggota Parlemen Indonesia Timur utusan Luwuk-Banggai yaitu: Sukuran Amiurddin Amir, Pebelu utusan Kendari dan Muis Niode utusan dari Gorontalo.

C. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Dalam perjalanan kembali ke Luwuk rombongan bekas tahanan politik asal Luwuk-Banggai menghadapi situasi adanya gerakan-gerakan pasukan gerilya Sulawesi Selatan telah melakukan aksi melucuti senjata polisi NIT di Kendari dan serangan terhadap polisi NIT di Kolonodale. Perlucutan terhadap polisi di Kendari dilakukan oleh Andi Tenriadjeng bersama anak buahnya. Ketika kapal yang mereka tumpangi memasuki pelabuhan Kendari pada tanggal 16 Mei 1949 pasukan Andi Tanriadjeng telah mengambil posisi bertahan di luar kota Kendari dan tentara KNIL tetap di tangsi mereka menunggu penyelesaian status selanjutnya.

Pada tanggal 17 Mei 1949 kapal M.S. Bagan yang mereka tumpangi memasuki pelabuhan Kolonodale. Ketika tiba di Kolonodale ternyata kota dalam keadaan sepi dan semua anggota pemerintah setempat menyingkir ke tempat yang aman.

4) Informasi tertulis Yusuf Monoarfa dari Luwuk.

Ternyata pada saat itu ± 300 orang gerilya dari Malili dan sekitarnya dari kesatuan PKR Luwu dipimpin oleh Nur Lan Rifai dan Andi Panguriseng telah menyerang kota Kolonodale untuk melucuti polisi NIT di tempat itu. Pada waktu itu pimpinan polisi Inspektur Masoko dan Kepala Pemerintahan Pirau Marunduh sudah setuju untuk menyerahkan senjata pada pasukan gerilya tetapi anggota-anggota polisi lainnya tak mau kalah mengirim berita ke Poso meminta bala bantuan. Ketika datang bantuan pasukan polisi dari Poso maka pecahlah pertempuran di kampung Tompira yang mengakibatkan gugurnya 8 orang anggota laskar PKR termasuk pimpinannya Andi Panguriseng.

Menurut A.R. Lanasir yang gugur itu adalah :

1. Andi Mappasangka.
2. Andi Panguriseng.
3. Guru Abdul Razak.
4. Sultani.
5. Madeali.

dan yang 2 orang lagi sudah dilupa namanya oleh informan.

Yang tertawan : 1) Andi Hasan.

2) Beddu.

3) Ronggon.

4) Nur Lan.

5) Rifai. (Menurut Informasi Abdul Latief Mangitung dari Poso)."

Peristiwa penyerangan kota Kolonodale itu dikenal di wilayah Mori dengan nama Peristiwa Tompira. 5)

Sisa pasukan laskar PKR Luwu lainnya kemudian mengundurkan diri ke pedalaman Bungku Tengah. 6)

Setiba di Luwuk oleh S.A. Amir diusahaka penyambutan atas kembalinya tokoh-tokoh pejuang yang baru bebas tersebut tetapi tidak disetujui oleh pemerintah NIT setempat. Dari Luwuk mereka terus kembali ke tempat masing-masing di Pagimana. Berbeda dengan di Luwuk, di Pagimana mereka disambut oleh masyarakat dengan upacara selamatan tanda syukur mereka dapat bebas, kembali kepada keluarganya masing-masing.

5) Informasi tertulis M. Parobe dari Kolonodale.

6) Informasi tertulis Abdul Latief Mangitung dari Poso.

Pada tanggal 21 Mei 1950 oleh pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Pagimana bertempat di gedung Sekolah Pagimana diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang baru bebas itu disusul kemudian dengan diadakannya konperensi pada tanggal 7-8 Juni 1950 dihadiri tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tokoh-tokoh politik dari daerah Banggai terdiri dari 37 orang utusan untuk mengatur siasat sesuai amanat dari BPPRI Ujung Pandang (Makassar).

Konperensi tersebut mengambil 2 keputusan :

- a. Mendirikan Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPPRI) berkedudukan di Luwuk di mana komposisi pengurusnya diserahkan atas persetujuan tokoh-tokoh politik di Luwuk.
- b. Memebentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai lembaga legislatif daerah Banggai berkedudukan di Pagimana di mana komposisinya juga akan diatur oleh tokoh-tokoh politik setempat."

Pada tanggal 17 Juni 1950 diadakanlah rapat pembentukan KNI daerah Banggai di Pagimana diketuai oleh Suleman Masulili. Di samping itu diadakan latihan-latihan fisik bagi pemuda-pemuda setempat dalam rangka perjuangan menghancurkan sisa-sisa kolonial Belanda dan kaum feodal.

Sebagai reaksi atas kegiatan di Pagimanan ini kemudian oleh pemerintah setempat di Luwuk dikirimlah 2 orang utusan tokoh politik dari Luwuk ke Pagimana masing-masing A.L. Musa (partai Agama) dan Dr. Rotinsulu (dari PNI) untuk menghubungi tokoh-tokoh politik Pagimana. Utusan tersebut mengajukan usul membentuk konsentrasi Nasional setelah lebih dahulu membubarkan KNI dalam konsentrasi nanti baru dibentuk Dewan Perwakilan Sementara. Tetapi usul itu tak diterima oleh pihak Pagimana.

Dengan diprakarsai oleh perwira militer Letnan Taroreh dari kesatuan SUMU (Sulawesi Utara Maluku Utara) yang bertugas di Luwuk diundanglah tokoh-tokoh KNI pada tanggal 27 September 1950 dan mereka tiba tanggal 28 September 1950 di Luwuk.

Tanggal 1 Oktober 1950 dimulailah pertemuan bertempat di rumah haji Thalib di depan mesjid Raya Luwuk antara tokoh-tokoh KNI Pagimana dengan tokoh-tokoh partai di Luwuk, tetapi sampai tanggal 2 Oktober 1950 tidak tercapai kesepakatan akhirnya Letnan Taroreh memutuskan biarlah kedua pihak masing-masing menjalankan usahanya di mana pihak Pagimana berpihak ke Yogyakarta (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

dan pihak Luwuk tetap berpihak ke Jakarta (RIS). 7)

Di wilayah Onderafdeling Palu terjadi aksi untuk menuntut dibubarkannya NIT dan bergabung dengan Republik Indonesia, yang dipelopori oleh IPPRI (Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia) dan didukung oleh organisasi-organisasi politik yang ada.

Pada awal April 1950 Horas Siregar bersama Ince Makka ke Biromaru menemui M. Dj. Abdullah seterusnya bertiga mereka ke Pevunu menemui Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. merundingkan langkah-langkah apa selanjutnya yang akan ditempuh dalam memperjuangkan bubarnya NIT dan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada malam harinya mereka berempat ke rumah raja Palu Tjatjo Idjazah menyampaikan ide tersebut dan mendapat persetujuan dari Raja.

Tanggal 2 April 1950 malam konsep pernyataan dibuat bersama di rumah Tjatjo Idjazah. 8)

Dan akhirnya dikirimlah kawat kepada wakil Sulawesi Tengah dalam Parlemen NIT di Makassar (Ujung Pandang) yang bunyinya sebagai berikut :

"Imade Geria/Binol DPR Empres hotel Makassar.

Kami partai-partai pergerakan Sulawesi Tengah di Palu koma Tawaeli koma Wani koma Donggala dan Sigi Dolo terdiri dari 29 partai koma memutuskan setuju dan menyokong adanya gerakan pembubaran NIT dengan segera dan terbentuknya negara Kesatuan RIS titik hbs. "IPPRI"

Palu 3 April 1950 ttd Raming - Abdullah. 9)

Pada tanggal 30 April 1950 I Made Geria dan M. Dj. Abdullah bersama pimpinan partai dan organisasi massa di lembah Palu mengadakan rapat bertempat di rumah kediaman Tjatjo Idjazah kepala pemerintahan negeri Kewedanaan Palu dihadiri oleh unsur pemerintah dan kepolisian, para anggota Parlemen NIT wakil Sulawesi Tengah dan anggota DPR Daerah, serta wakil organisasi wanita "Isteri Sedar" Ny. A.H. Siregar. Rapat menghasilkan secara aklamasi memutuskan mendukung dan mempertahankan maksud kawat yang dikirim pada tanggal 3 April 1950 kepada anggota Parlemen NIT I Made Geria dan Binol. Diputuskan juga

8) Wawancara dengan Horas Siregar di Palu, tanggal 17 September 1979.

9) M.Dj. Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Dati I Sulawesi Tengah, 1975, hal. 52.

mengutus P.A. Raming untuk menemui raja-raja Donggala, Tawaeli, Sigi-Dolo, Kulawi dan Parigi untuk meminta dukungan dan ikut bertanggung jawab atas isi kawat tanggal 3 April 1950. Badan polisi NIT di Palu ketika itu dipimpin oleh Awandatu. Oleh tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi dituntut supaya pimpinan polisi diserahkan kepada Inspektur Lumoa.

Terjadi pengambil alihan secara damai oleh PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) yang dikepalai oleh Soengkowo.

Oleh tokoh-tokoh yang hadir diminta juga supaya secepatnya didatangkan TNI dari Jawa untuk menjaga keamanan.¹⁰⁾

Pada tanggal 5 Mei 1950 P.A. Raming telah kembali dan melapor kepada KPN Tjatjo Idjazah pernyataan dukungan raja-raja yang telah dikunjungi serta kesediaan mereka untuk ikut bertanggung jawab atas segala tindakan selanjutnya.

Pada tanggal 6 Mei 1950 diadakanlah rapat raksasa dihadiri oleh massa rakyat, pemuda, tokoh-tokoh partai politik/organisasi massa dari Palu, Biromaru dan Dolo di lapangan Nasional Palu. Di depan rapat massa itu oleh Tjatjo Idjazah dibacakan konsep Maklumat yang didukung penuh oleh semua hadirin berbunyi :

" M A K L U M A T "

Pucuk Pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

1. Mulai 6 Mei 1950 jam 7.00 pagi, tiga kerajaan Palu, Sigi-Dolo dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya memproklamkan dengan ini "telah melepaskan diri dari Negara Indonesia Timur" dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.
2. Segala urusan pemerintahan harus melalui pucuk pimpinan BKR.
3. Segala urusan umum tetap berjalan seperti biasa, umpamanya urusan pemerintahan, sekolah-sekolah, toko-toko harus dibuka, penjualan keperluan sehari-hari di pasar harus berlaku seperti biasa.
4. Kalau masuk dan keluar Onderafdeling Palu harus dengan izin dari BKR, permintaan ini boleh disampaikan dengan surat atau fonogram.
5. Jam malam mulai dari jam 6.00 petang sampai jam 5.00 pagi.
6. Keamanan dijaga oleh Polisi Republik Indonesia dan Badan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat).

¹⁰⁾ Wawancara dengan Horas Siregar di Palu, tanggal 17 September 1979.

7. Pemeriksaan rumah-rumah dan bangunan-bangunannya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memegang surat izin dari Ketua BKR.
8. Segala senjata api termasuk juga senapan angin berkaliber 5½ harus diserahkan dalam tempo tiga hari sampai 9 Mei 1950 pukul 12 tengah hari dan yang bersangkutan akan diberikan surat tanda terima.
Yang boleh memegang senjata api hanya polisi Republik Indonesia dan Apri.
9. Diserukan kepada umum untuk membantu menjaga keamanan.
10. Jam malam tidak berlaku bagi mereka yang memegang surat izin istimewa dari pucuk pimpinan BKR.
11. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ini akan dilakukan tindakan keras.
12. Selesai.

Palu, 6 Mei 1950

Penjaga Keamanan,
Bahagian Polisi: ttd. Lumowa.
Bahagian BKR: ttd. Soengkowo

Pucuk Pimpinan BKR,
ttd.
Tjatjo Idjazah.”

Keputusan hasil rapat raksasa ini yang disebut pernyataan 6 Mei 1950 dikirim kepada :

- 1) Pemerintah Pusat NIT di Makassar.
- 2) Pemerintah Sulawesi Tengah di Poso dan persurat kabaran yang ada di Palu serta diperbanyak ditempelkan di semua tempat terbuka untuk di-sebar luaskan pada masyarakat. 11)

Sebagai pimpinan pemerintahan darurat daerah Republik Indonesia, pimpinan BKR memerintahkan supaya para petugas pemerintahan dan guru-guru yang berkebangsaan Belanda di antaranya HPB, Kepala Polisi (*Inspektur Lopyy*), Kepala Kehutanan *Sitrop* dan Direktur SMP *De Aalbers* masing-masing dikenakan tahanan rumah di bawah pengawasan BKR sebagai APRI darurat sampai mereka diberangkatkan ke Poso untuk dikumpulkan dengan kawan-kawannya orang Belanda.

Akibat dari penahanan De Aalbers ini maka SMP yang ada di Palu terpaksa ditutup dan murid-muridnya yang mampu orang tuanya, ada yang pindah melanjutkan studinya ke Makassar, Menado, Gorontalo dan Poso.

11) M.Dj. Abdullah, *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Dati I Sulawesi Tengah, 1975, hal. 53 – 54.

Di Poso pada tahun 1950 baru dibuka SMP.

Nanti pada tanggal 19 Maret 1951 baru dibuka kembali SMP bukan lagi di Palu tetapi di Donggala dengan pimpinannya Mochtar dan guru-gurunya terdiri dari Abdul Wahab Katili, Pangermanan, Mochtar dengan isterinya.

Menurut M.Dj. Abdullah badan Pemerintahan darurat Daerah Republik Indonesia di Palu pada waktu itu adalah sebagai berikut :

1) Sebagai badan eksekutif adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan Dewan pemerintah daerah RI darurat di Palu.

2) Sebagai badan eksekutif adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan Dewan pemerintah daerah RI darurat di Palu.

Pucuk pimpinan dipegang oleh Ketua Tjatjo Idjazah, sedang anggota Dewan Pemerintah terdiri dari kepala-kepala Swapraja Palu, Sigi-Dolo dan Kulawi serta para kepala-kepala distrik wilayah Palu.

3) Badan legislatif dalam pemerintahan darurat RI di Sulawesi Tengah dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI).

Terpilih sebagai ketua adalah I Made Geria. Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan tenaga ahli dari pemerintahan (kepala-kepala jawatan).

4) Sebagai penjaga keamanan rakyat, diserahkan kepada pemuda yang bersenjata sebagai APRI darurat yang diasramakan dalam satu markas sebanyak satu batalyon kemudian disebarkan di pos-pos Tawaeli, Biromaru, Dolo, Kaleke, Sidondo, Sibalaya, Pakuli, Kulawi dan Palu, pelabuhan Wani dan Parigi. Juga ditugaskan menjaga keamanan adalah polisi RI darurat yang diambil dari anggota kepolisian NIT atas persetujuan dari pimpinannya dengan memakai ban lengkap putih bercap PRI pada lengan baju dinas sebelah kiri. Sebagai komandannya adalah Inspektur pembantu Lumowa dan Awandatu. Komandan BKR adalah R. Soengkowo dan wakilnya Hamzah Sunusi.

Kepala Staf : M. Djaruddin Abdullah

Keuangan : M. Yunus Sunusi.

Publikasi : Horas Siregar dan M.A. Ince Makka.

Sarana perhubungan seperti stasion radio, kantor pos, kendaraan bersama bahan bakar berada di bawah pengawasan BKR

dalam penggunaannya.

Untuk penyiapan konsumsi BKR diadakan dapur umum di Biro-maru ditangani oleh Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) Biro-maru. Bahan-bahan pokok dan pengangkutannya disediakan dari Palu.

Pada bulan Juni 1950 dikirim 2 orang utusan yaitu Zaenal Abidin Betalemba dan M. Yondi Maranua ke kongres Rakyat seluruh Indonesia Timur di Makassar (Ujung Pandang) yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Juni 1950. Disusul dengan pengiriman 2 orang utusan masing-masing R. Soengkowo dan M. Yunus Sunusi untuk membawa laporan kepada pimpinan kongres rakyat seluruh Indonesia Timur Yusuf Bauty, yaitu laporan lengkap tentang situasi terakhir di Palu dan sekitarnya. Akan tetapi karena adanya peristiwa Kapten Andi Azis di Makassar disusul pemogokan buruh pelabuhan, maka akhirnya 2 orang utusan yang belakangan tak dapat berangkat dan kembali ke Palu.

Di samping pergerakan-pergerakan di Palu dan Luwuk, maka di Toli-Toli pada akhir tahun 1949 datang 2 orang pemuda dari Pare-Pare (Sulawesi Selatan) yaitu Andi Cabambang dan Andi Baddurangan di Soni kecamatan Dampal Toli-Toli membentuk organisasi pemuda Soni yang beranggotakan mula-mula 15 orang. Dalam bulan Maret 1950 berangkatlah pemuda Soni ke Ogotua dan melucuti senjata anggota-anggota polisi NIT yang bertugas di Ogotua, kemudian melanjutkan perjalanan ke Toli-Toli dengan tujuan yang sama yakni hendak mengambil alih kekuasaan polisi NIT di Toli-Toli secara keseluruhan. Gerakan ini berhasil baik, di mana kepala Polisi L.J. Nahar dapat ditawan dan dipaksa menyerahkan pimpinan kepolisian Toli-Toli kepada pimpinan pemuda Soni, sekaligus dengan tugas pengamanan, dengan terlebih dahulu menyerahkan persenjataan yang ada. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Mei 1950. Kemudian Andi Cabambang menghubungi KPN Abdurrahman Nento di mana KPN ini menyetujui tindakan pemuda-pemuda tersebut.

Pada tanggal 25 April 1950 dikirim Abdul Razak Haji Mallu dan Usman Saani sebagai utusan ke Menado melaporkan kejadian kudeta ini kepada pemerintah RIS di Menado. Pada pertengahan bulan Juni 1950 datanglah tentara kesatuan SUMU yang dipimpin oleh Letnan Manase yang kemudian menerima penyerahan kekuasaan dari pimpinan pemuda

Di antara pemuda Soni yang terus ikut aktif dan masuk menjadi tentara ialah Batin dan S. Mailili. Andi Cabambang kembali ke Pare-Pare setelah selesai peristiwa di Toli-Toli.

Karena adanya aksi-aksi dan gerakan-gerakan massa di Sulawesi Tengah serta tempat-tempat lainnya di wilayah NIT dan ditambah lagi suara-suara dalam Parlemen NIT sendiri yang menginginkan dibubarkannya NIT dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada tanggal 12 Mei 1950 delegasi pemerintah NIT terdiri dari Perdana Menteri Ir. Putuhena dan Menteri Pene-ragan Henk Rondonuwu ke Jakarta untuk berunding dengan pemerintah RIS dan menyerahkan mandat pada Perdana Menteri RIS Drs. Mohammad Hatta untuk melaksanakan perundingan dengan Republik Indonesia Yogyakarta tentang pembentukan Negara Kesatuan. Tanggal 19 Mei 1950 tercapailah program persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk dan melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. ¹²⁾

Pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Dan berdirilah kembali Propinsi Sulawesi untuk ke dua kalinya di mana Sulawesi Tengah tetap sebagai salah satu wilayahnya. Sebagai *acting* Gubernur diangkatlah B.W. Lapien yang menjalankan tugas dari 17-8-1950 sampai tanggal 1-7-1951.

D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

Seperti halnya pada awal revolusi fisik maka pada saat-saat menjelang akhir revolusi fisik perlawanan masyarakat di Sulawesi Tengah atas penguasaan Belanda melalui negara bonekanya NIT tetap berjalan di mana ada peluang dan kesempatan. Melalui wadah-wadah pergerakan organisasi massa/organisasi politik dilancarkan protes-protes atas tindakan-tindakan pemerintah NIT melalui aparatnya di daerah Sulawesi Tengah. Perlawanan ini terdapat di seluruh Sulawesi Tengah baik di Donggala, Poso, Toli-Toli dan Banggai, berlangsung sampai tanggal 27 Desember

¹²⁾ Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, tahun 1953.

1949 malah setelah terbentuknya negara RIS itu suhu perjuangan rakyat Sulawesi Tengah makin meningkat menuntut dibubarkannya NIT dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap tokoh-tokoh pergerakan diadakan pengawasan ketat oleh pemerintah setempat malah sering terjadi penangkapan-penangkapan atas orang yang dicurigai dengan penyiksaan-penyiksaan luar biasa dalam penjara ditambah hinaan-hinaan mengejek dengan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan terhadap tokoh-tokoh pejuang seperti antara lain :

"So ngana itu mau merdeka, merdeka tai, biar bikin potlot nda tau . . . dan seterusnya." (Sudah kamu itu yang mau merdeka, merdeka tai, sedangkan membuat pensil saja tak tahu dan seterusnya)."

Kata-kata ejekan dan hinaan itu diikuti pula dengan pukulan dan tendangan di sambung lagi dengan perkataan :

"Baru ngana (kamu) rasa, itulah orang yang mau merdeka."¹³⁾

Sejak tanggal 6 Maret 1946 uang NICA dinyatakan berlaku di daerah-daerah yang diduduki oleh Serikat.¹⁴⁾

Sejak itu pula di Sulawesi Tengah beredar uang NICA ini dan dipergunakan sebagai alat tukar/jual beli dalam masyarakat. Pemerintah NIT yang berpusat di Makassar berusaha memasukkan barang-barang tekstil dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dari luar negeri, dengan memakai kapal-kapal Belanda dan Australia. Kantor-kantor distribusi didirikan yang bertugas mengatur pendistribusian barang-barang kebutuhan hidup itu sampai ke kampung-kampung.

Atas anjuran Menteri Perekonomian NIT Nadjamuddin Daeng Malewa pada waktu itu didirikan beberapa maskapai dagang seperti *N.V. Indonesia Trading Co.*, *N.V. Handel Mij Indonesia Timur*, dan *N.V. Handel Mij Madju di Makassar* (Ujung Pandang) untuk menerima barang-barang import dari luar negeri itu. Penyebaran barang-barang itu ke Sulawesi Tengah menggunakan kapal-kapal KPM milik Belanda yang beroperasi melalui 2 lijn yaitu : Selat Makassar — Donggala — Toli-Toli — Menado dan

13) Informasi tertulis Abdul Wahid Maluku dari Donggala.

14) Sartono Kartodirdjo et al., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka Jakarta, 1977 hal. 129.

Teluk Bone – Teluk Tolo – Teluk Tomini – Menado.

Setelah itu melalui kantor-kantor distribusi yang didirikan di ibu kota kecamatan, para kepala-kepala kampung membagikan kepada rakyat secara bertahap dengan membayar harga yang ditentukan oleh pemerintah. Yang telah mendapat pembagian pertama tidak lagi mendapat pembagian berikutnya, tapi diberikan kepada yang belum mendapatnya.

Setelah bahan pakaian menyusul barang-barang lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, sabun, susu, mentega, minyak tanah dan lain-lainnya.

Cara pendistribusiannya kepada rakyat dengan menggunakan sistim kupon. Bila tiba hari raya/tahun baru maka petugas kantor distribusi ini terpaksa bekerja sampai malam melayani rakyat banyak yang antri untuk mendapatkan barang-barang itu segera. Keadaan tersebut berlangsung sampai saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 bahkan sampai pada masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950.

a. Perdagangan

Pada tahun 1949 itu rakyat mulai memperhatikan lagi terhadap pengolahan kopra karena pemerintah waktu itu mulai mengatur pembelian kopra rakyat untuk diekspor ke negara-negara Eropa Barat seperti Nederland, Jerman Barat, Skandinavia, Inggris dan Prancis. Yang melaksanakan pembelian kopra rakyat waktu itu adalah suatu badan yang didirikan oleh Belanda sejak September 1940 bernama "*Stichting Het Coprafonds*", yang kemudian menjadi "Yayasan Kopra" pada bulan Nopember 1950 dengan pusat kedudukannya di Jakarta.

Selain rakyat menjual kopranya kepada *Stichting Het Coprafonds* yang ada di tempatnya, mereka berusaha pula membawa kopra mereka dengan perahu ke Kalimantan Utara, Tawao, daerah Sabah-Malaysia melalui pelabuhan Tarakan.

Mereka yang membawa kopra ke Tawao itu bukan menjual kopra supaya mendapat uang tetapi menukarnya dengan emas, bahan tekstil dan barang lainnya seperti kain dril lenen, Saskin, sarung pelekat, arloji, jam dinding, mesin jahit, lampu gas dan barang-barang pecah belah. Yang paling banyak melakukan barter kopra ini adalah rakyat Sulawesi Tengah yang berdiam di pantai barat yaitu wilayah Kabupaten Donggala dan Buol Toli-toli sekarang ini.

Hubungan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan berjalan kaki, gerobak yang ditarik oleh sapi, kuda dan memakai oto truk dari Coprafonds. Di laut dipakai perahu layar, motor-motor laut dan kapal-kapal laut.

Jalan-jalan yang rusak serta jembatan-jembatan diperbaiki sedikit demi sedikit dengan mengerahkan rakyat setempat bekerja bakti. Rakyat menjual kopra mereka selain kepada koprafonds juga kepada pedagang-pedagang perantara, di mana pedagang-pedagang perantara ini sering mengadakan sistim ijon karena persyaratan yang dibuat oleh pemerintah waktu itu hanya rakyat yang memiliki 25 ton kopra boleh langsung memasukkan kopranya ke Coprafonds. Yang tidak mencapai jumlah sebanyak itu terpaksa menjualnya kepada pedagang perantara. Jadi petani kelapa kecil masih tetap mengalami kesulitan dan menjadi mangsa para pengijon. Hasil pembelian Yayasan Kopra terhadap pengeluaran hasil perkebunan kelapa adalah sebagai berikut :

No.	R a y o n	1950/ton	1951/ton	1952/ton
1.	P o s o	29.176	35.882	30.674
2.	Luwuk	30.282	41.691	34.950
3.	Donggala	21.380	31.630	25.064
4.	Toli-Toli	7.347	20.492	22.959
	J u m l a h	88.185	129.695	113.647 ¹⁵⁾

b. Peternakan

Di samping mengolah kopra, rakyat Sulawesi Tengah juga melakukan kegiatan dalam bidang peternakan. Binatang-binatang yang diternakan terutama adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sebagian kecil memelihara babi. Sapi dan kerbau terutama digunakan dalam kegiatan-kegiatan pertanian, menarik bajak dan gerobak untuk pengangkutan kopra dan lain-lain. Untuk perbaikan mutu, Sulawesi Tengah memasukkan sapi Ongola

¹⁵⁾ Kementerian Penerangan RI., *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, 1953, hal. 406 - 412 - 419.

dari Sumba sebagai pemacak, karena sapi Ongola ini besar-besar dan kuat untuk menarik gerobak/pedati.

Penjualan hasil ternak bagi Sulawesi Tengah waktu itu merupakan sumber penghasilan ke dua sesudah kopra.

Sebagai hewan potong perniagaan sapi yang teratur hanyalah terdapat di wilayah Afdeling Donggala, yang mengekspor sapi sembelihan ke Kalimantan, Sulawesi Utara (Menado) dan Maluku (Ternate).

Tempat-tempat peternakan sapi yang luas terdapat di daerah lembah Palu dan sekitarnya. Di tempat-tempat itu pula terdapat peternakan domba dan kambing. Peternakan babi hanya terdapat di daerah yang penduduknya beragama Kristen dan Hindu-Bali. Pemeliharaan ternak kuda terdapat di sekitar Palu dan Parigi yang kebanyakan digunakan sebagai kuda pacuan, penarik dokar dan tunggangan serta membawa beban. Perbaikan mutu kuda dijalankan dengan memasukkan kuda Sumba, kuda Arab dan kuda Australia.

c. Pertanian

Ada 3 (tiga) macam tanah yang digunakan oleh rakyat dalam kegiatan pertanian.

- 1) Tanah yang dapat digunakan untuk sawah.
- 2) Tanah kering yang dapat digunakan untuk ladang.
- 3) Tanah yang dapat dipergunakan untuk perkebunan (dalam arti yang luas).

Tanah-tanah yang tergolong pada bagian 1 dan 2 dikerjakan oleh rakyat untuk tempat menanam bahan-bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar serta makanan ekstra seperti kacang tanah, pisang, kacang hijau, serta berjenis-jenis sayur mayur.

Golongan tanah nomor 3 digunakan rakyat menanam tanaman perdagangan pada waktu itu adalah kopra (kelapa), kopi dan cokelat. Akan tetapi untuk persawahan waktu itu banyak bergantung pada hujan karena pengairan-pengairan yang sudah ada banyak mengalami kerusakan. Baru pada tahun 1950 diadakan perbaikan-pembaikan pengairan yang rusak di samping membangun pengairan-pengairan baru.

Luas daerah petanian di Sulawesi Tengah pada waktu itu berdasarkan data-data yang ada adalah :

Afdeling Poso, luas sawah \pm 3.640 ha dan luas tanah kering untuk

ladang \pm 8.555 ha.

Afdeling Donggala, luas sawah \pm 11.440 ha dan luas tanah kering untuk ladang \pm 13.141 ha.

Luas tanah yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa, Afdeling Poso \pm 50.000 ha.

Afdeling Donggala \pm 30.000 ha.

Luas tanah yang digunakan menanam kopi tidak diketahui data-nya. Tanaman coklat di Afdeling Poso terdapat areal seluas \pm 8½ ha dan Afdeling Donggala \pm 8.130 pohon coklat.

Rakyat Propinsi Sulawesi di Makassar telah mengadakan pendidikan di lapangan pertanian yang diikuti oleh petugas-petugas pertanian dari daerah Sulawesi Tengah.

d. Pengolahan Hasil Hutan

Hasil-hasil hutan yang diusahakan oleh sebagian rakyat Sulawesi Tengah meliputi pengumpulan rotan, damar, kayu manis dan kayu hitam (kayu eboni). Hasil hutan ini diekspor ke luar negeri ke Jepang dan Eropa Barat.

Di samping itu rakyat setempat mengadakan perburuan binatang-binatang hutan untuk konsumsi sendiri, tidak diperdagangkan. Kegiatan masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan lainnya masih sama dengan kegiatan masyarakat yang telah ditulis pada Bab IV di muka.

P E N U T U P

Sebagai penutup dari tulisan ini dapatlah diringkaskan sebagai berikut :

Bahwa perjuangan rakyat daerah Sulawesi Tengah telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda sejak Pebruari 1942 yang dilakukan oleh Gerakan Merah Putih di Poso (Ampana) Toli-Toli dan Luwuk-Banggai dengan pengambil alihan kekuasaan dari aparat pemerintah Belanda setempat. Bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya berkibar dan berkumandang di alam merdeka Sulawesi Tengah sejak Pebruari 1942 sampai datangnya Balatentara Nippon (Jepang) pada pertengahan Mei 1942.

Dengan dalih Indonesia masih terlalu muda dan lemah menghadapi Sekutu, Jepang lalu merampas kemerdekaan yang baru beberapa bulan direbut dari penjajah Belanda dan menjanjikan akan menyerahkannya kembali apabila Jepang berhasil memenangkan perang. Ternyata janji Jepang tersebut hanya janji kosong belaka sebagai kedok imperialismenya yang malah lebih ganas dari penjajahan Belanda. Semangat juang Bangsa Indonesia untuk merdeka ditekan dengan tindakan pemancungan tokoh-tokoh pejuang tahun 1942 di depan umum dan tindakan-tindakan fasis lainnya.

Rakyat hanya dijadikan budak untuk menyiapkan bahan-bahan perbekalan perangnya. Kemerdekaan berkumpul/berorganisasi dan melakukan ibadah dibatasi. Pendidikan di arahkan pada proses Jepangnisasi bukan untuk pembinaan intelektual. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan balatentara Jepang hingga rakyat menderita lahir batin; kurang sandang, kurang pangan dan tertekan batin selalu ketakutan. Perkosaan wanita, kerja paksa, penghormatan pada *Hinomaru* dan *Tennoheika* merupakan soal rutin selama 3½ tahun dijajah oleh Jepang. Namun tekanan dan penderitaan ini akhirnya menimbulkan rasa nekad dari rakyat untuk bangkit melawan walaupun kekuatan persenjataan tidak seimbang, hingga mengorbankan jiwa patriot-patriot bangsa seperti yang terjadi di Toli-Toli dan Salinggoha serta beberapa tempat lainnya di Sulawesi Tengah.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diketahui oleh rakyat dan tokoh-tokoh pimpinan pergerakan nasional di

Sulawesi Tengah maka sejak itu pula telah terbentuk badan-badan perjuangan di daerah ini baik yang berbentuk kelaskaran maupun yang bergerak di bidang politik untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan itu.

Tempat yang pertama kali mendengar berita proklamasi ini adalah Poso melalui seorang perwira Jepang dan 2 orang anggota *Heiho* yang mendengarnya langsung dari pemberitaan radio tanggal 17 Agustus 1945 sore. Begitu mengetahui bahwa Jepang telah kalah dan kemerdekaan telah diproklamkan di Jakarta maka wilayah Sulawesi Tengah yang pernah mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Belanda pada tahun 1942 oleh tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih 1942 di tempat itu cepat-cepat mengambil tindakan membentuk badan perjuangan mengaktifkan kembali Gerakan Merah Putih 1942 di Poso oleh Abdul Latief Mangitung dengan kawan-kawannya dibentuk Resimen Tanjumbulu di samping itu mengadakan rapat-rapat umum memberi penerangan/seruan kepada rakyat agar bangkit mempertahankan kemerdekaan, karena diketahui bahwa Belanda akan kembali menjajah sebab Belanda berada di pihak Sekutu. Ini diketahui dari pamflet-pamflet yang disebar dari udara bahwa Sekutu akan datang setelah Jepang menyerah pada Sekutu.

Kemudian datang dari Makassar utusan Gubernur Sulawesi I Dr. Ratulangi yaitu A.N. Hajarati dan Hamzah Ilahude ke Poso untuk membentuk pemerintahan Nasional di daerah Poso dan menyampaikan instruksi dan seruan Gubernur agar raja-raja dan rakyat Sulawesi Tengah turut mempertahankan kemerdekaan serta menolak kedatangan Belanda kembali. Lalu datang berturut-turut utusan-utusan dari badan-badan perjuangan kemerdekaan dari Sulawesi Selatan ke Poso, Donggala dan Luwuk menyampaikan hal yang sama kepada pejuang-pejuang di tempat itu. Sebelum datangnya utusan-utusan dari Sulawesi Selatan oleh Abdul Latief Mangitung dari Poso yang cepat mendengar berita proklamasi telah lebih dahulu mengadakan kontak dengan mendatangi sendiri tokoh-tokoh pejuang di Ampana, Bunta, Pagimana dan Palu untuk mengajak tokoh-tokoh tersebut mempersiapkan rakyat di tempat masing-masing untuk menyusun barisan mempertahankan kemerdekaan apabila Belanda kembali menjajah.

Di Luwuk terbentuk Divisi IV Laskar Kris Muda Luwuk sebagai bagian dari Laskar Kris Muda Mandar dengan tokoh-tokoh pimpinannya Dr. Soetaryo selaku Komandan divisi dan Abdul

Azis Larekeng sebagai Kepala Staf. Resimen Tanjumbulu yang ada di Poso setelah datangnya utusan PRI (Pemuda Republik Indonesia) Palopo yang diwakilkan pada M. Landau dan kawan-kawannya kemudian membentuk kesatuan PR Cabang Poso dengan Ketuanya Abdul Latief Mangitung.

Di Donggala pun terbentuk badan perjuangan Gerakan Merah Putih dengan ketua umumnya Ahmad Muhammad, kemudian membentuk kelaskaran bernama Laskar Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) yang pimpinannya Rohana Lamarauna (Raja Banawa) dan pimpinan Staf Umum dipegang oleh Umar Papeo (bekas *Hetho*).

Di Palu dibentuk Laskar Merah Putih Sigi-Dolo dengan komandannya Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. Begitu pula di kerajaan-kerajaan Biromaru, Tawaeli dibentuk organisasi perjuangan Merah Putih dengan nama berlainan di setiap tempat.

Pada umumnya laskar-laskar tersebut ada hubungannya dengan badan-badan kelaskaran dari Sulawesi Selatan.

Poso berhubungan PKR (Pasukan Keamanan Rakyat) Palopo, Luwuk dengan Kris Muda Mandar, Donggala, Palu dan sekitarnya di samping berhubungan dengan Resimen Tanjumbulu Poso juga dengan Laskar Kris Muda Mandar. Akan tetapi karena kurangnya senjata dan bantuan senjata yang ditunggu dari Sulawesi Selatan tak datang-datang maka pada saat NICA datang membonceng pada Sekutu pada bulan Nopember 1945 maka laskar-laskar yang telah terbentuk itu tak dapat berbuat apa-apa. Ditambah lagi kenyataan bahwa raja-raja setempat di Sulawesi Tengah menyambut dengan baik kembalinya Belanda/NICA, sukarnya komunikasi antara daerah satu dengan daerah lainnya menyebabkan laskar-laskar di berbagai tempat lalu berjalan sendiri-sendiri tidak terkoordinir dalam satu pimpinan. Walaupun terjadi aksi-aksi sabotase dan penghadangan patroli NICA tapi ternyata karena adanya bantuan raja-raja setempat maka pada bulan Nopember 1945 itu juga Belanda telah dapat menduduki seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Malah terjadi penangkapan-penangkapan atas diri tokoh-tokoh pimpinan perjuangan di daerah-daerah.

Di Luwuk perkara pengambil alihan kekuasaan oleh Gerakan Merah Putih 1942 mulai diusut dan tokoh-tokohnya ditangkapi lalu dipenjarakan mula-mula ke Menado kemudian ke Makassar sehingga selama periode revolusi fisik mereka di penjara, nanti dibebaskan setelah tercapainya persetujuan KMB. Begitu pula

halnya dengan pimpinan-pimpinan dan anggota perjuangan di Donggala, Palu dan sekitarnya serta Poso mereka silih berganti ditangkapi dan disiksa serta dihina dalam penjara.

Setelah persetujuan Linggarjati, dengan didahului konperensi Malino kemudian disusul konperensi Denpasar akhirnya Belanda (Van Mook) membentuk negara boneka NIT pada tahun 1946. Sejak itu sebagai bagian dari NIT maka di Sulawesi Tengah mulai jabatan-jabatan tinggi pemerintahan daerah diserahkan pada raja-raja setempat di dampingi pejabat-pejabat orang Belanda. Dewan-dewan perwakilan daerah pun dibentuk melalui pemilihan langsung secara bertingkat. Anggota-anggota terpilih itu ternyata kemudian lebih separuhnya dari aliran Republikein sehingga melalui badan inipun dilakukan perjuangan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pusat pemerintahan untuk Sulawesi Tengah lalu dipindahkan ke Poso tempat kedudukan ketua Dewan Raja-Raja Sulawesi Tengah.

Perjuangan laskar-laskar lalu beralih menjadi perjuangan di bidang politik dengan pembentukan partai-partai politik setempat di samping partai-partai yang memang telah ada seperti PSII, PNI dan sebagainya. Juga ada yang merupakan Cabang BNI (Barisan Nasional Indonesia) Menado yaitu di Poso dan Kolonodale. Oleh tokoh-tokoh pejuang di wilayah Palu, raja-raja tetap dibina dan disadarkan agar membantu perjuangan kemerdekaan.

Di bidang kehidupan lainnya rakyat melakukan aktivitas hidup sehari-hari kembali seperti biasa. Pengolahan kopra mulai digiatkan lagi setelah berhenti pada zaman Jepang. Pertanian dan pengumpulan hasil hutan serta peternakan kembali dapat memberi penghasilan kepada rakyat. Perkembangan agama dan seni budaya tradisionil kembali diaktifkan setelah dibekukan selama pendudukan Jepang.

Pada tahun 1947 mulai didirikan SMP Negeri di Palu, di Poso tahun 1950 dan di Donggala tahun 1951.

Oleh pemerintah NIT walaupun diizinkan tumbuhnya organisasi-organisasi politik tetapi kegiatan-kegiatan dan gerak-gerik tokoh-tokohnya tetap diawasi oleh polisi-polisi NIT. Untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat juang rakyat oleh tokoh-tokoh pergerakan didatangkan rombongan-rombongan sandiwara yang menampilkan ceritera-ceritera perjuangan yang mengakibatkan pimpinannya selalu dapat panggilan polisi untuk diinterogasi. Akhirnya setelah tercapainya persetujuan KMB dan

diserahkannya kembali kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 maka perjuangan di daerah Sulawesi Tengah yang selama datangnya Belanda kembali telah mengalami tekanan-tekanan sehingga meningkat suhunya.

Partai-partai yang ada di Palu dan sekitarnya menggabungkan diri dalam satu wadah dan mengeluarkan pernyataan mengeluarkan wilayah-wilayah kerajaan yang ada di lembah Palu dari ikatan NIT dan kembali bergabung menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan ini dikenal dengan nama "Pernyataan 6 April 1950" dan ditanda-tangani oleh Kepala Pemerintahan di Palu Tjatjo Idjazah dan dicetuskan di depan rapat raksasa.

Di tempat-tempat lainpun diadakan aksi-aksi yang sama yang nadanya sama menuntut dibubarkannya NIT dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

DAFTAR SUMBER/KEPUSTAKAAN

1. Abdullah, M.Dj., *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, 1975.
2. Brower, M.M., *60 Tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah*, Kantor Pusat Bala Keselamatan di Indonesia, Bandung, 1977.
3. Daeng Mattata, H.M. Sanusi, *Luwu Dalam Revolusi*, (Penerbit dan tahun terbitnya tidak tercantum dalam buku).
4. DPRD-GR, Buol-Toli-Toli, *Revolusi Tentang Perjuangan Rakyat Melawan Penjajahan Belanda dan Jepang di Daerah Kabupaten Buol – Toli-Toli, No. 7/Res/DPRD-GR/1970*.
5. Datupamusu, R.G., Catatan harian (tidak diterbitkan).
6. Humas Alchairat, *Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alchairat*, Palu. (Brosur) 1977.
7. Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, 1953.
8. Kruyt, J., *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1977.
9. Koeswandi, M.H. B.A., *Mengenal Kabupaten Poso*, Pemerintah Kabupaten Dati II Poso, 1977.
10. Kawandaud, T., *Tambo dan Sejarah Buol*, Drukkerij Annaser, Gorontalo, 1949.
11. Lanasir, A.R., *Catatan Perjuangan/Pergerakan di Luwuk-Banggai*, (Belum diterbitkan).
12. Mangitung, Abdul Latief, *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata di Daerah Sulawesi Tengah*, (Belum diterbitkan).
13. Monoarfa, Ys., *Konsep Biografi dan Perjuangan dari Yusuf Monoarfa di Daerah Luwuk*, (Belum diterbitkan).
14. Maluku, Abd. Wahid, *Memori Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Donggala, Sulawesi Tengah*, (Belum diterbitkan).

15. Nurdin, A.T., *Catatan Ringkas Riwayat Perjuangan Laskar PIM*, (Tidak diterbitkan).
16. Parobe, M., *Riwayat Perjuangan Rakyat Mori Menentang Penjajahan Belanda*, (Tidak diterbitkan).
17. The Liang Gie, Drs., *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Penerbit Karya Kencana, Jakarta
18. Sartono, Dr., et al., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
19. S u i a w e s i Tahun 1 No. 2 31 Agustus 1952 (Majalah Mingguan terbit di Palu dari tahun 1952 s/d 1961).
20. Wowor, B., *Sulawesi Utara Bergolak, Peristiwa Patriotik 14 Pebruari 1946*, Badan Penerbit Lada, Jakarta, Cetakan I, 17 Agustus 1977.

LAMPIRAN/DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : Abdul Wahid Maluku
U m u r : 62 tahun
Pendidikan : Sekolah Guru (OVO) di Palu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Limboro, Kecamatan Banawa
Kegiatan : – 1948–1950 menjadi Kepala SD Negeri di Wani.
– Bendahara pada Pengurus Gerakan Merah Putih di Donggala.
– Pimpinan Staf IV Laskar PIM pada sektor pertahanan Surumana – Ganti di daerah Donggala.
– Selama pendudukan Jepang memimpin Seinendan di Donggala.
– Zaman pendudukan tentara NICA dimasukkan dalam tahanan militer di Palu, disiksa karena ikut pada penaikan bendera Merah Putih di Pelabuhan Donggala tanggal 11 September 1945.
– Anggota Barisan Nasional Indonesia di Manado pimpinan G.E. Dauhan dengan surat kabar "MENARA" sebagai terompetnya.
Hasil Karya : Memori Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Donggala.
2. N a m a : Abdul Latief Mangitung
U m u r : 61 tahun
Pendidikan : Sekolah Gubernemen (HIS) belum tamat lalu keluar.
Alamat : Resetlemen Maengko, Kecamatan Poso Kota.
Kegiatan : – Wakil Panglima Perang Kerajaan Tojo di Ampana.
– Membentuk Laskar Tanjumbulu di kampung Sayo Kecamatan Poso Kota tanggal 17 Agustus 1945 pukul 21.00 malam.
– Komandan Laskar Tanjumbulu yang dilebur ke Divisi PKR Luwu tanggal 21 Maret 1946

- menjadi Resimen VII PKR Luwu Sulawesi Tengah bermarkas di kampung Malei (Poso).
- Hasil Karya : – Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata di Sulawesi Tengah sejak 25 Desember 1941 s/d 12 Pebruari 1959.
- Memberi bahan-bahan dalam penulisan buku "Luwu Dalam Revolusi" oleh H.M. Sanusi Daeng Mattata.
3. N a m a : Ahmad Rafik Talamoa.
 U m u r : 50 tahun.
 Pendidikan : Perguruan Islam Alchairat.
 Pekerjaan : Guru Sekolah Alchairat Ampana.
 Alamat : Uentanaga. B., Kecamatan Ampana Kota Kab. Poso.
 Kegiatan : Menjadi Minara Jumpo di Poso pada masa Jepang. (Minara Jumpo = Polisi Remaja).
4. N a m a : Abu Saleh Tanjumbulu.
 U m u r : 54 tahun.
 Pendidikan : Vervolg School kelas V, kemudian kursus Jurnalistik di Makassar.
 Pekerjaan : Tani disamping sebagai anggota veteran RI.
 Alamat : Uentanaga B, Kecamatan Ampana Kota Kab. Poso.
 Kegiatan : – Agen Pewarta Selebes di Ampana selama pendudukan Jepang.
 – Wartawan IPPHOS (Indonesia Press Photo Service) di Makassar 1949 – 1950.
 – Pemimpin majalah "Harian Kebenaran" diterbitkan di Poso 1950 – 1953 dengan oplag 2000/hari.
 – Anggota DPRD Kabupaten Poso 1952-1953.
 – Kepala Kantor Kesenian Kabupaten Poso 1953 – 1955.
 – Pemimpin "Harian Sulawesi Bergolak" di Makassar 1956 – 1958 dengan oplag 15000/hari.
 – Anggota Laskar Tanjumbulu Resimen VII Divisi PKR Luwu Sulawesi Tengah.

5. N a m a : Abdul Rahman Lanasir.
 U m u r : 67 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Rakyat kelas VI.
 Pekerjaan : Anggota DPRD Daerah Tingkat II Luwuk –
 Banggai.
 Alamat : Kompleks Asrama Kodim Luwuk.
 Kegiatan : – 1932 ke Mandar (Sulawesi Selatan) masuk
 Vervolg School 6 tahun. Sebagai anggota
 Yong Islamiten. Juga menjadi pimpinan
 kelompok kepanduan Yong Islamiten Bond
 di tempat itu.
 – 1933 kembali ke Donggala merukunkan hu-
 bungan pandu HW dan pandu SIAP ketika
 ada sedikit kesalah fahaman waktu menga-
 dakan perkemahan di Parigi. (Aspiran kon-
 toliur di Parigi waktu itu Mr. Doormeyer).
 – Setelah kawin tinggal di Pagimana, aktif
 dalam organisasi Muhammadiyah dan men-
 jadi Komandan II dari Pasukan Pemberon-
 tak Pemuda Merah Putih di Luwuk tahun
 1942.
 – Selama masa pergerakan kemerdekaan di
 Sulawesi Tengah berkali-kali masuk penja-
 ra di Luwuk. Terakhir di tahan di kamp
 tahanan militer Layang di Ujung Pandang
 dan dibebaskan setelah penyerahan kedaulat-
 an tahun 1949.
 – Sekarang menjadi Ketua Markas Cabang Le-
 giun Veteran RI Kabupaten Luwuk Banggai.
6. N a m a : A. Bustaman.
 U m u r : 66 tahun.
 Pendidikan : S.R. Kelas VI.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Jawatan Sosial.
 Alamat : Donggala.
 Kegiatan : – Selama pendudukan Jepang bekerja sebagai
 pegawai di Berau (Kalimantan Timur).
 – Datang di Donggala tahun 1946 bekerja pada
 NIGEO (Nederlandsche Indische Gouverne-
 ment Economie Organisatie) dan pada tahun

1949 NIGEO dirubah namanya menjadi Borsumij.

- Memimpin pemogokan buruh Borsumij atas perintah pimpinan buruh dari Jakarta, tetapi tidak lama kemudian buruh-buruh bekerja kembali. Yang tidak kerja gajinya dipotong.
- Aktif membaca berita-berita dari Jawa (Yogyakarta) dan mengikuti berita radio secara diam-diam mengenai perjuangan di Jawa selama masa Revolusi Fisik.
- Anggota Gerakan Merah Putih Donggala.
- Terakhir menjadi pegawai pada Jawatan Sosial Kabupaten Donggala hingga tiba masa pensiun.

7. N a m a : B. Lumentut.
U m u r : 73 tahun.
Pendidikan : Volk Onderwijzer di Luwuk tahun 1932.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SD di Mapane 30-11-1960.
Alamat : Kampung Lawanga Kecamatan Poso Kota.
Kegiatan : - Guru SD Muhammadiyah di Lobu (Kabupaten Banggai) 1934 - 1938.
- Memimpin lagu Indonesia Raya pada Openlucht Hizbulwathan di Lapangan Lobu tahun 1934 menyebabkan dia dimasukkan penjara Luwuk ditahan selama 2 minggu. Dikeluarkan dari penjara Luwuk setelah Konsul Muhammadiyah untuk Sulawesi Utara, Tom Ollie, datang di Luwuk dari Gorontalo.
- Dipindahkan menjadi Guru SD di Mapane tahun 1938. Di Mapane bertugas sebagai guru selama 3 bulan, dipindahkan menjadi guru di Pasokan, pulau Walea Besar.
- Sesudah Proklamasi Kemerdekaan dipindahkan ke Poso dan menjadi Guru di Mapane hingga tiba masa pensiunnya.

8. N a m a : G. Beba.
U m u r : 66 tahun.
Pendidikan : Sekolah Guru 2 tahun.

- Pekerjaan : Penilik Kebudayaan pada kantor Dep. P dan K Kecamatan Lore Utara, Kab. Poso.
9. N a m a : Horas Siregar.
U m u r : 66 tahun.
Pendidikan : Methodist, Boy School di Medan.
Pekerjaan : Wartawan.
Alamat : Palu, Kabupaten Donggala.
Kegiatan : — Berulang-ulang menjadi pimpinan surat kabar/majalah.
— 1932 — 1933 di kota Baru (P. Laut) memimpin majalah bulanan "Panggilan Waktu" yang dicetak di Surabaya pada Drukkerij Insaf milik Dul Arnuwo.
— Pada waktu pertama terbit Panggilan Waktu memuat lagu Indonesia Raya dalam teks Bahasa Indonesia, Perancis, Belanda, dan Jerman. Juga menulis teks Ir. Soekarno di Yogyakarta. Akibatnya Horas Siregar dituntut oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap menghasut rakyat untuk berontak.
— Akhir tahun 1933 ia dipindahkan ke Samarinda, tetap menerbitkan majalah "Panggilan Waktu" yang dirobah menjadi majalah mingguan.
— 1934 Horas Siregar diproses verbal di Samarinda tentang soal pemuatan lagu Indonesia Raya dan pidato Bung Karno. Dengan bantuan seorang kawannya yang memberinya ongkos ia bermaksud lari ke Jepang dengan kapal Nagoya Maru yang kebetulan datang ke Samarinda. Tetapi baru sampai di Makassar ia terus ditangkap karena adanya kawat dari kontroliur Samarinda kepada polisi Makassar. Ia dikembalikan ke Kota Baru untuk diadili dan divonis hukuman penjara satu tahun di penjara Sukamiskin Bandung. Sebelum ia dikirim ke Sukamiskin berita tentang penghukuman dirinya dikirim ke Sukamiskin ia diproses lagi di Samarinda

karena sebelum ke Sukamiskin pernah lagi memuat sebuah karangan dalam surat kabarnya berjudul "Impian Indonesia Merdeka" tulisan dari Dawat Setitik (Nama samaran dari Aswiyantoyo). Oleh pengadilan Samarinda ia dihukum lagi 1½ tahun di penjara Sukamiskin.

- 1937 ketika Yuliana kawin, ia mendapat pengampunan 3 bulan dari jumlah hukumannya. Sekembali dari Sukamiskin ia lalu ke Balikpapan. Selama ia dihukum penjara surat kabarnya mati. Di Balikpapan ia menerbitkan lagi Mingguan "Warta Umum". Karena tulisannya selalu menyerang pemerintah Hindia Belanda akhirnya ia diusir dari Balikpapan. Ia lalu ke Makassar kemudian ke Palu (Sulawesi Tengah) pada bulan September 1937.

Di Palu ia lalu menerbitkan sebuah mingguan "Penerangan" dalam bentuk stensilan dengan oplag 500 expl. dan wilayah penyebarannya disamping kota Palu dan sekitarnya juga sampai ke Poso, Luwuk dan Toli-Toli, Menado, Gorontalo, Makassar dan Medan. Mingguan ini bertahan sampai tahun 1940.

- 1940 bersama dengan Haji Ince Makka menerbitkan majalah "Mingguan Baru" sampai Jepang masuk tahun 1942.
- 1947 menjadi pemimpin redaksi majalah "Cahaya" sebuah tengah bulanan yang hanya berumur satu tahun.
- 1949 - 1950 menjadi pemimpin redaksi "Suara Sulawesi Tengah" yang terbit dua kali seminggu.
- 1952 - 1961 menjadi pimpinan "Mingguan Sulawesi" di Palu.
- 1963 - 1974 menjadi pemimpin redaksi "Duta Revolusi" sebuah mingguan suara PSII yang kemudian berganti nama menjadi "Nusa Putera".

Hasil karya : Roman Perjuangan "Binasa Karena Gadis Borneo", tahun 1937, diterbitkan oleh Toko Buku Tan Siang Tjai, Balikpapan.

10. N a m a : I Latanco Talamoa.
U m u r : 65 tahun.
Pendidikan : Zending Standard School.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Kampung Lombogia, Kecamatan Poso Kota.
Kegiatan : – Kepala Staf I dari Laskar Tanjumbulu 1942 - 1945.
– Aktif dalam Barisan Nasional Indonesia (BNI) 1946 - 1950.
– Pendiri Partai Politik NU Cabang Poso 1954 - 1966.
– Anggota GOLKAR – sekarang.
11. N a m a : Kadmah.
U m u r : 63 tahun.
Pendidikan : SR 5 tahun kemudian mengikuti pendidikan militer Infantri.
Pekerjaan : Pensiunan ABRI.
Alamat : Kampung Tawanjuka, Kecamatan Palu.
Kegiatan : – 1936 masuk tentara KNIL bertugas di Purworejo.
– 1937 - 1945 bertugas di Palu. (Selama pendudukan Jepang menjadi polisi Kerajaan di Biromaru).
– Sesudah Proklamasi Kemerdekaan sampai awal tahun 1946 bertugas kembali sebagai tentara KNIL di Palu dan banyak memberikan bantuan moril kepada para tahanan tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih di Tangsi Besusu Palu.
– 1946 - 1947 bertugas di Menado.
– Awal tahun 1947 - 1949 bertugas kembali di Palu.
– 1950 resmi beralih menjadi APRIS dengan pangkat Kopral.
– Kemudian menjadi anggota TNI sampai

tiba masa pensiun tahun 1960 dengan pangkat terakhir Sersan Mayor.

12. N a m a : La Semmeng Lamalise.
U m u r : 50 tahun.
Pendidikan : S.R. Kelas V
Pekerjaan : Pegawai Kantor Camat Banawa di Donggala.
Alamat : Desa Gunungbale, Donggala.
Kegiatan : – Waktu kecil tinggal dekat rumah Asisten Residen Donggala karena ayahnya menjadi opas pada kantor Asisten Residen.
– Banyak bergaul dengan putera/puteri Asisten Residen Donggala terakhir sesaat sebelum Jepang datang.
– Semasa Jepang banyak mengikuti kejadian-kejadian penting.
– Selama revolusi fisik berada di Donggala dan banyak mengikuti kejadian-kejadian berlaku pada saat itu.
13. N a m a : Lahawana Pandan.
U m u r : 51 tahun.
Pendidikan : SPG Negeri.
Pekerjaan : Pegawai Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
Kegiatan : – Komandan Pemuda Gerakan Merah Putih Sigi-Dolo 1946.
– Mengikuti latihan dasar kemiliteran di Dolo pada tahun 1946 selama seminggu dipimpin oleh Bung Durno dari Jawa.
– Turut membongkar jembatan Sibonu ketika ada patroli NICA ke Kaleke tahun 1946.
– Turut menyerbu ke tangsi Besusu Palu menuntut pembebasan para tahanan tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih.
– Ikut serta dalam rapat-rapat rahasia merencanakan gerakan-gerakan yang akan dilakukan.
14. N a m a : Mahmud Radjaili, Haji.
U m u r : 47 tahun.

- Pendidikan : S.R. Kelas VI.
 Pekerjaan : Anggota DPRD Tingkat II Buol Toli-Toli.
 Alamat : Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kab. Buol Toli-Toli.
 Kegiatan : – Anggota PSII Toli-Toli 1949 - 1971.
 – Guru SD Malomba 1949 – 1957.
 – Kepala Desa Malomba 1958 – 1978.
 – Anggota Panitia Penyusunan Perjuangan Rakyat Kabupaten Buol–Toli-Toli.
 Hasil karya : Riwayat Singkat dari Peristiwa Pemberontakan Rakyat Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol – Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah melawan Imperialisme Jepang pada tanggal 18 Juli 1945.
15. N a m a : Mohammad Mahmud, Haji.
 U m u r : 56 tahun.
 Pendidikan : SGA Negeri 1956.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Dinas P dan K. Kabupaten Buol Toli-Toli.
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 8, Toli-Toli.
 Kegiatan : – Anggota PSII sampai 1960.
 – Pada waktu menentang masuknya NICA di Gorontalo, bersama-sama dengan Nani Wartabone menyebarkan pamflet dari Makassar (Ujung Pandang) yang isinya mendukung Negara RI yang berpusat di Yogyakarta.
 – Pertengahan Oktober 1945 tiba di Buol dari Gorontalo bersama-sama dengan pamannya Ahmad Mahmud membawa bendera merah putih dan menaikkannya di atas tiang di Leok selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.
 – Awal Nopember 1945 pasukan NICA datang ke Buol dipimpin oleh sersan Lumoa, dia bersama pamannya Ahmad Mahmud ditangkap dan dibawa ke Menado dan dipenjarakan di sana dan nanti dibebaskan sesudah penyerahan kedaulatan 1949.

16. N a m a : Mohammad Salim Haji Mallu, Haji.
U m u r : 67 tahun.
Pendidikan : Sekolah Rakyat kelas IV zaman Belanda.
Pekerjaan : Pengusaha Penginapan Selamat.
Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Baolan, Toli-Toli.
Kegiatan : — Bersama-sama dengan I.D. Awuy, H.L. Waa-
ni dan Malingga membentuk organisasi di
bawah tanah bertujuan merobohkan peme-
rintah penjajah Belanda di Toli-Toli.
— Dalam pemberontakan yang mereka laku-
kan pada tahun 1942 berhasil membunuh
Inspektur polisi bernama Boertje, menahan
kontrolieur Toli-Toli De Hooft, kontrolieur
Buol De Vries dan kepala Stichting Het
Coprafonds Toli-Toli bernama Yansen.
— Sebagai klimaks dari pemberontakan yang
mereka lakukan, pada tanggal 1 Pebruari
1942, Mohammad Salim Haji Mallu memim-
pin penaikan bendera merah putih di depan
kantor PSII kampung Lonti Toli-Toli, di-
iringi lagu Indonesia Raya. Penggerak ben-
dera adalah Mohammad Nawir Haji Hamid
dan Abu Baeda.
— Ketika pasukan tentara KNIL datang dari
Donggala memadamkan pemberontakan,
Mohammad Salim Haji Mallu melarikan diri
ke Gorontalo, bergabung dengan pasukan
Nani Wartabone, dan kembali ke Toli-Toli
setelah Jepang datang.
— Sponsor dalam pemberontakan rakyat Ma-
lomba membunuh Ken Kanrikan Imaki pada
peristiwa tanggal 18 Juli 1945.
— Selama pemerintahan NICA terus menerus
membantu gerakan-gerakan menentang pen-
jajah Belanda di Toli-Toli.
— Nopember 1945 s/d Juni 1946 dipenjarakan
oleh NICA di Samarinda dalam kaitannya
dengan tuntutan pemerintah Belanda terha-
dap tokoh-tokoh yang tersangkut dalam Ge-
rakan Merah Putih 1942 di Toli-Toli.

- Aktif dalam gerakan pemuda merebut kekuasaan dari tangan polisi NICA di Toli-Toli pada bulan Maret 1950.
- Salah seorang tokoh dari Gerakan Pembela Pemerintah Pusa (GP3) di Toli-Toli ketika merebut kekuasaan dari pasukan Permesta tanggal 28 April 1958.

17. N a m a : Morel Metahang.
 U m u r : 53 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Guru Jepang (Kyoin Roseinso).
 Pekerjaan : Pensiunan Guru.
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 25, Panasakan, Toli-Toli.
 Kegiatan : - Belajar dan mengajar.
 - Sebagai wartawan, banyak menulis pada surat-surat kabar/majalah di Palu, Ujung Pandang dan Jakarta.
 - Pada waktu Permesta memimpin pemuda dalam Gerakan Pembela Pemerintah Pusat (GP3) di Toli-Toli. GP3 ini pimpinannya anggota partai politik yaitu PNI (Morel Metahang), PSII (Mohammad Salim Haji Mallu), Masyumi (Haji Mohammad Arsyad).
 Hasil karya : Lagu dan Tari "Patriot Baolan".

18. N a m a : M. Yondi Maranua, Haji.
 U m u r : 67 tahun.
 Pendidikan : SR Kelas III.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri.
 Alamat : Kampung Lambara Kecamatan Tawaeli.
 Kegiatan : - Sponsor berdirinya partai politik Gerima di Tawaeli.
 - Kepala Staf Gerakan Merah Putih di Tawaeli.
 - Turut dalam penyerbuan tangsi militer di Besusu Palu tahun 1946 untuk membebaskan para tahanan tokoh-tokoh Gerakan Merah putih.
 - Karena aktif dalam gerakan-gerakan me-

mentang penjajah Belanda selama masa Revolusi Fisik, sekarang juga menjadi anggota Veteran RI.

19. N a m a : Mohammad Sunusi Patimbang, Haji.
U m u r : 64 tahun.
Pendidikan : Tamat Aliyah Alchairat dan sempat mengikuti kuliah khusus selama 2 tahun di Alchairat.
Pekerjaan : Usaha Swasta disamping sebagai seorang anggota Veteran RI.
Alamat : Kampung Baru, Palu.
Kegiatan : — Selama menjadi guru Alchairat di Luwuk ikut aktif dalam Gerakan Merah Putih Luwuk tahun 1942.
— Selama masa Revolusi Fisik aktif mengikuti gerakan-gerakan di bawah tanah menentang penjajah Belanda.
— Anggota Laskar Resimen Tanjumbulu, berjuang bersama-sama Abdul Latief Mangitung sejak dari Poso sampai beliau pindah tempat tinggal di Palu.
— Selama masa revolusi fisik di Palu aktif memberikan penerangan kepada rakyat di kampung-kampung tentang pentingnya arti kemerdekaan bangsa dan negara.
20. N a m a : Pasturu Sobe.
U m u r : 57 tahun.
Pendidikan : Vervolg School kelas V.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Kampung Pewunu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.
Kegiatan : — Menjabat Sekretaris PNI di Kaleke/Pewunu tahun 1945 merangkap sekretaris Laskar Merah Putih Sigi-Dolo.
— Pada zaman Jepang mengikuti kursus pertanian (Nomindojo) angkatan ke 2 selama 6 bulan di Kalawara.
21. N a m a : Pahuta.

U m u r : 60 tahun.
 Pendidikan : Vervolg School kelas V.
 Pekerjaan : Pensiunan ABRI.
 Alamat : Desa Tatanga, Kecamatan Palu Kota.
 Kegiatan : – Masuk tentara KNIL tahun 1948 dan mengikuti pendidikan di Cimahi VTD/AAT (sekarang disebut CAD).
 – Karena berkelahi dengan seorang Belanda di Cimahi kemudian dipindahkan ke Tanjung Priok mengawasi gudang dan bertugas membagi-bagikan kebutuhan tentara di seluruh Indonesia.
 – Bertugas sebagai TNI di Palu dalam kesatuan Kompi 758 pimpinan Kapten Frans 1954 - 1960.
 – Tahun 1970 mulai menjalani masa pensiun.

22. N a m a : Rabe Entoh.
 U m u r : 64 tahun.
 Pendidikan : Volk School kelas IV.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai PU Daerah Kabupaten Poso
 Alamat : Kampung Kolaka, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Poso.
 Kegiatan : – Mandor Jalan di Gontar 1939 – 1959.
 – Kepala Distrik Tomata 1959 – 1963.
 – Pegawai pada PU Daerah Kabupaten Poso 1964 – 1971.
 – Tanggal 1-1-1972 dipensiunkan sebagai pegawai PU Daerah Kabupaten Poso.

23. N a m a : R.M. Poesadan, Haji.
 U m u r : 70½ tahun.
 Pendidikan : OSVIA di Makassar tamat tahun 1951.
 Pekerjaan : Pensiunan Residen.
 Alamat : Toli-Toli.
 Kegiatan : – 1931 – 1933 AIB di Palu.
 – 1933 – 1936 AIB di Gorontalo.
 – 1936 – 1938 BA di Buol.
 – 1938 – 1940 BA di Sangir Talaud.
 – 1940 – 1949 BA di Toli-Toli.

- 1949 – 1952 Kepala Daerah Sulawesi Tengah di Poso.
 - 1952 – 1954 Kepala Daerah Sulawesi Tenggara di Bau-Bau.
 - 1954 – 1959 BKDH Tingkat II Donggala.
 - 1959 – 1965 BKDH Tingkat II Buol – Toli-Toli.
 - 1965 – 1968 Residen di Palu.
24. N a m a : Rajagunu Datupamusu.
 U m u r : 66 tahun.
 Pendidikan : Vervolg School belum tamat lalu keluar.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Distrik Poso.
 Alamat : Kampung Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.
 Kegiatan : – Anggota SI pada waktu ayahnya Datupamusu (raja Dolo) menjadi Ketua SI di kerajaan Dolo.
 – Mewakili Raja Tojo Tanjumbulu pada waktu pengambil alihan kekuasaan dari tangan Belanda di Ampana, ibu kota kerajaan Toto pada peristiwa penaikan bendera merah putih tanggal 20 Pebruari 1942.
 – Menjadi utusan Gerakan Merah Putih Poso menyampaikan instruksi Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi kepada raja-raja di Donggala-Palu dan sekitarnya supaya mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
25. N a m a : Sulaeman Amir, Haji.
 U m u r : 73 tahun.
 Pendidikan : Vervolg School kelas IV.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pamongpraja.
 Alamat : Luwuk.
 Kegiatan : – Menjadi wakil Raja Banggai melaksanakan tugas pemerintahan dengan pangkat Kapitan Laut meliputi daerah Balantak sampai Batui.
 – Anggota PNI dari tahun 1950 – 1956.
 – Diangkat menjadi Asisten Wedana tahun 1954
 – Menjadi Wedana di Banggai tahun 1960.

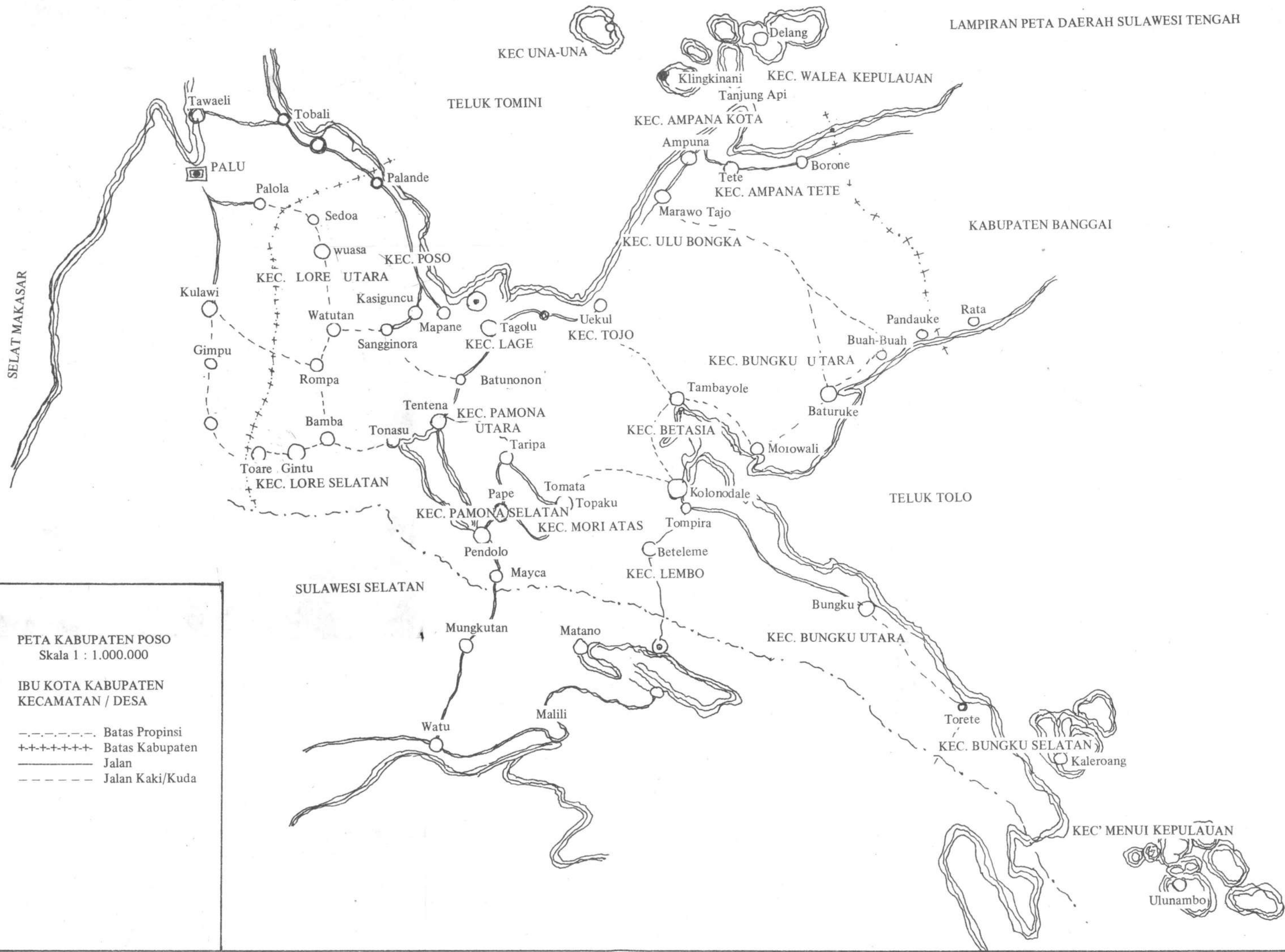
- Menjadi anggota BPH di Luwuk tahun 1961.
 - Anggota Komite 12 dalam peristiwa Merah Putih di Luwuk tahun 1942 dengan jabatan Bahagian Keuangan dan Perbendaharaan.
26. N a m a : V.F. Ernst.
 U m u r : 75 tahun.
 Pendidikan : Vervolg School kelas V.
 Pekerjaan : Pensiunan Sersan KNIL.
 Alamat : Kampung Maesa Palu.
 Kegiatan : Sebagai tentara KNIL zaman Belanda.
27. N a m a : Wongko Lemba Talasa.
 U m u r : 65 tahun.
 Pendidikan : OSVIA di Makassar.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri dengan jabatan terakhir Kepala Inspektorat Umum kantor BKDH Kabupaten Poso.
 Kegiatan : – Pernah menjadi Ketua PNI sampai dua kali.
 – Menjadi polisi Jepang selama Jepang berkuasa di Sulawesi Tengah dan anggota Sukaigin mewakili Sulawesi Tengah di Menado tahun 1944.
 – Sejak zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman kemerdekaan berkali-kali menjabat dalam pemerintahan negeri.
 – Menjadi pelopor Gerakan Merah Putih di kota Poso atas penunjukan Gubernur Sulawesi I Dr. Ratulangi yang pada waktu itu berkedudukan di Makassar.
 – Anggota Dewan Pleno Legiun Vegeran RI di Poso.
28. N a m a : W.S. Ruata.
 U m u r : 62 tahun.
 Pendidikan : Bestuur School di Makassar.
 Pekerjaan : Pensiunan Pamongpraja.
 Alamat : Bumi Bahari, Palu.
 Kegiatan : – Menjadi Ajun Jaksa di Donggala tahun 1942 sesaat sebelum Jepang datang.

- Pada masa pendudukan Jepang pernah ditahan bersama-sama dengan Ben Waleleng dan Bulong karena difitnah sebagai mata-mata musuh (Sekutu). Tidak lama dalam tahanan kemudian dikeluarkan.
- Pada masa revolusi fisik menjadi Jaksa di Tinombo dan pada tahun 1947 mewakili Raja Muotong, Kuti Tombolotutu menghadiri rapat pembentukan Dewan Raja-Raja Sulawesi Tengah di Poso.

29. **N a m a** : Yusuf Monoarfa.
- U m u r** : 69 tahun.
- Pendidikan** : Vervolg School Kelas V.
- Pekerjaan** : Pensiunan Pegawai Negeri.
- Alamat** : Kampung Jolek, Simpong, Luwuk.
- Kegiatan** :
- Pada zaman pergerakan kemerdekaan berulang-ulang masuk penjara karena aktivitasnya dalam partai PSII.
 - Anggota Komite 12 dalam Peristiwa Merah Putih tahun 1942 di Luwuk dengan jabatan Sekretaris dan Penghubung.
 - Selama zaman Jepang dipenjarakan di Menado selama 2 tahun 1 bulan, sebelumnya telah ditahan di penjara Luwuk selama 3 bulan. Dibebaskan dari tahanan Menado tahun 1943 setelah Jenderal Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada bulan September.
 - Zaman NICA dipenjarakan di Kamp tahanan militer Layang Makassar dan nanti dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949.
 - Akibat penyiksaan dalam tahanan sekarang menjadi tuli dan tidak dapat mendengar sama sekali.
 - Karena aktivitasnya dalam perjuangan kemerdekaan di daerah Luwuk-Banggai seka-diangkat menjadi anggota Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. Po. 645/67/PK tanggal 15 - 8 - 1967.

PROPINSI SULAWESI TENGAH





Tidak diperdagangkan untuk umum

Perpustakaan
Jenderal